



PT HM SAMPOERNA Tbk.

SAMPOERNA  
untuk Indonesia

# Komitmen Kami untuk Indonesia



Menyerap lebih dari

**85.000<sup>1</sup>**



**Tenaga Kerja**



**Fasilitas  
Produksi**

- 5** Fasilitas produksi sigaret kretek tangan
- 2** Fasilitas produksi sigaret kretek mesin
- 38** Fasilitas produksi sigaret kretek tangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh Mitra Produksi Sigaret



**39** Tujuan Ekspor<sup>2</sup>

**4 pilar program CSR & Kontribusi:**

-  Akses terhadap Pendidikan
-  Peluang Ekonomi
-  Pemberdayaan Perempuan
-  Tanggap Bencana & Kesiapsiagaan

lebih dari

**95.000** penerima manfaat  
di tahun 2013 & 2014<sup>3</sup>



Selama lebih dari 100 tahun beroperasi di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) berkomitmen untuk terus berkontribusi secara aktif bagi perekonomian nasional melalui investasi, lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekspor, serta program-program CSR dan kontribusi. Sampoerna yakin bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan performa bisnis, namun juga kemampuan kami dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas.

1. Meliputi 29.600 karyawan PT HM Sampoerna Tbk., dan 56.500 karyawan Mitra Produksi Sigaret (berdasarkan Laporan Tahunan 2013 PT HM Sampoerna Tbk. dan Laporan Keuangan Konsolidasi PT HM Sampoerna Tbk. dan afiliasinya per tanggal 30 Juni 2014 dan 2013)  
2. Berdasarkan data ekspor internal PT HM Sampoerna Tbk. beserta afiliasi dan anak perusahaannya  
3. Berdasarkan data internal CSR & Contributions PT HM Sampoerna Tbk.

Laporan Tahunan **2014**



# **Kemitraan Dunia Usaha & Pemerintah Dalam Persaingan Global**



# **Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)**

**Gedung Permata Kuningan Lt. 10**

**Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi**

**Jakarta 12980 - Indonesia**

**Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746**

**Email : sekretariat@apindo.or.id - Website : www.apindo.or.id**

## **VISI & MISI**

### **VISI :**

**Terciptanya iklim usaha yang baik dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara nyata.**

### **MISI :**

- 1. Meningkatkan daya juang dan daya saing Perusahaan / Pengusaha Indonesia.**
- 2. Mewujudkan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis serta berkeadilan.**
- 3. Melindungi, memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota.**
- 4. Merepresentasikan dunia usaha Indonesia diberbagai lembaga Nasional dan Internasional dan secara khusus di dalam Lembaga Ketenagakerjaan**



Tahun 2014 menjadi tonggak sejarah baru bagi bangsa Indonesia dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (PEMILU) yang menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih. Proses politik yang berjalan baik dan apresiasi dunia terhadap kepemimpinan baru ini tentunya melahirkan optimisme besar bagi dunia usaha yang sebelumnya mengambil sikap menunggu untuk menjalankan kegiatan investasi maupun transaksi bisnis lainnya.

Dunia usaha semakin bergeliat dengan semangat baru untuk melakukan perubahan, terutama dalam menjalin kemitraan bersama pemerintah baru di era persaingan global saat ini. Namun, tantangan besar tetap membayangi pemerintahan baru mengingat Hubungan Industrial masih belum menunjukkan relasi harmonis antara dunia usaha dengan pekerja, khususnya dalam hal pengupahan yang seringkali berujung pada aktivitas demonstrasi dari unsur pekerja. Meskipun demikian, dunia usaha tetap memiliki peluang besar dalam menciptakan

iklim investasi yang lebih kondusif karena isu Hubungan Industrial di sepanjang tahun 2014 masih dinilai relatif baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari menurunnya intensitas aktivitas demonstrasi dan tindak kekerasan lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan. Selain itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Isu lain terkait Hubungan Industrial yang menjadi perhatian APINDO adalah mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, APINDO mencermati beberapa permasalahan yang dinilai kurang menguntungkan, khususnya mengenai Koordinasi Manfaat (*Coordination of Benefit - CoB*) antara BPJS Kesehatan dengan Asuransi Komersial dan Penjamin Lainnya. Sementara itu, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga dinilai APINDO sebagai salah satu permasalahan dalam implementasi BPJS Kesehatan. Hal

## SAMBUTAN KETUA UMUM



ini dikarenakan belum maksimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan FKTP yang mengakibatkan tidak terlayannya peserta dengan baik. Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas para pekerja. Untuk itu, APINDO mengusulkan adanya kemungkinan rujukan dari penyedia layanan kesehatan selain FKTP. APINDO sebagai representasi dunia usaha berupaya menjembatani permasalahan tersebut dengan membuat Nota Kesepahaman bersama BPJS Kesehatan pada 22 Desember 2014. Hal tersebut bertujuan meminimalisir beban pembayaran ganda bagi perusahaan dan pekerja, termasuk menjamin pekerja dan keluarganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang kualitasnya minimal sama dengan sebelum menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Persoalan juga muncul pada Jaminan Pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan, mengingat belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Pensiun. Merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial), pelaksanaan program jaminan pensiun harus mulai dilaksanakan paling lambat 1 Juli 2015.

APINDO menilai pemerintah belum memiliki kesamaan pandangan dengan pengusaha dan pekerja terkait substansi dasar program jaminan pensiun, diantaranya sistem manfaat pasti (*defined benefit*), filosofi biaya dan para pihak yang mesti menanggungnya. Selain itu, antar instansi pemerintah juga belum mencapai kesepakatan secara internal mengenai pokok-pokok substansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Pensiun yang hingga saat ini belum ditetapkan.

Sebagai mitra pemerintah dalam menghadapi persaingan global, APINDO memberikan kontribusi dengan menyusun *Roadmap* Perekonomian yang memfokuskan pada penciptaan tiga juta lapangan kerja berkualitas per tahun dalam kurun waktu 2014 - 2019. Penyusunan *Roadmap* dilakukan secara komprehensif oleh sejumlah pengusaha, pakar, dan teknokrat baik dari institusi Nasional maupun Internasional dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur dalam beberapa jangka waktu, yaitu 100 hari, satu tahun, dan lima tahun. Sektor kebijakan dalam rekomendasi tersebut meliputi: Pangan dan Pertanian, Energi, Manufaktur,

## SAMBUTAN KETUA UMUM

Jasa, dan Finansial. Isu lintas sektoral juga dibahas dalam Roadmap terkait kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kebijakan makro, dan infrastruktur. Roadmap tersebut telah diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla dan APINDO masih terus mengawal implementasi rekomendasi Roadmap dalam pemerintahan baru saat ini.

APINDO melalui Bidang Hubungan Internasional terlibat secara aktif pula dalam hal menentukan kebijakan bilateral, regional, dan multilateral dalam hal perdagangan, investasi dan ketenagakerjaan. Hal tersebut dilihat dari kerjasama yang dilakukan APINDO dengan European Commission - Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia - Uni Eropa, Indonesia - Korea, dan berbagai Kamar Dagang Asing. APINDO melalui proyek EU - CEPA misalnya, telah memberikan rekomendasi dan posisi yang jelas antara Indonesia dan Uni Eropa dalam CEPA, dan sektor swasta saat ini menunggu realisasi dari pemerintah. Dari perspektif bisnis, kerjasama CEPA dengan Uni Eropa dianggap menjadi saluran yang efektif dalam mengeksplorasi dan menciptakan peluang pasar baru bagi dunia usaha. CEPA dengan Uni Eropa diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitif Indonesia dari negara ASEAN lainnya. Kerjasama tersebut menjadikan APINDO berkesempatan untuk menegosiasikan relaksasi hambatan non-tariff

yang selama ini menyandera potensi optimal perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dijalankan pada akhir 2015 juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya. Pertumbuhan pekerja migran ASEAN diprediksi meningkat dan setengahnya berasal dari Indonesia. Dengan demikian, negeri ini perlu menyiapkan diri, termasuk memberikan fokus perhatian pada delapan profesi yang menjadi prioritas dalam *Mutual Recognition Arrangements (MRA)*. Delapan profesi tersebut adalah Akuntansi, Keperawatan, Arsitektur, Pariwisata, Survei, Perawatan Gigi, Praktek Kesehatan, dan Teknik. Implementasi MRA menjadi salah satu upaya dalam memperkuat kerjasama antara negara ASEAN dan hal ini diharapkan memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi pekerja dan dunia usaha.

Di penghujung tahun 2014, APINDO melakukan pergantian Ketua Umum dari saya kepada Hariyadi B. Sukamdani. Proses estafet kepemimpinan ini kami sadari sebagai proses regenerasi dalam rangka mencapai sinergi yang lebih erat dan inovatif antara dunia usaha dengan pemerintah.

Singkat kata, segala aktivitas dan upaya yang dilakukan APINDO di sepanjang tahun 2014 diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi pekerja berkualitas karena hal tersebut merupakan cara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terima Kasih.

**DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA  
(APINDO)**



**Sofjan Wanandi  
Ketua Umum**

# DAFTAR ISI



## **II VISI DAN MISI**

## **III SAMBUTAN KETUA UMUM**

## **VI DAFTAR ISI**

## **VIII STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018**

## **XX STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO**

## **XXII DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO**

### **2 BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH**

### **14 BIDANG HUKUM & ADVOKASI**

### **22 BIDANG INFORMASI & LAYANAN ANGGOTA**

### **34 BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL & INVESTASI**



**50 BIDANG UKM - IKM**

**62 BIDANG KETENAGAKERJAAN**

**66 BIDANG KAJIAN & ASISTENSI EKSEKUTIF**

**76 BIDANG PERDAGANGAN**

**80 BIDANG PERINDUSTRIAN**

**84 BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**

**98 LIPUTAN KHUSUS**

- Estafet Kepemimpinan APINDO diserahkan kepada Bapak Hariyadi B. Sukamdani
- DPN APINDO tingkatkan apacity building ke Malaysian Employers Federation (MEF)

**100 KEGIATAN DEWAN PIMPINAN PROVINSI**

## **DEWAN PERTIMBANGAN**

**KETUA KEHORMATAN :**



**M. Jusuf Kalla**

**SEKRETARIS :**



**Franky O. Widjaja**

**KETUA :**



**Theodore P. Rachmat**

**ANGGOTA :**



**Agung Adiprasetyo**



**Arifin Panigoro**



**Chairul Tanjung**



**Djoni Andhella**



**Eddy Sariaatmadja**



**Eddy Sugianto**



**Edwin Soeryadjaya**



**Elvyn G. Masassya**



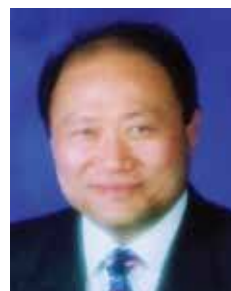
**Erman Suparno**



**H.M. Aksa Mahmud**



**H.M. Sattar Taba**



**Hari Boedi Hartono**



**Haryanto Adikoesoemo**



**Hasanuddin Rachman**

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018



**James T. Riady**



**Karen Agustiawan**



**Kiki Barki**



**Mardjoeki Atmadiredja**



**Mucki Tan**



**Nur Pamudji**



**Oesman Sapta**



**Peter Sondakh**



**Prayogo Pangestu**



**Prijono Sugjarto**



**Robert Budi Hartono**



**S. P. Lohia**



**Sudhamek**



**Sugianto Kusuma**



**Surya Darmadi**



**Suryo B. Sulisto**



**Tahir**



**Trihatma K. Haliman**



**William Katuari**

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## DEWAN PIMPINAN HARIAN

KETUA UMUM

WAKIL KETUA UMUM



Sofjan Wanandi



Chris Kanter

KETUA :



Anton J. Supit



Anthony Hilman



Benny Soetrisno



D.E. Setijoso



Eddy Hartono



Endang Susilowati



Franky Sibarani



Fransiscus Welirang



F.X. Sri Martono



Hariyadi B. Sukamdani



Johnny Darmawan



Mintardjo Halim



Nina Tursinah



Putri K. Wardhani



Rachmat Gobel



Shinta Widjaja Kamdani



Soebronto Laras



Teguh Satria

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## SEKRETARIS UMUM



Suryadi Sasmita

## WAKIL SEKRETARIS UMUM :



Herman Kasih



Iftida Yasar



Lukito Wanandi



M. Aditya Warman



Sanny Iskandar

## BENDAHARA UMUM



Victor R. Hartono

## WAKIL BENDAHARA UMUM :



Glenn Sugita



Harry Hanawi



Yeane Lim

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## 1. BIDANG KETENAGAKERJAAN :

- Ananto Harjokusumo
- Deddy Harsono
- Didik P. Sumbodo
- Dipasusila Satia Utama
- Handoyo Budhisejati
- Harijanto
- Harjono
- Inda D. Hasman
- Matheus Sekardianto
- Myra M. Hanartani
- Sarman Simanjorang
- Timoer Soetanto



Ananto Harjokusumo



Deddy Harsono



Didik P. Sumbodo



Dipasusila Satia Utama



Handoyo Budhi Sejati



Harijanto



Harjono



Inda D. Hasman



Matheus Sekardianto



Myra M. Hanartani



Sarman Simanjorang



Timoer Soetanto

## 2. BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI :

- Ananda Siregar
- Bernadino M. Vega
- Catharina Widjaja
- Chris Septiryman
- Fachry Thaib
- Gautam Naraindras
- Hardini Puspasari
- Hendra Widjaja
- Sinta Sirait
- Selo Winardi
- Wahyuni Bahar
- Yos Adiguna Ginting



Bernadino M. Vega



Catharina Widjaja



Chris Septiryman



Fachry Thaib



Gautam Naraindras



Hardini Puspasari



Hendra Widjaja



Sinta Sirait



Selo Winardi



Wahyuni Bahar



Yos Adiguna Ginting

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## 3. BIDANG PERTANIAN :

- Adikelana Adiwoso
- Arif Rachmat
- Farid Bahar
- Joko Supriyono
- Krissantono
- Sudirman



Adikelana Adiwoso



Arif Rachmat



Farid Bahar



Joko Supriyono



Krissantono



Sudirman

## 4. BIDANG KEUANGAN DAN PERBANKAN :

- Christian Wanandi
- Gunawan Tjokro
- Haryono Tjahjarijadi
- Hendrisman Rahim
- Henry Chevalier
- Henrietta Kristanto
- Herris B. Simandjuntak
- Hotman Simbolon
- Prijohandojo Kristanto
- Siddhi Widyapathama
- Tjip Ismail
- Willy S. Dharma



Christian Wanandi



Gunawan Tjokro



Haryono Tjahjarijadi



Hendrisman Rahim



Henry Chevalier



Henrietta Kristanto



Herris B. Simandjuntak



Hotman Simbolon



Prijohandojo Kristanto



Siddhi Widyapathama



Tjip Ismail



Willy S. Dharma

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## 5. BIDANG PERHUBUNGAN DAN ESDM

- Andianto Setiabudi
- Arif Wibowo
- Bani M. Mulia
- David Hutagalung
- Hari Jaya Pahlawan
- Jobi Triananda
- Lawrence Barki
- Mohamad Afdal Bahaudin
- Muliawan Margadana
- Syakib Bafagih
- Tiffany Johanes



Andianto Setiabudi



Bani M. Mulia



Jobi Triananda



Hari Jaya Pahlawan



Lawrence Barki



Muliawan Margadana



Syakib Bafagih



Tiffany Johanes

## 6. BIDANG INDUSTRI MANFAKTUR (ANEKA INDUSTRI)

- Adji Sapta
- Ade Sudrajat
- Ali Soebroto
- Eddy Yusuf
- Eko Rudianto
- Henry C. Wijaya
- I Made Dana Tangkas
- Massaruddin
- Noergardjito
- R. Basuki
- Rivana Erni
- Rosalina
- Sumirad Widodo
- Wartam Radjid



Ade Sudrajat



Eko Rudianto



I Made Dana Tangkas



R. Basuki



Wartam Radjid

## 7. BIDANG PENDIDIKAN

- Agus Dwijanto
- Bob Azzam
- Darwoto
- Doddy Irawan
- Gama A. Yogotomo
- Ishak A. Muin
- Luki Setiawan
- Sugito
- Zulfikar Amiruddin



Agus Dwijanto



Bob Azzam



Darwoto



Doddy Irawan



Gama A. Yogotomo



Ishak A. Muin



Luki Setiawan



Zulfikar Amiruddin

## 8. BIDANG INDUSTRI JASA

- Arfan Awaludin
- Ahmad Zaky Amirudin
- Benecditus Sulaiman
- Cecep Rukmana
- Dian Noeh Abubakar
- Johanes Setijono
- Rina R. Maksum
- Wicaksono Soebroto
- Yasha Chatab



Dian Noeh Abubakar



Wicaksono Soebroto



Yasha Chatab

## 9. BIDANG KETAHANAN PANGAN

- Benny Kusbini
- Glenn Pardede
- Hari Lukmito
- Thomas Darmawan



Benny Kusbini



Glenn Pardede



Thomas Darmawan

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## 10. BIDANG LOGISTIK

- Bambang Soetiono
- Iskandar Zulkarnain
- Moenardji Soedargo
- Stefanus H. Ruspandy
- Sumadi Kusuma



Bambang Soetiono



Iskandar Zulkarnain



Moenardji Soedargo



Stefanus H. Ruspandy



Sumadi Kusuma

## 11. BIDANG INFRASTRUKTUR

- Evan Kanter
- Franky Lumenta
- Henry Wahyu
- Jeffry Nedi
- Ongki Abdulrachman
- Rama Datau
- Rico Herlambang
- Zulnahr Usman



Evan Kanter

## 12. BIDANG EKONOMI KREATIF

- Amy Wirabudi
- Brata Rafli
- Chris Hardijaya
- Handito Joewono
- Intan Katoppo
- Leoni Agustin
- Sinta Dhanuwardoyo
- Solichin



Brata Rafli



Sinta Dhanuwardoyo

## 13. BIDANG UKM - IKM

- Apreyvitawulansari
- Djoko Wintoro
- Endah Karniasari
- Fachruddin Basalamah
- Gina Karsana
- Indira Abidin
- Miftachul Bari
- Nita Yudi
- Nursupriyani
- RM Adji Srihandoyo
- Riza Deliansyah
- Sisdjiatmo K. Widhaningrat
- Susan Budiharjo
- Syahnhan Phalipi
- Wulan Maharani Tilaar



Djoko Wintoro



Endah Karniasari



Fachruddin Basalamah



Gina Karsana



Indira Abidin



Nursupriyani



RM Adji Srihandoyo



Riza Deliansyah



Susan Budiharjo



Syahnhan Phalipi



Wulan Maharani Tilaar

## 14. BIDANG ORGANISASI & PEMBERDAYAAN DAERAH

- Djoko Sungkono
- Fernando Ganindito
- Feri Sunardi
- Gema Taruna
- Mansyur Achmad
- M. Alfian Alfian
- Murniansya Madjid
- Rico Bakri
- Sharmila
- Syamsul Munir
- Tedjodinigrat
- Urip Widodo



Gema Taruna



Syamsul Munir



Urip Widodo

# STRUKTUR, KOMPOSISI & PERSONALIA DPN APINDO 2013 - 2018

## 15. BIDANG HUKUM DAN ADVOKASI

- Arfiyanto Adisastra
- Evert Matulesy
- Hana Nurlela
- Ibrahim Sumantri
- Moh. Syaufii Syamsuddin
- M. Aulia Syaufii
- Perryanto Wahyudi
- Silva Liem
- Sudirman
- Susanto Widjaja



Arfiyanto Adisastra



Evert Matulesy



Hana Nurlela



Ibrahim Sumantri



Moh. Syaufii Syamsuddin



M. Aulia Syaufii



Perryanto Wahyudi



Silva Liem



Sudirman



Susanto Widjaja

## 16. BIDANG PERDAGANGAN

- Afit Purwanto
- Dharma Surjaputra
- Fernando Hutahaeen
- Helga Kumontoy
- Lay Ridwan Gautama
- I Made Astawa
- Josep R. Bica Wicaksono
- Megain Wijaya
- Nursalam
- Ratna Sari Loppies
- Roy Sembel
- Sancoyo Antariksa
- Satria Hamid
- Sarwi Notoatmodjo
- Sribugo Suratmo



Dharma Surjaputra



Fernando Hutahaeen



Helga Kumontoy



Lay Ridwan Gautama



I Made Astawa



Josep R. Bica Wicaksono



Megain Wijaya



Nursalam



Ratna Sari Loppies



Roy Sembel



Sancoyo Antariksa



Satria Hamid



Sarwi Notoatmodjo

## 17. BIDANG RITEL

- Agus Riandy Sijoatmodjo
- Mira Amahorseya
- Pudjianto
- Thomas Farial
- Tutum Rahanta
- Yongki Susilo



Agus R. Sijoatmodjo



Mira Amahorseya



Pudjianto



Thomas Farial



Tutum Rahanta



Yongki Susilo

## 18. PROPERTI DAN KONSTRUKSI

- Andreas Suharsono
- Ben Susanto
- Eddy Hussy
- Edwyn Lim
- Halim Shahab
- Hadian Pramudika
- Hendra Lesmana
- Jimmy Sardjono Michael
- Johannes Archiadi
- Johannes Ongko
- Roy Mande
- Setyo Maharso
- Stefanus Ridwan
- Teguh Budiono
- Theresia Rustandi



Edwyn Lim



Setyo Maharso



Teguh Budiono



Theresia Rustandi

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO

## Direktur & Wakil Direktur Eksekutif



**P. Agung Pambudhi**  
Direktur Eksekutif



**Diana M. Savitri**  
Wakil Direktur  
Eksekutif



**Chris S. Suhendra**  
Wakil Direktur  
Eksekutif

## Sekretaris Ketum, Departemen Informasi & Layanan Anggota



**Ani Sulistyowati**  
Dept. Head



**Anisa Alfadillah**  
Staf

## Departemen HRD & General Affair



**Iwan Zulkarnain**  
Manager



**Fitria Purnama S.**  
Staf



**Yoana Yosepin**  
Staf



**Andri P.**  
Penata Kantor



**M. Septiyadi**  
Penata Kantor



**Tri Adi**  
Penata Kantor

## Departemen Organisasi & Pemberdayaan Daerah



**Wahyu Handoko**  
Dept. Head



**Solikhun**  
Staf

## Departemen Hukum & Advokasi



**Sri Winarni**  
Staf



**Adrinaldi**  
Staf

# STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPN APINDO



**Sherly Susilo**  
Staf



**Diana.M Savitri**  
Dept. Head

## Departemen Hubungan International



**Tuti Suharti**  
Staf



**Chandra KP**  
Staf



**Kanti Widiarti**  
Dept. Head

## Departemen Usaha Kecil Menengah



**Rina Yuniawati**  
Staf



**Artiah Fitry**  
Staf



**Chris S. Suhendra**  
Dept. Head

## Departemen Keuangan dan Pembukuan



**Septiyan Listiya ER**  
Communication Specialist



**Riyan Hidayat**  
Staf



**Jefri Butarbutar**  
Dept. Head

## Unit Kajian



**Nuning Rahayu**  
Staf



**Maya Safira**  
Project Manager

## Project Uni Eropa



**Denis Hardian**  
Staf

## Unit IT

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **NAD**

Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman, SE  
Jl. Tengku Daud Beureuh No. 170 E,  
Lampriet - Banda Aceh (23126)  
T. 0651-227 36 / 21614  
F. 0651-227 36 / 635554  
E-mail: nad@apindo.or.id  
wisataindomatha@gmail.com  
smdahlan@yahoo.co.id

## **Sumatera Utara**

Ketua : Parliindungan Purba, SH, MM  
Jl. Sungai Deli No. 21 Medan (20114)  
T. 061-773 980 21/457 5651/414 4657  
F. 061-457 5651  
E-mail: apindosu@yahoo.co.id

## **Riau**

Ketua : Helfried Sitompul  
Hotel Premiere Lt. 3 Ruang Mulia 9  
Jl. Jend. Sudirman No.389 Pekanbaru  
T. 0761-7891818  
F. 0761-7891818  
E-mail: apindo\_riau@yahoo.com  
riau@apindo.or.id

## **Kepulauan Riau**

Ketua : Ir. Cahya  
Kompleks Citra Indah Blok A3 No. 1 - 2  
Batam Centre, Batam (29432)  
T. 0778 - 469 955  
F. 0778 - 467366  
E-mail : apindo.kepri\_santi@yahoo.co.id

## **Sumatera Barat**

Ketua : Muzakir Aziz Akin  
Jl. Ombilin No. 2 Rimbo Kaluang,  
Padang (25115)  
T. 0751 - 443390  
F. 0751 41584  
E-mail : sekretariat@apindo-sumbar.or.id;  
akins@apindo-sumbar.or.id,  
akinse@rocketmail.com;  
sumbar@apindo.or.id

## **Jambi**

Ketua : Junus Abdullah  
Jl. Raden Wijaya No. 92 Jambi (63137)  
T. 0741 - 420 38  
F. 0741 - 420 38  
E-mail : jambi@apindo.or.id,

## **Bengkulu**

Ketua : M. Basri Muhammad  
Jl. Merapi No. 116 Kebun Tebeng, Bengkulu  
T. 0736 - 284 05  
F. 0736 - 284 05  
HP. : 0811 737 281  
E-mail : apindobengkulu@yahoo.co.id

## **Sumatera Selatan**

Ketua : Sumarjono Saragih  
Jl. Brigjend Hasan Kasim  
Komplek Jaya Raya Garden No. C-3  
Palembang, Sumsel (30116)  
T. 0711-813154  
F. 0711- 813154  
E-mail : sumsel@apindo.or.id

## **Bangka Belitung**

Ketua : WFM Nasution  
Jl. Air Selan No. 232 Gabek I Pangkal  
Pinang (33118)  
T. 0717-421 793  
F. 0717-425 6635 / 422 007  
E-mail : wanfahreza@yahoo.co.id

## **Lampung**

Ketua : Yusuf Kohar  
Jl. Gajah Mada No. 17B  
Bandar Lampung (35241)  
T. 0721-258 614  
F. 0721-261 327  
E-mail : lampung@apindo.or.id;  
mykohar@gmail.com

## **Banten**

Ketua : Deddy Djunaedi  
Jl. Yusuf Martadilaga No. 59 Kel. Cipare  
Kec. Serang, Banten 42117  
Telp. : 0254 - 914 4849  
Facs. : 0254 - 212 741  
E-mail : banten@apindo.or.id  
dppapindobanten@yahoo.com

## **DKI Jakarta**

Ketua : Drs. Soeprayitno. MBA; MSc, Ph.D  
Graha Mampang L6  
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100  
Jakarta (12760)  
T. 021-797 0323/770 365  
F. 021-797 0018  
E-mail : apindodki@gmail.com

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **Jawa Barat**

Ketua : Deddy Widjaya  
Putraco Gading Regenci  
Jl. Gading Utama Blok K - 3  
Soekarno - Hatta Bandung (40292)  
T. 022-730 3029  
F. 022-732 3131  
E-mail : apindo.jabar@yahoo.co.id

## **Jawa Tengah**

Ketua : Frans Kongi  
Ruko Semarang Indah Blok E II No. 28  
Jl. Madukoro Raya, Semarang (501444)  
T. 024 - 766 32990  
F. 024 - 766 32989  
E-mail : jawatengah@apindo.or.id

## **DI Yogyakarta**

Ketua : Buntoro  
Gedung Mega Andalan Kalasan (MAK)  
Jl. Tanjung Tirto No.34-36  
Yogyakarta (55571)  
T. 0274-496393, 497068  
F. 0274-496226  
E-mail : apindodiy@yahoo.co.id

## **Jawa Timur**

Ketua : Alim Markus  
Jl. Citandui 22 Surabaya (60264)  
T. 031-561 4865, 5677918  
F. 031-561 5436  
E-mail : apindo\_jtm@yahoo.co.id

## **Bali**

Ketua : Drs. Panudiana Kuhn, MM  
Jl. Menuh No. 1 Denpasar (80235)  
T. 0361-263 243/751 816  
F. 0361-263 243/756 647  
E-mail : apindobali\_dpp@yahoo.co.id;  
panudiana.kuhn@gmail.com

## **NTB**

Ketua : Ni Ketut Wolini  
Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama Mataram  
T. 0370-634 680 (Komang)  
F. 0370-634 680  
E-mail : ntb@apindo.or.id  
mekarswamitra@yahoo.co.id

## **NTT**

Ketua : Freddy Ongko  
Jl. Timor Raya No. 122 Km.5  
Oesapa, Kupang NTT (85111)  
T. 0380 - 828 813  
F. 0380 - 831 718  
E-mail : nttppapindo@yahoo.co.id

## **Kalimantan Barat**

Ketua : Maman Surachman  
PT. Erna Djulianti  
Jl. Adi Sucipto Km. 5 Pontianak  
Kalimantan Barat (78124)  
T. 0561-739 777 (Atika)  
F. 0561-739 828  
E-mail : irm@timber.lyman.co.id

## **Kalimantan Tengah**

Ketua : Hernica Rasan  
Gedung Batang Garing L3 Kav. 307  
Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya (73112)  
T. 0536-324 2218  
F. 0536-324 2217  
E-mail : apindo\_kalteng@yahoo.com

## **Kalimantan Timur**

Ketua : M. Slamet Brotosiswojo  
Ruko Puri Blok B No. 10 Kompleks Balikpapan Baru  
Balikpapan (76114)  
T. 0542-7212466  
F. 0542-7212488  
E-mail : apindokaltim@yahoo.com

## **Kalimantan Selatan**

Ketua : Supriadi DR, Spd, MM  
Komplek Ruko 53 Kav. 6,  
Jl. Lingkar Dalam Banjarmasin  
T. 0511-4315592  
F. 0511-4315592  
E-mail : ymsri@dayasakti.co.id  
kalsel@apindo.or.id  
apindo.kalsel@yahoo.com

## **Sulawesi Utara**

Ketua : Andre Angoy  
Jl. Sarapung No. 3 - 5 Manado (95111)  
T. 0431-846457, 0431-51560  
F. 0431-866889  
E-mail : petertappy@yahoo.co.id

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **Gorontalo**

Ketua : H. Suharto Puluhulawa  
Jl. Kenangan No. 156 Dulalowo  
Kec. Kota Tengah, Gorontalo (96115)  
T. 0435-824431/826859  
F. 0435-826859  
E-mail : harto\_06@yahoo.co.id

## **Sulawesi Barat**

Ketua : Dirga Adhiputra Singkaru  
Jl. Ahmad Kirang No.6  
Mamuju, Sulawesi Barat  
T. 081219997923  
F. -  
E-mail : ifz1988@yahoo.com

## **Sulawesi Tengah**

Ketua : Arthur Pangemanan  
Jl. Sapta Marga II/2 Palu  
T. 0451-487 301  
F. 0451-456 556  
E-mail : moniqueikha@gmail.com  
pantau\_lwk@yahoo.com

## **Sulawesi Selatan**

Ketua : Drs. La Tunreng  
Jl. Jend. A. Yani No. 23 Makassar  
T. 0411-324 944 / 437 059  
F. 0411-324 944 / 466 3606  
E-mail : baktipersada\_latu@yahoo.com

## **Sulawesi Tenggara**

Ketua : Gunawan Yiedri, SE. MM  
Jl. Malik Raya No. 33 A Kendari,  
Sulawesi Tenggara (93111)  
T. 0401 - 3125178,  
F. 0401 - 3125697  
E-mail : apindodppsultra@yahoo.com

## **Maluku Utara**

Ketua : Christopher Herliem, SH  
Jl. Dr. Chasan Boesoerie No. 40 Ternate  
Maluku Utara (97721)  
T. 0921-326 231  
F. 0921-326 231  
E-mail : Apindomu@gmail.com;  
chrisherliem@yahoo.com;  
c.herliem56@gmail.com

## **Maluku**

Ketua : Hellen Sarita de Lima  
Hellen S. Koesnadi, SH & Part  
Jl. Cendrawasih Gg. Vina SK 3/2 No. 7  
Ambon (97123)  
T. 0911-341 257  
F. 0911-354 952  
E-mail : hellen\_ambon@yahoo.com

## **Papua**

Ketua : Drs. Simon P. Morin  
Jl. Raya Abepantai No. 30 Kel. Awiyo, Abepura,  
Jayapura (99351)  
T. 0967-582 459  
F. 0967-582 459  
E-mail : apindopapua@yahoo.com  
papua@apindo.or.id

## **Papua Barat**

Ketua : James Taroreh  
Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari  
Papua Barat (98311)  
T. (0986) 211723  
F. (0986) 215281  
E-mail : papuabaratar@apindo.or.id;  
jamestaroreh@yahoo.com

5.000+

ATLET BULUTANGKIS TELAH  
DIBINA SEJAK TAHUN 1969.



9 ATLET  
PB DJARUM  
MEMPERSEMBAHKAN  
MEDALI OLIMPIADE  
UNTUK INDONESIA.



BANYAK MENJARAI OLIMPIADE, BWF WORLD  
CHAMPIONSHIPS, ALL ENGLAND, THOMAS  
DAN UBER CUP, SUDIRMAN CUP.

**DJARUM  
BEASISWA  
BULUTANGKIS**



17.000+  
ORANG

MENDAPATKAN BANTUAN AIR  
BERSIH DARI SUMUR RESAPAN  
DAN PENAMPINGAN AIR HUJAN.

**DJARUM  
SUMBANGSIH  
SOSIAL**



1.482

ORANG  
TELAH MENDAPATKAN  
OPERASI KATARAK GRATIS  
SEJAK 2012.



**DJARUM  
FOUNDATION**  
"MARI WUJUDKAN  
INDONESIA DIGDAYA!"

**DJARUM  
TREES FOR LIFE**

1.350 KM

JALUR PANTURA JAWA  
DARI MERAK-BANMUWANGI  
DITANAMI POHON TREMBESI  
YANG MAMPU MENERAP

1.000.000  
TON CO<sub>2</sub>  
SETIAP TAHUNNYA.

**DJARUM  
APRESIASI  
BUDAYA**

MENDUKUNG  
1.500+

KEGIATAN BUDAYA MELALUI  
PROGRAM DJARUM APRESIASI  
BUDAYA SEJAK TAHUN 1992.



GALERI INDONESIA KAYA  
DIDIRIKAN PADA TAHUN 2013  
SEBAGAI RUANG EDUTAINMENT  
BUDAYA BERBASIS MULTIMEDIA  
PERTAMA DI INDONESIA YANG  
GRATIS UNTUK UMUM.



8.808

MAHASISWA TELAH  
MENERIMA BEASISWA  
PRESTASI DAN  
PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN



DI 110

PERGURUAN TINGGI  
UNGGULAN DI INDONESIA.

16

SEKOLAH MENENGAH KEURIAN  
(SMK) DI KABUPATEN KUDUS, JAWA  
TENGAH TELAH DIKEMBANGKAN  
MELALUI PROGRAM KEURIAN UNGGULAN.

[www.djarumfoundation.org](http://www.djarumfoundation.org)

**DJARUM foundation**

Bakti Pada Negeri

Sosial • Olahraga • Lingkungan • Pendidikan • Budaya



# Laporan Tahunan 2014

APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia



**Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)**

Gedung Permata Kuningan Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980 - Indonesia

Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746

Email : sekretariat@apindo.or.id - Website : www.apindo.or.id

## Bersama, Peduli dan Berbagi



Berbagi adalah bentuk kepedulian nyata bagi sesama. Kami mewujudkannya melalui sejumlah kegiatan bazaar minyak goreng murah bagi masyarakat, yang telah dimulai sejak tahun 2005, dan telah tersalurkan hampir 30 juta liter minyak goreng.

# Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah





## Pendahuluan

Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) khususnya Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah menyelenggarakan sejumlah kegiatan baik terpusat secara nasional maupun di sejumlah daerah selama tahun 2014. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk penguatan kapasitas organisasi berikut sumber

daya para pengelolanya melalui kegiatan lokakarya / seminar baik yang dilakukan tersendiri, maupun sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian seperti Musyawarah Provinsi (Musprov). Kegiatan lainnya seperti Business Gathering di Provinsi diselenggarakan sebagai dialog tentang permasalahan aktual dunia usaha serta penyampaian informasi organisasi.

## Kegiatan

### 1. Rapat Kerja Dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas)



Rakerkonas APINDO tahun 2014 merupakan kegiatan APINDO skala Nasional dengan tema “Mewujudkan Indonesia Bersih Untuk Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Menuju Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 2015” APINDO diharapkan tetap konsisten berjuang bersama, tidak sekadar mewujudkan visi dan misi APINDO, tetapi bersama para pemangku kepentingan lainnya bersungguh-sungguh mewujudkan kepentingan bersama guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Menginjak usia yang ke - 62, APINDO terus mensosialisasikan paradigma baru, dimana APINDO tidak hanya mengurus masalah



ketenagakerjaan saja namun mencakup lebih luas sektor perekonomian baik skala nasional maupun internasional. Oleh karenanya, Rakerkonas APINDO ke - 25 menjadi momentum untuk menyusun atau menggalang kekuatan baik internal maupun eksternal organisasi.



### KESIMPULAN HASIL RAKERKONAS

Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional memutuskan perlu adanya ketentuan-ketentuan APINDO, sebagai berikut :

#### KOMISI I : Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah

1. DPN APINDO agar membentuk tim khusus yang terdiri dari personil DPN APINDO yang terpilih yang bertugas ke daerah-daerah untuk menampung aspirasi dari daerah-daerah dan merupakan persiapan calon pengganti Ketua Umum apabila sewaktu waktu Ketua Umum berhalangan tetap dalam rangka penugasan baru yang lebih penting.
2. a. DPN APINDO  
Agar seluruh kepengurusan DPN APINDO menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) berdasarkan peraturan AD/ART, MUNAS, RAKERKONAS dan Peraturan Organisasi lainnya.
- b. Anggota Luar Biasa  
DPN APINDO diharapkan untuk mendorong manajemen perusahaan Anggota Luar Biasa di DPN APINDO untuk menjadi anggota APINDO di daerah.
- c. DPN APINDO perlu meningkatkan *Capacity Building* dengan memberikan kesempatan kepada daerah melalui: pengiriman pengurus dalam kegiatan di luar negeri, penyelenggaraan *business gathering*, dan kemitraan pengusaha nasional dan daerah melalui *networking*.
3. Optimalisasi kesekretariatan Nasional yang mencakup sistem:
  - a. Database keanggotaan perusahaan
  - b. Database DP Provinsi /DP Kab./Kota
  - c. Sistem Kesekretariatan dan layanan anggota diserahkan sepenuhnya kepada DPN APINDO

4. Penetapan Penyelenggaraan Rakerkonas 2015

#### 5. Payung Hukum APINDO

Pada prinsipnya APINDO tetap bersinergi dengan KADIN namun untuk kepentingan APINDO yang mandiri dan independen utamanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan ketenagakerjaan serta hubungan industrial segera diusahakan terbitnya peraturan perundangan secara khusus yang mengatur kemandirian APINDO dalam menjalankan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut maka dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur DPN APINDO yaitu Hariyadi B. Sukamdani, Suryadi Sasmita, dan Anthony Hilman; serta unsur DPP APINDO yaitu: HM. Dahlan Sulaiman (NAD), Slamet Brotosiswoyo (Kalimantan Timur), Soeprayitno (DKI Jakarta), Hellen S. de Lima (Maluku), Adi Laksono (Kalimantan Selatan), La Tunreng (Sulawesi Selatan) dan Yusuf Kohar (Lampung).

#### KOMISI II : Bidang Program Kerja

Dengan rekomendasi sebagai berikut :

1. DPN APINDO memfasilitasi Rapat Koordinasi Khusus tentang Pengupahan guna membahas:
  - a) Komponen KHL,
  - b) Pihak yang berwenang menetapkan UMP/UMK, dan
  - c) Jangka waktu penetapan UMP/UMK, dan lain-lain.
2. Mengupayakan penambahan Hakim Ad Hoc disetiap daerah yang membutuhkan
3. Member Gathering agar dilakukan secara reguler di DPN APINDO hingga di DPP APINDO, dan Penguatan Sistem Informasi Management untuk distribusi informasi DPP/DPK APINDO
4. Sosialisasi dan/atau training peningkatan pemahaman UU 13/2003 tentang 'Ketenagakerjaan' dan yang terkait dengan



Ketenagakerjaan/Hubungan Industrial di tingkat perusahaan dengan melibatkan instansi teknis dan APINDO

5. Membentuk tim khusus/satuan kerja untuk merumuskan formulasi Hubungan Industrial yang efektif, harmonis dan berkeadilan

### KOMISI III : Bidang Rekomendasi

Melalui Rekerkornas APINDO ke-25 di Makassar, peserta Rakerkonas memandang perlu untuk memberikan rekomendasi kepada DPN APINDO dan pihak-pihak terkait atas hal-hal berikut :

1. *Roadmap* pemerintahan yang baru sesuai dengan visi misi APINDO masa depan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi sebesar 8 - 10% dan iklim bisnis yang berdaya saing dalam 10 tahun ke depan dengan menitik beratkan kepada :
  - a. Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban serta suasana kehidupan politik yang dinamis;
  - b. Mekanisme Birokrasi pengurusan usaha menjadi lebih efektif dan efisien di tingkat nasional maupun daerah;
  - c. Adanya upaya yang strategis terhadap spirit *Clean Governance* di semua lini pemerintahan baik pusat maupun daerah;
  - d. Prioritas pengembangan kompetensi atas usaha mikro, kecil dan menengah dalam perluasan usaha dan kemitraan investasi;
  - e. Penting adanya percepatan terhadap Investasi yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam pengurusan, administrasi dan perijinan di setiap sektor (adanya jalur khusus yang menjadi *concern* investasi bersama dengan memperhatikan: kecepatan, ketepatan dan murah).
2. Menekankan terhadap program-program yang melihat sisi *opportunity* dan *challenges*

pengusaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015:

- a. Perlunya kebijakan yang menekankan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di tingkat pusat dan daerah agar kepastian biaya, transparan dan akuntabel terwujud;
- b. Terciptanya koordinasi yang terintegrasi antar instansi di tingkat pengambil keputusan akan setiap kebijakan publik dapat dilaksanakan dalam tataran praktis;
- c. Memberikan peluang kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah secara proporsional yang berdampak kepada peningkatan investasi atas usaha-usaha domestik yang berkelanjutan.

3. Peluang dan tantangan pengusaha dalam menghadapi Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik, yang menekankan kepada :
  - a. Perlunya perhatian terhadap regulasi yang membuka peluang usaha yang berbasis keseimbangan dalam ekspor dan impor nasional;
  - b. Adanya sistem yang adil, fair dan objektif dalam penentuan pengadaan barang dan melakukan proteksi kepada usaha mikro, kecil dan menengah dengan mempertimbangkan pertumbuhan usaha-usaha kecil dan menengah serta mempertimbangkan upaya pemberdayaan dan pembinaan;
  - c. Sinergi usaha mikro, kecil dan menengah dengan korporasi multinasional yang berdampak kepada *Value Chain* usaha usaha unggulan di tingkat nasional.





4. Pemerintah memandang perlu APINDO sebagai mitra strategis, baik di pusat, propinsi dan daerah khususnya dalam memahami:
  - a) Perluasan Investasi,
  - b) Perluasan Lapangan kerja,
  - c) Peningkatan kompetensi dan produktivitas,
  - d) Penurunan Angka kemiskinan
5. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu untuk menekankan sebuah sistem yang terintegrasi baik di tingkat nasional (DPN), Provinsi (DPP) dan Kabupaten/Kota (DPK) dengan menitik beratkan kepada :
  - a. Kesiapan Sumber Daya Manusia yang produktif, Kompeten dan profesional.
  - b. Adanya upaya yang optimal dalam membangun hubungan industrial yang menekankan kepada iklim usaha yang kondusif.
  - c. Perhatian Pemerintah yang baik terhadap pembiayaan nasional berpihak kepada usaha-usaha unggulan dan regulasi yang berpihak kepada proteksi usaha usaha domestik (*financial inclusion*).



## 2. Business Gathering

Business Gathering adalah ajang pertemuan bisnis yang diselenggarakan oleh DPN / DPP APINDO dengan bantuan pembiayaan dari mitra kerjasama DPN APINDO. Pertemuan di kalangan pebisnis ini bertujuan memberikan informasi terkait potensi investasi yang ada di daerah maupun informasi makro terkait perekonomian nasional yang dikaitkan dengan

kebijakan pemerintah pusat maupun daerah seperti peluang bisnis dan investasi baik asing maupun domestik. Acara Business Gathering dihadiri oleh Anggota Luar Biasa / Anggota Biasa APINDO, Pejabat Pemerintahan setempat serta Pengurus/Anggota Asosiasi Sektor tertentu yang menonjol di daerah tersebut. Pada tahun 2014 Business Gathering diselenggarakan di enam Provinsi.

### 2.1. Business Gathering DPP APINDO Banten

DPP APINDO Banten melaksanakan Business Gathering pada tanggal 29 Januari 2014 di Padang Golf dengan tema Kesiapan Dunia Usaha (APINDO) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta.



Narasumber pada Business Gathering ini adalah:

- Mr. Bjorn Delbaek, sambutan sekaligus penjelasan Organisasi Pengusaha dari Norwegia
- Bapak Bernadino M Vega, Ketua Asia, Pasifik, Afrika Hub. International DPN APINDO
- Departemen Perdagangan

Diharapkan dari pertemuan ini adalah konsolidasi dan koordinasi khususnya Pengurus dan anggota serta dunia usaha di Banten untuk menyambut dan menyiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada 2015.

Dalam forum tersebut DPP APINDO Banten juga mengharapkan Pemerintah Daerah selalu cepat dan tanggap bersama-sama dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar Indonesia tidak hanya jadi obyek pemasaran produk-produk Luar Negeri terutama dari kawasan ASEAN.



### 2.2. Business Gathering DPP APINDO Maluku

DPP APINDO Maluku melaksanakan *Business Gathering* dengan tema "*Mewujudkan Kemitraan Demi Terciptanya Iklim Investasi yang baik dan kondusif di Maluku*" dan dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta.



Narasumber pada Business Gathering ini antara lain :

- Bapak Ilham Tauda yang menjelaskan peluang investasi di Maluku serta mencari solusi terkait kendala / hambatan investasi.
- Mr. Bjorn Delbaek yang menyampaikan *sharing* pengalaman mengenai pengelolaan organisasi pengusaha di Norwegia.
- Bapak Syamsul Munir yang menjelaskan tentang Organisasi APINDO dan upaya APINDO Daerah dalam menghadapi tantangan serta peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Diharapkan dari pertemuan ini adalah konsolidasi dan koordinasi khususnya Pengurus dan anggota serta dunia usaha di Maluku untuk meningkatkan iklim investasi dan terutama untuk pelaku usaha menengah dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku pada akhir tahun 2015.

Maluku memiliki potensi dalam pengembangan investasi dengan isu strategis antara lain:

- 1) sebagai lumbung ikan nasional,
- 2) sebagai Provinsi rempah-rempah,
- 3) Pengembangan Pariwisata Bahari,
- 4) Pengembangan Pertambangan & Energi, dan
- 5) Area implementasi MP3EI 2011 - 2025.

Oleh karena itu diperlukan sinergi antara

Dunia Usaha, Pemerintah, Serikat Pekerja dan para pemangku kepentingan. Internal APINDO Maluku harus semakin kuat oleh karenanya para pengusaha baik dari kelompok usaha yang sudah mapan (atas) maupun menengah (UKM) perlu bergabung dan membangun soliditas untuk menyuarakan kepentingan dunia usaha khususnya dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

DPP APINDO Maluku mengharapkan Pemerintah untuk senantiasa mengajak DPP APINDO dalam berbagai perundingan baik masalah ketenagakerjaan maupun berbagai kebijakan yang menyangkut masalah investasi, perdagangan, pariwisata dan perekonomian lainnya.

### 2.3. Business Gathering DPP APINDO Jambi

DPP APINDO Jambi menggelar Business Gathering pada tanggal 9 Oktober 2014 dengan mengusung tema "*Hubungan Industrial Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan sebagai Daya Tarik Investasi*", acara ini dihadiri kurang lebih 70 pengusaha dari berbagai sektor serta pengurus DPP/DPK APINDO se-Jambi. Turut hadir pula Ketua DPP APINDO Bapak Yunus Abdullah, Bapak Murniansyah Madjid, Pengurus Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO dan Bapak Tagor Muko mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.



Business Gathering ini membahas:

- Hambatan / berbagai kendala dunia usaha di Jambi



## Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah

- Konsolidasi internal APINDO dan peningkatan kinerja organisasi dalam rangka pemberdayaan Daerah
- Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten Kota dalam rangka pengembangan potensi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain

### 2.4. Business Gathering DPP APINDO Kepulauan Riau

Business Gathering yang digelar DPP APINDO Kepulauan Riau mengangkat tema “Kesiapan Dunia Usaha menuju Asean Economic Community 2013”, Business Gathering kali ini menghadirkan narasumber utama Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi yang dihadiri kurang lebih 1.000 pengusaha di Kepulauan Riau.

Melalui Business Gathering ini diharapkan semua unsur dunia usaha baik yang bergabung di APINDO dan Asosiasi sektoral lainnya di Kepulauan Riau selalu bersinergi mewujudkan hubungan industrial yang baik, kondusif, dinamis dan berkeadilan dan menjaga meningkatkan serta meningkatkan investasi di Kepulauan Riau.



### 2.5. Business Gathering DPP APINDO Sulawesi Tengah

Business Gathering yang digelar DPP APINDO Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 22 November 2014 dengan peserta kurang lebih 80 orang mengangkat tema “Bangun Daya Saing Sulawesi Tengah Dengan Wawasan Hubungan Industri Pancasila”. Business Gathering menghadirkan narasumber Bapak Anthony Hilman SH, MBA yang mengajak semua unsur pengusaha di Sulawesi Tengah untuk membangun daya saing

dan selalu bersinergi dengan para pemangku kepentingan perekonomian di Sulawesi Tengah menuju kesejahteraan umum yang lebih baik.



### 2.6. Business Gathering DPP APINDO Bali

Business Gathering yang digelar DPP APINDO Bali dengan peserta kurang lebih 100 orang mengangkat tema “Membangun Hubungan Industrial Yang Harmonis di Bali Dalam Memacu Pertumbuhan Investasi Menjelang Pasar Bebas ASEAN 2015”.





Business Gathering didahului pemaparan Mr Bjorn Delbaeck tentang Organisasi Dunia Usaha di Norwegia dan menghadirkan narasumber Bapak Anthony Hilman SH, MBA yang mengajak semua unsur pengusaha di Bali untuk membangun daya saing usaha dan selalu bersinergi dengan para pemangku kepentingan perekonomian di Bali serta meningkatkan ketrampilan beracara di pengadilan hubungan industrial.



### 3. Musyawarah Provinsi (MUSPROV)

Pada tahun 2014, Musyawarah Provinsi (MUSPROV) APINDO diselenggarakan di:

#### 3.1. DPP APINDO Banten

Musyawarah Provinsi APINDO Banten yang dihadiri oleh seluruh DPK APINDO se - Banten dan secara aklamasi memilih kembali Bapak Deddy Djunaedi sebagai Ketua DPP APINDO Banten masa bakti tahun 2014 - 2019.



#### 3.2. DPP APINDO Maluku

DPP APINDO Maluku melaksanakan Musyawarah Provinsi pada tanggal 6 September 2014. Acara ini dihadiri lebih dari 50 peserta dari unsur pengurus DPP/DPK APINDO se-Maluku serta dihadiri oleh narasumber dari DPN APINDO Bapak Syamsul Munir.

MUSPROV ini, selain menghasilkan tersusunnya kepengurusan yang baru, juga menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya intensitas komunikasi dan konsolidasi organisasi, komunikasi dan koordinasi asosiasi lintas sektor, pelayanan optimal terhadap anggota dan turut serta mengawal daya saing usaha khususnya di Maluku.

Terpilih sebagai Ketua DPP APINDO Maluku masa bakti tahun 2014 - 2019 adalah Ibu Hellen Sarita de Lima dan Ketua Dewan Pertimbangan oleh Bapak Dr. Riswanto.

#### 3.3. DPP APINDO Kepulauan Riau

DPP APINDO Kepulauan Riau melaksanakan Musyawarah Provinsi pada tanggal 1 Oktober 2014 yang dihadiri unsur pengurus DPN APINDO DPP/DPK APINDO se - Kepulauan Riau.





## Bidang Organisasi & Pemberdayaan Daerah

MUSPROV kali ini membahas Laporan Pertanggung-Jawaban, menghasilkan tersusunnya kepengurusan baru dan beberapa rekomendasi diantaranya intensitas komunikasi dan konsolidasi organisasi, komunikasi dan koordinasi asosiasi lintas sektor, pelayanan optimal terhadap anggota, termasuk turut serta mengawal daya saing usaha khususnya di Kepulauan Riau.

Terpilih kembali sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Riau masa bakti tahun 2014 - 2019 adalah Bapak Ir. Cahya.

### 3.4. DPP APINDO Jambi

DPP APINDO Jambi melaksanakan Musyawarah Provinsi pada tanggal 7 Oktober 2014. Acara ini dihadiri unsur pengurus DPN APINDO DPP/DPK Apindo se-Jambi dan dihadiri pula narasumber Bapak Murniansyah Madjid selaku Pengurus Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO.



Berbagai rekomendasi muncul dalam MUSPROV, terutama untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan konsolidasi dengan organisasi, koordinasi asosiasi lintas sektor, pelayanan

optimal terhadap anggota, serta mengawal daya saing usaha khususnya di Jambi. MUSPROV ini juga memilih kembali Bapak Yunus Abdullah sebagai Ketua DPP APINDO Jambi masa bakti tahun 2014 - 2019.

### 4. Membangun Aliansi Melawan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Dalam panduan pengusaha bersih, Ketua Umum DPN APINDO Bapak Sofjan Wanandi menyatakan bahwa APINDO harus berperan selaku edukator untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang sistem *e-procurement* ini kepada para pengusaha ketika mereka masuk dalam praktek pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa publik merupakan sumber dari 70% kasus korupsi yang ditangani KPK. Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri RI, hingga bulan Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 542 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi yang sebagian besar diantaranya sudah ditahan. *Partnership* mencatat bahwa kultur politik yang transaksional, rendahnya integritas penyelenggara pemerintah, dibarengi lemahnya regulasi pengadaan publik menjadikan jumlah kasus korupsi makin meningkat.

Rendahnya integritas penyelenggara pemerintah mengakibatkan praktek korupsi dan suap masih tinggi. Laporan *Global Corruption Barometer (GCB)* tahun 2013 menyebutkan satu dari tiga orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik di Indonesia masih melakukan praktek suap dengan berbagai alasan.





Survei Persepsi Integritas Pengadaan Barang/Jasa oleh Kemitraan dan APINDO, menyebutkan bahwa score integritas pengadaan masih rendah yakni 3,6 dari 5. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan yang tidak dikelola secara profesional dan terlalu banyak campur tangan dari pihak penyelenggara terhadap panitia pengadaan agar prosedur tidak dipatuhi. Pengadaan barang/jasa publik di Indonesia diharapkan memenuhi standar kepatuhan (*standard of compliance*) dengan menginternalisasikan prinsip-prinsip anti korupsi dan integritas dari konvensi internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Serangkaian upaya yang telah dilakukan pemerintah diantaranya dengan adanya penataan regulasi yang dibuat untuk menjadi payung hukum dan mengawal proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan mudah diawasi, a.l. dengan terbitnya UU No. 31/1999 jo. 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perpres No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 7/2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan. Selain itu Pengadaan Barang/Jasa juga diterapkan melalui sistem elektronik (*e-procurement*) agar kebutuhan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah di ketahui

dan diumumkan kepada masyarakat secara luas, baik dalam proses pelelangan, proses pengajuan penawaran serta proses penilaian.

Melihat dari kesenjangan permasalahan yang ada, *Partnership* bersama LKPP, LPSE, DPN APINDO dan lembaga masyarakat sipil telah menyusun RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang menginternalisasi prinsip integritas dan anti korupsi sesuai Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk mereduksi persoalan integritas dalam pengadaan barang/jasa publik, maka diperlukan aturan hukum yang lebih tegas, sehingga aktor pengadaan akan terbiasa untuk melakukan praktek yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menciderai integritas. Untuk itu UU Pengadaan Barang/Jasa menjadi salah satu prasyarat yang harus diwujudkan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Prinsip Pengadaan Bersih barang/jasa publik yang efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil dan akuntabel sejalan dengan prinsip integritas dan antikorupsi, KPK dengan seluruh jajarannya mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik dengan prinsip-prinsip tersebut sejauh memenuhi persyaratan legal, etik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Dalam rangka mendorong komitmen bersama antar para pemangku kepentingan pengadaan barang/jasa publik dan mendorong penguatan kesadaran publik untuk reformasi pengadaan, *Partnership* menyelenggarakan Konferensi Nasional dengan tema "*Membangun Aksi Kolaboratif untuk Sistem Integritas dan Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Publik*" pada tanggal 4 Desember di Jakarta. Aksi kolaboratif para pemangku kepentingan ini adalah kunci untuk mewujudkan integritas proses pengadaan barang/jasa publik di Indonesia.

Melalui Konferensi Nasional ini, ingin mengajak semua pemangku kepentingan dan penyelenggara pemerintahan untuk berkomitmen bersama mendorong pengarusutamaan prinsip integritas dan anti korupsi dalam praktek pengadaan barang/jasa publik. Pendekatan melalui *collaborative action* dengan mendorong para pemangku kepentingan dari dunia politik, bisnis, dan masyarakat sipil untuk



bertindak secara kolektif dan membentuk aliansi untuk membangun integritas pengadaan barang/jasa pemerintah.

Diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa itu nantinya, disertai dengan komitmen dan gerakan bersama dari semua komponen terkait, masyarakat bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil maka pengadaan yang bersih dan berintegritas dapat diwujudkan untuk mencapai masyarakat yang adil, demokratis dan sejahtera.

### 5. Survei Daya Saing Usaha

Survei Daya Saing Usaha kerjasama antara DPN APINDO dengan *Asean Competitiveness Institut (ACI)* Singapore ini kembali dilaksanakan di 33 Provinsi yang bertujuan :

1. Pengusaha dapat mengerti / memahami penjelasan hasil survei daya saing usaha pada tahun-tahun sebelumnya menyangkut peta kemampuan daya saing seperti: Stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintahan dan institusi, kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja, kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.
2. Pengusaha yang hadir sebagai peserta juga dapat mengerti / memahami penjelasan dari ACI menyangkut SWOT Analysis: *Strength* (Kekuatan / Keunggulan), *Weakness* (Ke-

lemahan), *Opportunity* (Peluang) dan *Threat* (Ancaman) untuk kemudian dapat mengambil sikap dalam penentuan kebijakan perusahaan maupun publik di masa-masa yang akan datang.

3. Diperolehnya masukan / data dari peserta/ responden untuk Suvei Daya Saing Usaha tahun 2014.



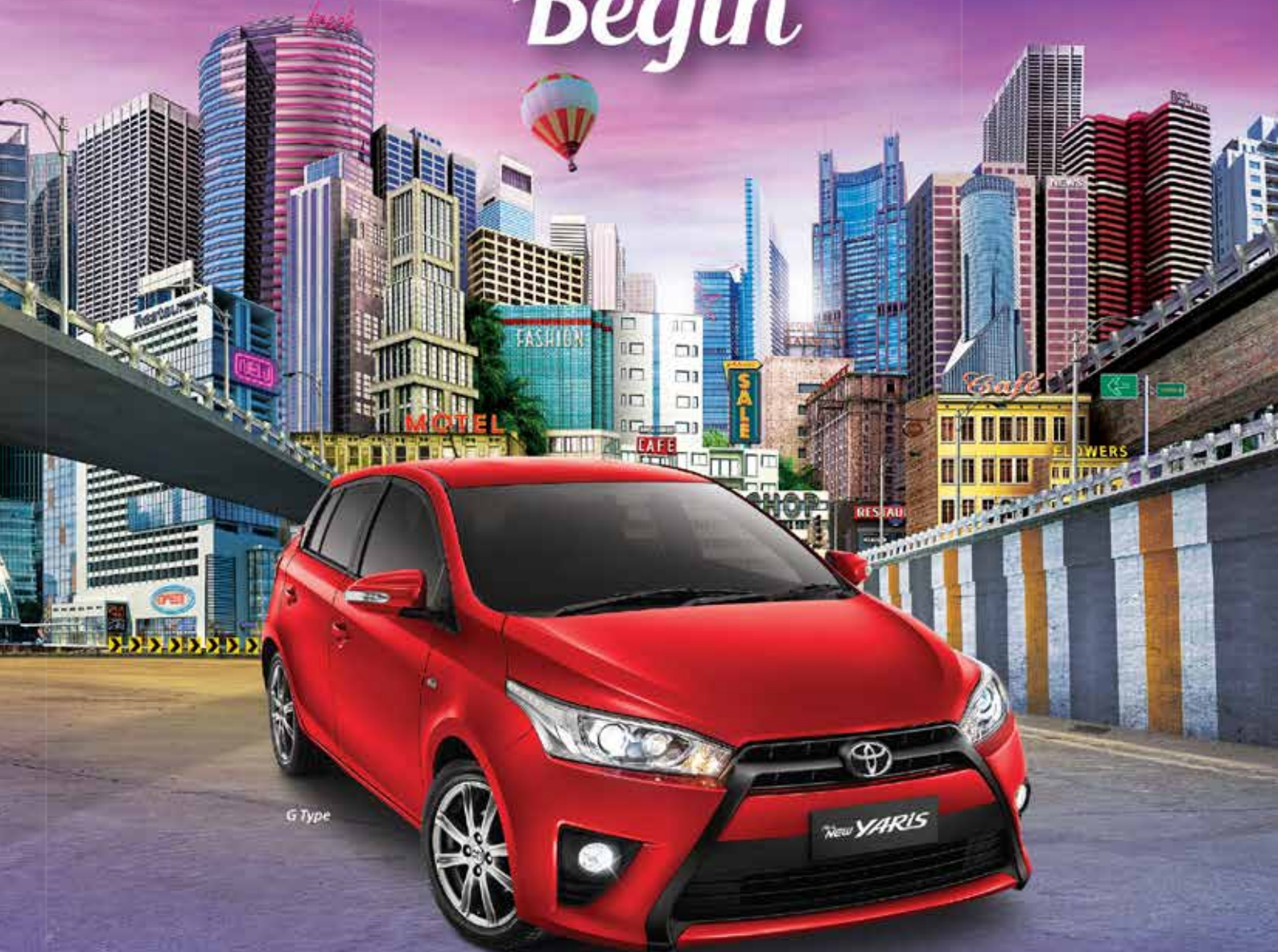
## Harapan

Tahun 2014 telah dilalui dengan cukup baik berkat kerjasama semua pihak baik internal maupun eksternal APINDO. Pada tahun 2015 terus mampu menjalin kerjasama antara DPN, DPP, dan DPK untuk pencapaian visi, misi dan tujuan APINDO. Secara khusus, APINDO diharapkan mampu mengembangkan daerah-daerah dengan penambahan jumlah

keanggotaan maupun perluasan cakupan daerah, khususnya di tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai organisasi modern yang berbasis keanggotaan aktif, APINDO harus mampu mengelola data-base keorganisasian secara baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. kota untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ke para anggotanya.

# ALL NEW YARIS

## Let the Fun Begin



G Type



TRD Sportivo Type

### Advanced Information & Entertainment System



Toyota Move  
(G & TRD Sportivo Type)



Toyota Navigation  
(TRD Sportivo Type)



Touch Screen & Air Gesture  
(TRD Sportivo Type)



@yarisID



YarisGroovynations



0807-1-898 898

[www.toyota.astra.co.id](http://www.toyota.astra.co.id)

GRATIS BUKA JASA  
SERVIS 24 JAM  
50.000 km / 4th



PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330



# Bidang Hukum & Advokasi





## Pendahuluan

Dalam Hubungan Industrial, terdapat kepentingan yang berbeda dari para pelakunya, yang sejatinya harus diselesaikan secara berkelanjutan dengan melakukan pertemuan, dialog sosial dan pelatihan sebagai proses pembelajaran kepada setiap pelaku Hubungan Industrial. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dan memahami posisi, peran, kewajiban dan hak masing-masing sehingga dapat mencapai asas saling pengertian dan/atau *win-win solution*.

Dalam mencari solusi terhadap setiap permasalahan Hubungan Industrial, perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif baik terkait sistem maupun regulasi yang saat ini berlaku. Solusi perlu memberikan jawaban apakah ketentuan peraturan tersebut telah mengakomodir setiap kepentingan para pihak atau diperlukannya modifikasi dan/atau pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Hal ini tentunya diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dalam Hubungan Industrial.

Departemen Hukum dan Advokasi Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO) berperan besar dalam memberikan edukasi hingga melakukan advokasi setiap pelaku Hubungan Industrial guna mencari titik temu dan solusi dalam setiap persoalan yang timbul antara pelaku Hubungan Industrial. Hal ini sesuai dengan konsep dasar Hubungan Industrial Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Menciptakan Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan.

Sejalan dengan semangat dan jiwa dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Visi Misi DPN APINDO yang hendak mewujudkan Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan, maka Departemen Hukum dan Advokasi melaksanakan dan mengikuti beberapa kegiatan dalam rangka Edukasi, Konsultasi dan Advokasi terhadap para pelaku Hubungan Industrial.

## Kegiatan

### 1. Audiensi Tim Hukum dan Advokasi DPN APINDO dengan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenakertrans

APINDO melakukan audiensi kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mendapatkan penjelasan informasi terbaru dari pihak pemerintah mengenai sistem perekrutan para calon Hakim AdHoc PHI yang akan datang dan Hakim AdHoc PHI Unsur APINDO dengan masa berakhirnya jabatan pada tahun 2016. Kegiatan ini dihadiri oleh lima orang dari APINDO dan tujuh orang dari Kemenakertrans.

Berlangsung di Ruang Kerja Direktur Jenderal Bapak R. Irianto Simbolon, Kemenakertrans Jakarta, 22 Januari 2014, Audiensi menghasilkan beberapa hal, yaitu:

- Kemenakertrans menyetujui akan menyampaikan informasi hasil seleksi administrasi para calon Hakim AdHoc PHI kepada APINDO;
- Proses rekrutmen calon Hakim AdHoc PHI diadakan 5 (lima) tahun sekali;
- Penentuan kebutuhan Hakim Adhoc di tiap propinsi akan dibicarakan waktu pertemuan koordinasi Kemenakertrans, APINDO dan Mahkamah Agung.



## 2. Pertemuan Tripartit Pemangku Kepentingan Indonesia “Langkah Awal Menuju Ratifikasi Konvensi ILO 189: Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga”

Hasil Sakernas 2012 diperkirakan sekitar 2,6 pekerja rumah tangga di Indonesia, merupakan bagian yang signifikan dari ketenagakerjaan informal. Termasuk pula kelompok pekerja yang paling rentan di pasar kerja karena para pekerja tersebut bekerja diluar lingkup hukum dan kerangka resmi, sebagai bagian dari ekonomi informal.

Pemerintah Indonesia berencana memulai proses dialog publik dengan beragam pemangku kepentingan, mendiskusikan jalan menuju ratifikasi Konvensi 189, dengan cara melihat kembali isi konvensi dan status terakhir proses ratifikasi. Diselenggarakan di Ruang Tridharma Kemenakertrans 12 Februari 2014, pertemuan ini ditujukan untuk:

- Memulai dialog publik serta konsultasi publik bersama konstituen tripartit ILO dan bersama pemangku kepentingan yang lebih luas dalam isu ratifikasi Konvensi ILO No. 189;
- Meningkatkan kesadaran publik tentang Konvensi 189 dan isu yang lebih luas terkait perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga;
- Memfasilitasi forum sehingga Indonesia dan Filipina dapat belajar satu sama lain dalam isu ratifikasi Konvensi ILO 189;
- Masing-masing Negara dapat saling mendukung dan dapat berkontribusi untuk penguatan perlindungan pekerja rumah tangga, salah satu kelompok pekerja migrant yang rentan di kawasan ASEAN.

Pertemuan dihadiri 50 orang dari perwakilan pemerintah, kelompok pengusaha, serikat pekerja termasuk kelompok organisasi non-pemerintah yang bekerja di isu pekerja migrant dan pekerja rumah tangga serta akademisi.

APINDO berpendapat bahwa upaya ratifikasi Konvensi 189 dalam kaitannya dengan kerja layak bagi pekerja rumah tangga harus sangat cermat dianalisis dengan setidaknya memperhatikan proyeksi pembangunan dan

daya dukung perekonomian, serta sistem sosial kemasyarakatan Indonesia.

## 3. Pelatihan Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKSB) untuk Organisasi Pekerja

Pelatihan yang dilatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur dasar hukum pembentukan kerjasama Bipartit ditujukan untuk:

- Meningkatkan serta memperkaya pengetahuan mereka tentang peran dan tujuan dari Lembaga Kerjasama Bipartit
- Meningkatkan standar-standar perburuhan dalam rantai pasokan global merupakan bagian penting dari strategi pembangunan pro-poor;
- Membantu perusahaan di Indonesia meningkatkan kepatuhan standar tenaga kerja dari satu sisi dan meningkatkan daya saing dan produktivitas di sisi lain.

Sekitar 30 orang yang terdiri dari organisasi pekerja dan perwakilan manajemen dari tingkat perusahaan dalam provinsi wilayah Jabodetabek terutama pabrik-pabrik garmen hadir di Bogor, 19 Februari 2014.

Pelatihan ini diharapkan menjadi mekanisme penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis dan mempertahankan dialog sosial antara pekerja dan manajemen. Para pekerja di tingkat perusahaan juga semakin paham tentang Lembaga Kerjasama Bipartit dan perannya.

## 4. The 6<sup>th</sup> Tripartite Regional Seminar on Industrial Relations in the ASEAN Region

Seminar diadakan di Chiba Jepang, 26-27 Februari 2014 dilatar belakangi atas pentingnya integrasi ASEAN pada 2015 dan kebutuhan bagi para pembuat kebijakan akademisi serta masyarakat umum dalam memahami implikasinya. Selain itu, kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka memperkuat Hubungan Industrial terkait perundingan bersama dan sengketa resolusi serta



mewujudkan Komunitas ASEAN yang terintegrasi efektif secara ekonomi, termasuk memfasilitasi pergerakan profesional, bakat dan tenaga kerja. Seminar Regional Tripartit ini ditujukan untuk:

- Mempromosikan fondasi Hubungan Industrial antara negara-negara ASEAN berdasarkan keseragaman norma dasar dan praktek-praktek yang baik, kemitraan sosial, tripartit dan dialog sosial;
- Pemerintah dan mitra sosial untuk bertukar pengalaman dalam membangun fondasi hubungan industrial, kerangka hukum dan peraturan;
- Memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN (tripartit) untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang berbagai mekanisme / proses untuk meningkatkan perundingan bersama dan penyelesaian sengketa.

Dialog diadakan para peserta yang merupakan perwakilan tripartit dari negara-negara anggota ASEAN dan Jepang dan menghasilkan beberapa hal, yaitu:

- Meningkatkan dialog sosial di tingkat ASEAN dan tripartit merupakan kesempatan untuk bertukar berbagai isu-isu Hubungan Industrial, Pengusaha, pekerja dan pemerintah perlu lebih banyak dialog dan berbagi pengalaman;
- Beberapa kesamaan telah diidentifikasi dalam hal Hubungan Industrial, sengketa sistem penyelesaian dan situasi perundingan bersama;
- Seminar akan dibawa kembali ke negara dan tripartit yang akan dilakukan dengan cara yang tepat di setiap negara ASEAN.

### 5. Inhouse Training PT. Trimitra Baterai Prakasa

Training bertopik "*Outsourcing*" ini diselenggarakan oleh PT. Trimitra Baterai Prakasa di Jakarta Utara, 18 Maret 2014 dan mengundang Ketua DPN APINDO Bidang Hukum dan Advokasi, Ibu Endang Susilowati, sebagai Narasumber. 30 orang Kepala Seksi di lingkungan kerja PT. Trimitra Baterai Prakasa menjadi peserta dalam acara ini.



Tujuan diadakannya *training* adalah untuk:

- Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis di tempat kerja;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja dalam rangka pemberdayaan ketrampilan dan pengetahuan oleh perusahaan;
- Mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara karyawan;
- Meningkatkan motivasi dan budaya belajar yang berkesinambungan.

### 6. Members Gathering DPK APINDO Kabupaten Karawang



Member Gathering diadakan di Karawang, 11 April 2014 untuk menciptakan iklim usaha kondusif, pertumbuhan investasi kompetitif, tingkat sosial ekonomi yang berkeadilan serta Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan kesetaraan.

Sejumlah Pengurus DPK APINDO Kabupaten Karawang, Anggota Biasa dan Anggota Luar



Biasa hadir dan menghasilkan rekomendasi untuk:

- Menggalang kerjasama dengan para pelaku usaha dan para pelaku hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar negeri;
- Membangun jejaring (*network*) dalam rangka peningkatan mutu pada umumnya dan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia dalam lingkup dunia usaha pada khususnya.

### 7. ACT/EMP-ACE Technical Meeting on Increasing the Productivity and Safety of Migrant Workers

Kegiatan diselenggarakan mengingat mobilitas tenaga kerja profesional di kawasan ASEAN diperkirakan akan meningkat secara signifikan dengan realisasi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Selain itu, peningkatan diperlukan dalam memastikan kerangka regulasi yang kuat dengan menekankan kepada Produktivitas dan Keselamatan yang telah diidentifikasi oleh Konfederasi Pengusaha ASEAN (ACE) untuk integrasi ekonomi pada tahun 2015. Adanya dampak yang lebih luas, dimana tenaga kerja terampil akan mendapatkan peluang baru, sementara di sisi lain menimbulkan tantangan dalam mengelola produktivitas dan keselamatan juga menjadi pemikiran untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Acara di Bangkok, 29 - 30 April 2014 dihadiri 10 negara ASEAN dengan masing-masing negara mengirimkan dua perwakilan. Hasil dari acara tersebut adalah:

- Posisi rancangan kebijakan ACE akan di-konsolidasikan oleh ILO menjadi kertas kebijakan (*blueprint*) ACE komprehensif dan diadopsi menjelang pertemuan regional berikutnya;
- Anggota ACE mengidentifikasi isu-isu prioritas yang berkaitan dengan produktivitas dan keselamatan tenaga kerjal menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan mengembangkan posisi rancangan kebijakan untuk mengatasi setiap masalah;
- Kapasitas anggota ACE 'untuk harga dan mempromosikan layanan OSH terkait mereka ditingkatkan.

### 8. ILO ASEAN Triangle Project “Civil Society Organizations Forum on Decent Work for Domestic Workers in ASEAN”



*Philippine Migrants Rights Watch* (PMRW) bekerjasama dengan Kelompok Pekerja Migran ASEAN (TFAMW), ILO Manila dan Proyek ILO Segitiga ASEAN menyelenggarakan forum ini di Manila pada 30 Juni - 1 Juli 2014. Sejumlah perwakilan dari negara ASEAN hadir, diantaranya Filipina, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, Vietnam, Kamboja, Laos dan Malaysia.

Forum ini bertujuan untuk:

- Mempromosikan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 bagi pekerja rumah tangga;
- Berbagi pengalaman serta pelaksanaan di negara Filipina dalam proses meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga;
- Strategi melakukan pendekatan kepada *stakeholder* di Filipina menuju ratifikasi Konvensi ILO No. 189 pada Pekerja Rumah Tangga serta Hukum Filipina Kasambahay (Undang-Undang tentang Pekerja Rumah Tangga);
- Keterlibatan Pekerja Rumah Tangga dengan organisasinya untuk membantu para pekerja migran di Singapura dalam menghadapi tantangan bekerja di luar negeri termasuk berurusan dengan majikan mereka.

Setelah diadakannya ILO ASEAN *Triangle Project “Civil Society Organizations Forum on Decent Work for Domestic Workers in ASEAN”*, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Secara umum forum berjalan dengan baik dan perwakilan dari berbagai negara belajar



bagaimana Filipina memiliki instrumen yang tepat dan berbagai pemangku kepentingan untuk melindungi pekerja rumah tangga terutama para pekerja di luar negeri;

- Disepakati antara peserta bahwa yang belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tidak berarti negaranya tidak menghormati hak pekerja rumah tangga untuk pekerjaan yang layak;
- Disarankan untuk Program ILO ASEAN tidak hanya berbagi proses ratifikasi konvensi, tetapi yang lebih penting untuk menunjukkan manfaat meratifikasi Konvensi ILO No. 189 ke negara-negara ASEAN lainnya.

### 9. Forum Konsolidasi Dan Eksaminasi Nasional



Forum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, 9-12 September 2014 menjadi wujud pengembangan dan perkuatan kapasitas Pengurus DPP APINDO dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota APINDO melalui kegiatan perlindungan, pembelaan dan pemberdayaan. Selain itu, Forum ini dilakukan untuk memperkuat peran APINDO dalam mewakili anggotanya untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial.

Peserta dari acara ini merupakan perwakilan DPP APINDO di seluruh Indonesia, dimana masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang unsur Ketua/Wakil DPP APINDO, Tim Advokasi DPP APINDO, dan Hakim AdHoc PHI unsur APINDO.

Tujuan dari Forum Konsolidasi dan Eksaminasi Nasional sebagai berikut:

- Meningkatkan dan memperkuat kemampuan Pengurus serta Tim Advokasi APINDO di daerah dalam Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;

- Menyatukan pandangan dan sikap terhadap permasalahan-permasalahan dalam Pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) termasuk menyatukan dan mempersamakan visi misi ke depan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penanganan perkara;
- Forum saling tukar informasi melalui diskusi seputar masalah hubungan industrial;
- Menganalisa dasar pertimbangan putusan Hakim (dasar yuridis, filosofis, sosial dan konstitusional) serta meningkatkan wawasan profesional para Hakim Ad Hoc unsur APINDO dan DPP APINDO.

Forum Konsolidasi dan Eksaminasi Nasional ini menghasilkan rekomendasi untuk:

- Diperlukannya koordinasi dan persamaan visi misi antara Hakim Ad Hoc, dengan DPP APINDO khususnya Tim Advokasi, sehingga dalam pengambilan putusannya akan dapat mencerminkan keadilan dan obyektifitas, dalam upaya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan sinergis antara Hakim Ad Hoc unsur APINDO dengan DPP APINDO, dalam upaya menciptakan keharmonisan, keselarasan dan kesinambungan, kerjasama yang baik antara semua elemen dalam pelaksanaan penegakan hukum terutama di Pengadilan Hubungan Industrial.

### 10. Member Gathering DPP APINDO Riau "Sosialisasi Permennakertrans No. 19 Tahun 2012 di Sektor Migas"

Member Gathering yang dilakukan DPP APINDO Riau dengan tema Sosialisasi Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 di Sektor Migas dilatar belakangi:

- Masih adanya perbedaan penerapan perjanjian pemborongan dengan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh terkait Implementasi Permenakertrans RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang *Outsourcing* di Sektor Migas;
- Masih terjadi multi tafsir terhadap Pemahaman mengenai Jenis-jenis perjanjian yang diatur berdasarkan perjanjian pemborongan;
- Penyamaan persepsi terhadap beberapa pasal Permenakertrans tersebut.



Diadakannya *Member Gathering* yang diadakan di Pekanbaru, 24 Oktober 2014 tersebut diharapkan akan memberikan pemahaman Implementasi Perjanjian Pemborong dengan perjanjian penyediaan jasa Pekerja/Buruh khususnya di Sektor Migas. Dengan demikian, hal ini tidak lagi menimbulkan multi tafsir dalam implementasinya antara Pemberi Kerja dan Perusahaan Jasa Penunjang.

Selain itu beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan sosialisasi Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 di Sektor Migas adalah:

- Pemahaman tentang semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang *outsourcing*, permasalahan yang dapat timbul sehubungan peraturan tersebut, bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut.;
- Peningkatan pemahaman Anggota DPP APINDO dan Pelaku usaha tentang peraturan yang berhubungan dengan dunia usaha/ industri khususnya terkait aplikasi Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi;
- Peningkatan kemampuan/keterampilan pengelola SDM di Perusahaan dan Tim Advokasi APINDO baik tingkat DPP maupun DPKota/ Kabupaten dalam Penyelesaian Per-selisihan Hubungan Industrial dan berdialog dengan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

## Harapan

Mengingat Indonesia akan memasuki era pasar bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, perlu dilakukan persiapan yang matang baik dari sisi Pemerintah, Pengusaha maupun Buruh/Pekerja serta masyarakat pada Umumnya. Pelatihan, sosialisasi dan perbaikan regulasi merupakan keniscayaan guna peningkatan kemampuan Sumber Daya manusia Indonesia.

Aspek hubungan Industrial dan/atau Ketenagakerjaan di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara kondusif, aman dan stabil sesuai dengan konsep Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan serta menciptakan kepastian Hukum. Dengan

demikian, hal ini dapat menyedot investasi baik domestik maupun asing dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Indonesia.

Pemahaman Implementasi Hubungan Industrial/Ketenagakerjaan secara komprehensif kepada para pihak pelaku Hubungan Industrial merupakan suatu hal pasti untuk terus dilakukan melalui berbagai upaya. Upaya dilakukan dalam berbagai aktivitas, baik melalui peningkatan edukasi seperti sosialisasi, FGD, dan pelatihan, maupun modifikasi regulasi serta membentuk sistem ketenagakerjaan yang kondusif guna menciptakan kepastian hukum bagi pelaku Hubungan Industrial dan kepastian berusaha khususnya bagi Pengusaha.



## *Hidup lebih lancar, e-Banking BCA*

Nikmati kemudahan bertransaksi dengan e-Banking BCA.

Gunakan BCA mobile, KlikBCA, BCA KlikPay, Flazz, Debit BCA, maupun ATM BCA.

Aktivasi sekarang juga di kantor cabang BCA terdekat.

**e-Banking BCA, solusi kemudahan transaksi.**

Halo BCA 1500888 / [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)  
BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK



# **BCA**

**Senantiasa di Sisi Anda**



# Bidang Informasi & Layanan Anggota





## Pendahuluan

Tahun 2014 merupakan tahun yang sangat penting mengingat Indonesia menentukan Kepemimpinan Nasional periode 2014 - 2019 baik Presiden serta Wakil Presiden yang dilakukan pada tahun ini. Perubahan dinamika politik diyakini akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha Indonesia. Hal ini menuntut para pengusaha untuk terus mengikuti perkembangan dunia usaha selama perubahan politik.

Dalam menyesuaikan perubahan politik Indonesia, APINDO sebagai organisasi pengusaha dituntut untuk selalu melindungi,

memberdayakan dan membela seluruh pelaku usaha Indonesia terutama anggota. Untuk itu, APINDO senantiasa berusaha dalam memberikan informasi terkini mengenai perkembangan dunia usaha serta memberikan pelayanan kepada anggota dengan memfasilitasi konsultasi terkait isu-isu dunia usaha.

Departemen Informasi dan Pelayanan Anggota selama tahun 2014 telah menyelenggarakan beragam rangkaian kegiatan yang merupakan bentuk pewujudan misi APINDO bagi para anggotanya.

## Kegiatan

### 1. Kegiatan Bersifat Informasi

Memasuki ASEAN Economic Community (AEC) 2015, ketersediaan informasi sangat diperlukan bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya tidak terkecuali bagi organisasi dan 350 lebih perusahaan yang tergabung sebagai anggota luar biasa DPN APINDO serta ± 30 asosiasi-asosiasi industri sebagai mitra APINDO.

Beberapa kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan diantaranya:

#### 1.1. Members Alert

*Members Alerts* bertujuan untuk membantu perusahaan Anggota APINDO khususnya dan Pengurus APINDO didalam memantau serta mendapatkan perkembangan berita-berita dan isu terkini yang diberitakan dalam media cetak maupun elektronik. *Member Alerts* juga berfungsi sebagai sarana penyampaian kegiatan-kegiatan APINDO baik nasional maupun internasional.



*Members Alerts*

#### 1.2. Website

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi Informasi dan perangkatnya, akses informasi melalui internet pun semakin meningkat. Pada Agustus 2014 APINDO meluncurkan tampilan Website baru dengan pembaharuan konten yang tersedia.

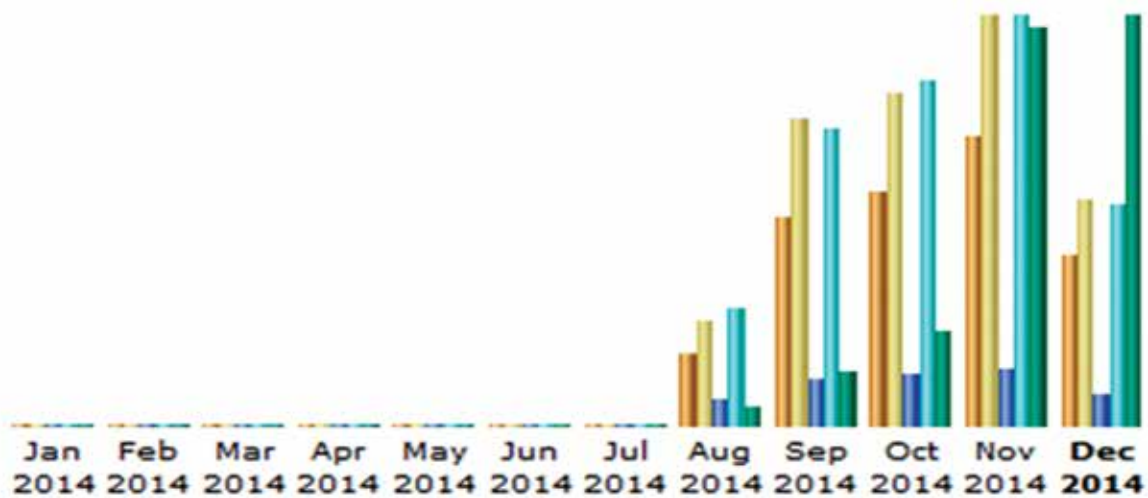


## Bidang Informasi & Layanan Anggota

Website APINDO merupakan sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi dasar mengenai APINDO, misalnya; profil APINDO, visi - misi, dan informasi mengenai layanan yang diberikan. Selain itu, website APINDO juga menjadi sarana komunikasi dua arah antara publik dan APINDO dengan adanya fasilitas pendaftaran anggota

APINDO secara on-line dan fasilitas bertanya on-line. Selama periode Agustus - Desember 2014, terhitung 15 pendaftaran Anggota APINDO secara on-line dan puluhan pertanyaan yang masuk melalui website APINDO.

Berikut adalah data statistik mengenai website APINDO yang tercatat hingga Desember 2014:



Month	Unique visitors	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2014	0	0	0	0	0
Feb 2014	0	0	0	0	0
Mar 2014	0	0	0	0	0
Apr 2014	0	0	0	0	0
May 2014	0	0	0	0	0
Jun 2014	0	0	0	0	0
Jul 2014	0	0	0	0	0
Aug 2014	1,236	1,798	15,624	72,824	2.72 GB
Sep 2014	3,597	5,317	28,857	183,182	7.99 GB
Oct 2014	4,042	5,739	31,976	214,139	14.28 GB
Nov 2014	4,996	7,073	34,117	253,371	60.47 GB
Dec 2014	2,935	3,929	18,485	137,451	62.13 GB
<b>Total</b>	<b>16,806</b>	<b>23,856</b>	<b>129,059</b>	<b>860,967</b>	<b>147.59 GB</b>

Data jumlah pengunjung pada tahun 2014



Countries (Top 25) - Full list				
Countries		Pages	Hits	Bandwidth
Indonesia	id	9,068	55,175	1.86 GB
United States	us	4,117	8,122	323.04 MB
Ukraine	ua	638	638	14.26 MB
China	cn	594	627	12.61 MB
Finland	fi	237	241	4.82 MB
South Korea	kr	188	2,057	23.82 MB
Australia	au	111	447	10.27 MB
Singapore	sg	101	1,145	29.77 MB
Russian Federation	ru	85	125	2.48 MB
Germany	de	65	328	7.20 MB
Great Britain	gb	58	937	24.62 MB
Japan	jp	56	547	12.31 MB
Philippines	ph	41	532	14.52 MB
Spain	es	41	45	8.60 MB
France	fr	40	232	10.65 MB
Switzerland	ch	21	127	2.69 MB
Venezuela	ve	21	21	369.01 KB
Turkey	tr	18	80	1.95 MB
Malaysia	my	16	148	4.92 MB
Hong Kong	hk	16	125	3.92 MB
Canada	ca	15	364	9.02 MB
Romania	ro	10	10	216.07 KB
Armenia	am	10	83	2.04 MB
Thailand	th	9	106	2.10 MB
Italy	it	9	102	2.54 MB
Others		39	460	348.58 MB

20 Negara terbanyak pengunjung Website APINDO

## 2. Kegiatan Bersifat Layanan

### 2.1. Members Gathering

Members Gathering merupakan acara rutin bagi perusahaan anggota APINDO. Gathering ini dilaksanakan secara rutin dengan topik dan tema yang disesuaikan dengan isu ketenagakerjaan maupun isu lainnya yang sedang terjadi.

Narasumber yang dihadirkan adalah pengurus APINDO maupun perwakilan institusi profesional yang berkompeten menyampaikan informasi.

Members Gathering bertujuan:

- Memberikan informasi terbaru kepada Perusahaan Anggota Luar Biasa mengenai topik terkini dalam dunia usaha;
- Sebagai sarana bagi Perusahaan Anggota luar Biasa untuk dapat saling mengenal dan berbagi Ilmu (benchmarking) terhadap perkembangan dunia usaha.

Pada tahun 2014 ini, APINDO telah menyelenggarakan Members Gathering sebagai berikut:

Tanggal	Tema
21 Februari 2014 21 Maret 2014	Implementasi Pelaksanaan BPJS Kesehatan
5 September 2014	Update Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Sosialisasi <i>the 1<sup>st</sup> Industrial Relation Conference</i>
28 November 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Upah Minimum Provinsi/ Kota/ Kabupaten 2015</li> <li>• Implementasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 2015</li> <li>• Update dan Rekomendasi IR Conference ATC Tahun 2014 di Yogyakarta</li> </ul>



Members Gathering DPN APINDO

Narasumber dalam Pelaksanaan Member Gathering dari Pengurus APINDO diantaranya: Bapak Hariyadi B. Sukamdani, Bapak M. Aditya Warman, Bapak Timoer Soetanto; sementara dari Pejabat Pemerintah yaitu: Bapak Jefri Haryadi, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Usman Sumantri, Kepala Diklat Badan BPSDM Kementerian Kesehatan, Ibu Jenny Wihartini, Kepala Group Pemasaran BPJS Kesehatan.

## 2.2. CEOs/Owners Gathering

CEOs/Owners Gathering telah memasuki tahun kelima dan dalam pelaksanaannya merupakan salah satu kegiatan yang ditunggu bagi para pemimpin perusahaan karena sangat strategis bagi dunia usaha untuk mengetahui arah dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah kedepan serta dapat mengetahui kendala dan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.



CEOs / Owners gathering bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BKPM



Menteri Keuangan RI menyampaikan pemaparan dalam CEOs/ Owners Gathering



Advisor Asia Pacific Department  
IMF Washington, David Cowen

- CEOs/ Owners Gathering bertujuan untuk:
- Menjadi sarana bagi CEO/ Owner Perusahaan Anggota Luar Biasa untuk dapat bertemu, mendengarkan, dan berkomunikasi langsung dengan Menteri atau pejabat pemerintah yang hadir;



Sepanjang tahun 2014, APINDO telah melangsungkan *CEOs/ Owners Gathering*, yaitu:

TANGGAL	TEMA	NARASUMBER
28 Mei	Situasi Perekonomian Indonesia	Bapak Chairul Tanjung, Menko Perekonomian
1 Desember	Kebijakan Terkini Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Saleh Husein, Menteri Perindustrian</li> <li>• Bapak Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan</li> <li>• Bapak Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan</li> <li>• Bapak Franky Sibarani, Kepala BKPM</li> </ul>
16 Desember	Indonesia Economic Outlook and Its Challenges 2015	Mr. David Cowen, <i>Advisor Asia Pacific Department IMF Washington</i>
19 Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendapatan Negara &amp; Insentif Fiskal, Sektor Usaha Apa Yang Diuntungkan dan Dirugikan?</li> <li>• Penyampaian Informasi Terkini terkait Tahapan Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan</li> <li>• Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum APINDO</li> </ul>

- Memberikan informasi perkembangan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ber-sentuhan langsung dengan dunia usaha;
- Memberi wadah bagi *CEOs/ Owners* Perusahaan Anggota luar Biasa dan Pengurus APINDO untuk dapat saling mengenal dan berbagi informasi mengenai perkembangan dunia usaha.



### 2.3. Kegiatan Khusus

#### 2.3.1. Dialog Khusus APINDO dengan Kepala Kepolisian RI, 12 Februari 2014 Hotel Kempinski

Dialog khusus pembuka tahun 2014 mengambil Tema "*Ketenagakerjaan dan Keamanan Nasional*" ini, disiarkan dalam program Khusus *Economic Challenges* bekerjasama dengan Metro TV pada Senin, 17 Februari jam 21.00 WIB. Acara dihadiri oleh sekitar 400 orang pengusaha baik nasional maupun asing.

Dalam dialog tersebut APINDO menyampaikan pendapatnya terkait permasalahan keamanan yang dihadapi oleh dunia usaha. Menanggapi berbagai masukan dari APINDO, Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Kepolisian RI menyampaikan komitmennya terhadap penegakan dan jaminan hukum bagi kepastian berusaha.



Dialog APINDO dan Kapolri

#### 2.3.2. Silaturahmi Ramadhan, 24 Juli 2014

Silaturahmi yang diadakan bertepatan di Bulan Ramadhan sekaligus sebagai Syukuran atas terpilihnya Bapak M. Jusuf Kalla, Ketua Kehormatan APINDO sebagai Wakil Presiden RI periode 2014 - 2019. Forum silaturahmi ini



Ketua Umum APINDO dalam Silaturahmi atas terpilihnya Bapak M. Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI 2014 - 2019



M. Jusuf Kalla, Ketua Kehormatan DPN APINDO yang terpilih sebagai Wakil Presiden RI 2014 - 2019

dihadiri oleh kurang lebih 300 orang pengusaha. Silaturahmi ini merupakan media untuk menjalin hubungan yang lebih baik khususnya antara anggota dan pengurus APINDO.

### 2.3.3. *Launching Road Map* Perekonomian, 18 September 2014

Buku *Road Map* Perekonomian merupakan sumbangan pemikiran dari APINDO untuk Kepemimpinan Nasional 2014 - 2019. Buku ini menyampaikan sejumlah rekomendasi pembangunan perekonomian yang mencakup kebijakan ekonomi makro, sektoral dan lintas sektoral.

Dalam acara *Launching* ini, Buku *Road Map* Perekonomian diserahkan secara langsung kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Tamu undangan yang

hadir sekitar 1200 orang memenuhi *ballroom* Hotel Four Season.

Penyelenggaraan acara yang bekerjasama dengan Metro TV ini disiarkan dalam program khusus Menuju Indonesia Ketujuh pada Senin, 22 September jam 20.05. Dengan keberhasilan *launching* buku *Road Map* ini, APINDO berharap informasi mengenai Buku *Road Map* Perekonomian tersebar kepada masyarakat dan menjadi perhatian khususnya bagi pemerintah.



*Launching Road Map* Perekonomian APINDO yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden RI



Penyerahan Buku *Road Map* Perekonomian oleh Ketua APINDO Kepada Wakil Presiden RI

### 2.3.4. Diskusi antara APINDO dan Unsur Buruh "*Pentahapan Kepesertaan BPJS Kesehatan*", 5 Desember 2014

Diskusi ini dilatarbelakangi ketidaksiapan BPJS terhadap implementasi program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengusaha dan Pekerja sebagai pihak yang diwajibkan ikut serta



dalam BPJS Kesehatan perlu berdiskusi lebih lanjut guna menyamakan sikap atas program BPJS Kesehatan.

Acara ini dihadiri perwakilan unsur buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Pekerja Indonesia (SPN), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN).

#### 2.3.5. Diskusi Membahas Permasalahan Jaminan Pensiun, 5 Desember 2014.

Diskusi ini dihadiri para pihak yang berkompetensi dalam permasalahan Jaminan Pensiun, yaitu; perwakilan dari PT. Taspen (Persero), BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, World Bank, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Umum APINDO, dan Konsultan Hukum APINDO.

Diskusi ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk perbaikan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Pensiun yang dinilai belum matang dan berpotensi merugikan para pihak.

## 2.4. Pelatihan dan Seminar

Kegiatan pelatihan dan seminar publik yang diselenggarakan oleh DPN APINDO merupakan hasil kerjasama dengan mitra kerja DPN APINDO, diantaranya adalah *Confederation of Norwegian Enterprise (NHO)* dan *The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA)* Jepang. Kegiatan ini dii peruntukkan khusus kepada anggota APINDO.

Berikut adalah pelatihan dan seminar yang telah diselenggarakan pada tahun 2014 :

#### 2.4.1. Pelatihan Sistem Manajemen Kecelakaan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) Bersertifikasi

Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama APINDO dengan NHO dan telah dilangsungkan sebanyak 2 kali selama tahun 2014, yaitu pada 19 - 22 Juni 2014 dan 3 - 5 September 2014. Tercatat sebanyak 15 peserta mengikuti pelatihan pertama dan 18 peserta pada

pelatihan kedua.

Latar belakang Pelatihan SMK3 adalah kesadaran terhadap pentingnya Sistem Manajemen K3 terintegrasi dalam manajemen perusahaan yang dilaksanakan berke-sinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undang terkait K3 seperti: UU No. 13, PP No. 50 tahun 2012. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan SMK3 dapat diimple-mentasikan dan risiko kecelakaan kerja turun 50%, maksimal zero kecelakaan kerja.

Tujuan Pelatihan:

- Peserta dapat mengimplementasikan K3 dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dapat melaksanakan Audit Internal SMK3 di perusahaan untuk tercapainya budaya K3 dan nihil kecelakaan;
- Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mengikuti Pelatihan, Perusahaan yang bersangkutan harus telah dapat memperoleh sertifikat SMK3 dengan ketetapan Penerapan Memuaskan.



Pelatihan Auditor Internal SMK3 bagi staf perusahaan anggota APINDO di Jakarta dan Bogor



#### 2.4.2. Seminar “Diversity of Wage Management”

Seminar “Diversity of Wage Management” yang dilaksanakan pada 22 - 23 Oktober 2014 ini merupakan kerjasama antara APINDO dan HIDA. Acara ini membahas solusi perundingan upah minimum yang merupakan permasalahan sensitif di Indonesia dan cara pendekatan Human Resources dan manajemen upah yang berbeda-beda untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Acara ini dihadiri 22 peserta perwakilan perusahaan anggota APINDO dan menghadirkan narasumber ahli ketenagakerjaan yaitu Mr. Prof. Yoshio Okunishi dari *Hosei University* Jepang, Bapak FX Sri Martono, dan Bapak Prof. Payaman Simanjuntak. Total peserta yang hadir adalah 22 orang.



Prof. Yoshio Okunishi menyampaikan pemaparannya dalam Seminar “Diversity of Wage Management”



Foto Bersama Peserta Seminar

#### 2.5. Konferensi Pers

Konferensi Pers bertujuan untuk menyampaikan pernyataan atau informasi oleh APINDO dengan mengundang Media Massa, diharapkan informasi dapat disiarkan sehingga informasi maupun pernyataan sikap APINDO dapat tersampaikan dengan baik dan benar.



Konferensi Pers APINDO dan Unsur Buruh

Berikut adalah kegiatan yang melibatkan media :

TANGGAL	TUJUAN	NARASUMBER
26 Februari 2014	Memberikan Penjelasan dan Pemahaman terkait Isi UU Perdagangan dan Perindustrian	Bapak Sofjan Wanandi Bapak Franky Sibarani
16 September 2014	Mengenalkan Buku <i>Roadmap</i> Perekonomian yang telah disusun APINDO	Bapak Sofjan Wanandi
2 Desember 2014	Untuk menyatakan sikap APINDO yang meminta revisi Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang waktu penerapan BPJS Kesehatan bagi penerima upah.	Bapak Hariyadi Sukamdani
5 Desember 2014	Untuk menyatakan sikap bersama antara pengusaha (diwakili APINDO) dan buruh (diwakili oleh beberapa konfederasi buruh) untuk penundaan batas waktu kepesertaan BPJS Kesehatan bagi penerima upah.	Bapak Hariyadi Sukamdani dan perwakilan unsur buruh



Konferensi pers pre-launching  
Road Map Perekonomian APINDO

## 2.6. Forum Resmi Institusi Mitra APINDO

Kegiatan lain yang melibatkan APINDO dan khususnya perusahaan anggota merupakan undangan beberapa institusi yang bermitra dengan APINDO. Beberapa forum resmi tersebut terdapat pada tabel di bawah.

## 2.7. Kunjungan Perusahaan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada ALB (Anggota Luar Biasa) serta untuk mengetahui berbagai harapan dan keluhan ALB. Kunjungan juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota.

Pada tahun 2014, APINDO mengunjungi dua perusahaan Anggota yaitu: PT Trias Indra Saputra dan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.



Kunjungan Ke PT. Bakrie Sumatera Plantations



Kunjungan Ke PT. Trias Indra Saputra

Beberapa forum resmi Institusi Mitra APINDO :

TANGGAL	ACARA	PENYELENGGARA
18 Maret 2014	<i>Business Meeting "Entering Into The Market"</i>	APINDO, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia.
28 April 2014	Pertemuan Badan Usaha Besar dengan BPJS Kesehatan "Pelaksanaan program BPJS Kesehatan"	APINDO dan BPJS Kesehatan
25 September 2014	<i>Half Day Technical Seminar "Factory Relocation" Planning, Projecting, Controlling, and Executing"</i>	EKONID
8 Oktober 2014	Dialog Ketahanan Pangan	CSIS, Forum Alumni Institut Pertanian Bogor dan Seknas Jokowi
14 Oktober 2014	Seminar "Peluang Pengadaan Barang dan Jasa di PBB"	Kementerian Luar Negeri
23 Oktober 2014	<i>Follow Up Meeting and Gathering NICC-AOTS-HIDA Training Alumni</i>	APINDO dan HIDA
14 November 2014	B2B Meeting dengan Delegasi Pengusaha dari Algeria	Kedutaan Besar Algeria



## Harapan

Memasuki tahun 2015 Indonesia akan menghadapi sejumlah peluang dan tantangan perekonomian yang memerlukan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menyikapinya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan peran yang berkelanjutan, APINDO pada saat ini telah melakukan Perubahan dan Penyempurnaan Kepengurusan DPN APINDO terhitung 1 Desember 2014.

Harapan terhadap Kepemimpinan Kepengurusan baru terhadap Pengembangan dan kelangsungan APINDO tidak terkecuali Departemen Informasi dan Layanan Anggota. Peningkatan jumlah perusahaan yang menjadi anggota luar biasa setiap tahunnya dengan dibarengi

pemberian kualitas layanan kepada anggota menjadi faktor yang tidak kalah penting menjadi perhatian dan menjadi harapan terbesar DPN APINDO.

Hal ini juga melibatkan dukungan dari seluruh elemen DPN APINDO seperti sinkronisasi dan pemetaan informasi mengenai kebutuhan pengembangan yang ada di Pusat maupun di Daerah terkait dengan rencana kerja pada tahun 2015. Tantangan tidak hanya pada sektor perekonomian, akan tetapi di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang semakin memerlukan penanganan jauh lebih baik dan terintegrasi.

**GARUDAFOOD**  
Leading in Innovation

**A close togetherness  
with our stakeholders  
for remarkable life**

[www.garudafood.com](http://www.garudafood.com)      Food ● Beverage ● Distribution

# TOTO



Discover the comfort and serenity of a well-designed bathroom.  
Create a sanctuary where you can relax and refresh your mind.

[WWW.TOTO.CO.ID](http://WWW.TOTO.CO.ID)

# Bidang Hubungan Internasional & Investasi





## Pendahuluan

Peran APINDO dalam ikut menentukan kebijakan bilateral, regional maupun multilateral dalam hal perdagangan, investasi dan ketenagakerjaan merupakan tugas utama yang dikoordinasikan oleh bidang internasional. Demikian pula kerjasama dengan organisasi pengusaha Regional maupun Internasional dan kerjasama dengan para *partner* internasional APINDO lainnya juga menjadi lingkup aktivitas yang dikelola oleh bidang internasional.

Melalui forum internasional seperti *International Labour Conference*, APINDO memperjuangkan prinsip-prinsip dasar dalam membangun hubungan industrial yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan menjamin keberlangsungan aktivitas usaha. APINDO juga ikut memberikan kontribusi bagi pengembangan pasar bersama ASEAN dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui berbagai forum internasional, baik yang diselenggarakan oleh organisasi pengusaha regional maupun oleh lembaga lembaga internasional lainnya. Lebih lanjut, APINDO memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dalam merintis kerjasama perdagangan dan investasi dengan Negara Negara lain, diantaranya dalam skema *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) Indonesia dengan Negara-negara Uni Eropa. Dalam tataran praksis, APINDO memfasilitasi berbagai pertemuan antara pelaku usaha dari berbagai Negara dengan pelaku usaha di Indonesia untuk mengembangkan potensi investasi di kedua belah pihak.

### 1. Kerjasama Internasional dan Regional

#### 1.1. Konferensi Internasional Ketenagakerjaan ke 103

Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-103 (*International Labour Conference 103<sup>rd</sup> Session*) dengan tema "*Building A Future With*



*Decent Work*" telah diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Mei - 12 Juni 2014. Pimpinan Delegasi Pengusaha hadir, Bapak F.X. Sri Martono dan delegasi mewakili unsur Pengusaha Indonesia berjumlah 32 peserta.

Pada sesi pleno, laporan delegasi unsur Pengusaha telah disampaikan oleh Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO. Pada pidatonya, Bapak Hariyadi B. Sukamdani mengemukakan bahwa APINDO mendukung tema ILC tahun ini untuk "*Job in the Center of Development: The Labour World in 2014*". APINDO berkomitmen untuk membangun hubungan industrial yang aman dan harmonis di Indonesia, meningkatkan kompetensi pekerja dan produktivitas perusahaan, serta mendorong usaha-usaha sektor informal menjadi UKM yang produktif.

Selain Laporan Direktur Jenderal ILO dan Laporan Ketua *Governing Body ILO*, konferensi ketenagakerjaan pada tahun ini membahas program dan anggaran ILO yang hanya dihadiri oleh wakil pemerintah saja. Pembahasan lainnya adalah kasus-kasus pelaksanaan Konvensi-Konvensi ILO dan diskusi umum mengenai penentuan Upah Minimum, Rancangan Protokol dan Suplemen Konvensi No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa, Rancangan Rekomendasi Transisi dari Sektor Informal menjadi Sektor Formal, dan diskusi Strategi Perluasan Kesempatan Kerja.



Group unsur Pengusaha telah mengantisipasi untuk materi komite dan dua diskusi teknis tentang Kerja Paksa dan Transisi dari Informal ke Ekonomi Formal. Rekomendasi yang disepakati dan telah diadopsi di Sidang Umum (Pleno) untuk Komite Kerja Paksa antara lain :

- a. Tiap negara anggota harus berupaya menghilangkan segala bentuk kerja paksa dengan mendukung dan mewujudkan hak-hak dasar di tempat kerja, kebebasan berserikat dan bernegosiasi, menghilangkan diskriminasi dan menghindari mempekerjaan anak;
- b. Tiap negara anggota harus merumuskan upaya yang paling efektif menghilangkan kerja paksa dengan:
  - Mengidentifikasi kelompok penduduk yang paling rentan menjadi korban kerja paksa;
  - Menentukan kelompok sasaran (*target groups*) untuk diberi penyadaran dan cara-cara menghindari kerja paksa;
  - Merencanakan program pelatihan untuk meningkatkan daya kerjanya dan kemampuan memperoleh penghasilan yang lebih besar.
- c. Alat-alat pelindung diri perlu disediakan bagi pekerja dan kepada korban untuk melepaskan diri dari kungkungan penindas;
- d. Tiap negara mengawasi dan menghilangkan potensi atau kemungkinan para lembaga atau orang yang merekrut menyalahgunakan kewenangan, antara lain dengan menghilangkan uang rekrutmen yang dibebankan kepada pekerja, mewajibkan pembuatan kontrak yang jelas, menyediakan kesempatan atau mekanisme menyampaikan keberatan atau pengaduan, dan memberikan sanksi atas pelanggaran.

e. Tiap negara perlu menyediakan keperluan hidup para korban kerja paksa.

Dalam pembahasan di Komite dari Transisi Sektor Informal menjadi Sektor Formal, terjadi diskusi yang sangat intensif dan pendapat yang sangat berbeda atas beberapa topik. Sebagian pada akhirnya dicapai rumusan yang dapat disepakati. Akan tetapi untuk sebagian lagi tidak tercapai rumusan yang dapat disepakati, sehingga rumusannya tetap dan disepakati untuk dibahas kembali pada sidang tahun 2015. Topik dimaksud antara lain :

- a. Rumusan definisi sektor informal, dan sementara dapat disepakati rumusan Konferensi
- b. International Statistik Ketenagakerjaan ke-15 seperti pada Tabel 1;
- c. Usul Kelompok Pekerja untuk memasukkan "*supply chain*", tidak dapat diterima oleh Kelompok Pengusaha;
- d. Usul Kelompok Pekerja untuk memasukkan '*domestic workers*', juga tidak dapat diterima oleh Kelompok Pengusaha.

### 1.2. Pertemuan Tahunan ASEAN Confederation of Employers (ACE)

Organisasi pengusaha di kawasan Asia Tenggara telah melaksanakan pertemuan ACE ke-39 di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 10 Mei 2014. Dalam forum tersebut, delegasi APINDO menyampaikan laporan yang mencakup beberapa hal, diantaranya:

- a. Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan untuk: penciptaan lapangan kerja, dan penurunan tenaga kerja informal. Dalam rentang waktu 2014-2019 diperkirakan total tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan



berjumlah sekitar 15,5 juta orang. Maka dengan asumsi untuk mempertahankan tingkat pengangguran 5% di tahun 2019, diperlukan penciptaan lapangan kerja 3 juta orang per tahun. Mengingat tenaga kerja sektor informal yang mencapai 60% dari total tenaga kerja, maka perlu ditargetkan tenaga kerja informal turun menjadi 45% di tahun 2019. Di sisi lain, terdapat surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang jumlahnya meningkat tajam tanpa disertai peningkatan produktivitas, maka untuk meningkatkan produktivitas sebagian tenaga kerjanya perlu ditarik ke sektor produktif seperti sektor manufaktur.

- b. Untuk menyerap tenaga kerja non-produktif pertanian, tenaga kerja informal, dan tenaga kerja baru, diperlukan fokus dukungan industry manufaktur padat karya. Untuk mendukungnya diperlukan perbaikan fundamental (biaya logistik yang kompetitif, kebijakan moneter & fiskal yang tepat, dll), serta perbaikan kebijakan ketenagakerjaan (UMP, PHK, *outsourcing*, dll).

Lebih lanjut, sebagai ILO GB Member yang mewakili Organisasi Pengusaha tingkat ASEAN (ACE), Bapak F.X. Sri Martono mempresentasikan "*Brief Activity Report*" dan hal-hal yang penting bagi para *country member ACE*, terutama persiapan ke ILC 103<sup>rd</sup> Session tahun 2013.

Forum ACE menyepakati beberapa hal berikut:

1. Pemilihan *ACE Representative* di ILO GB untuk periode 2014-2016
  - Berdasarkan agreement yang disepakati di Geneva pada tanggal 6 Juni 1996, maka yang akan mewakili ACE sebagai Deputy Member GB mendatang adalah *Employers Confederation of Thailand (ECOT)*
  - Mengingat perlu adanya kesinambungan, rapat telah mengusulkan Indonesia tetap aktif, yaitu sebagai Substitute Member GB
2. Pemilihan President dan Bendahara ACE untuk periode 2015-2017
  - Rapat menetapkan Cambodia (CAMFEBA) sebagai *chair country* (President)
  - Rapat menetapkan Singapore (SNEF) tetap sebagai *treasure*.

## 2. Peran Apindo dalam Forum dan Perdagangan Internasional



Dalam konteks ekonomi dan bisnis, APINDO perlu lebih berkiprah dalam menghadapi globalisasi. Kondisi ini dapat memperluas kesempatan usaha dalam negeri yang berdaya saing. Dampak globalisasi ekonomi menuntut APINDO untuk melakukan advokasi kebijakan internasional melalui tim negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antar negara (*Free Trade Agreement*) atau bentuk lain seperti Perjanjian Kerjasama Ekonomi (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*). Sesuai Keputusan Presiden No. 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Nasional, APINDO menjadi bagian dari Tim Perunding Indonesia terkait berbagai CEPA/FTA.

Dalam tahun 2014, tim perdagangan internasional APINDO turut hadir dalam perundingan bilateral perdagangan internasional dan pertemuan untuk studi kesiapan perundingan perdagangan internasional. Pertemuan tersebut, antara lain:

1. Perundingan Negosiasi Indonesia - Korea CEPA.
2. Peninjauan kembali Indonesia - Jepang *Partnership Agreement (IJEPA)*, sektor Jasa.
3. Studi Kesiapan Perundingan Uni Eropa - Indonesia CEPA (*Scoping EU - Indonesia CEPA*).
4. Negosiasi Kerja sama Perdagangan Bilateral (*Working Group for Trade and Investment*), Indonesia - Peru, Indonesia - Chile, Indonesia-Ekuador, Indonesia - Tunisia, Indonesia - Nigeria.



### 5. *Trade Investment Frame Work Agreement - Trade Investment Council (TIFA TIC) Indonesia - US*

Sejak pembentukan bidang kerja Perdagangan Internasional sebagai hasil Musyawarah Nasional 2013 lalu, maka ditetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kapasitas APINDO dalam Perdagangan Internasional dan memberikan nilai tambah kepada anggota; berperan aktif dalam melindungi dan membela kepentingan Indonesia terkait perdagangan internasional; mengambil bagian dalam mengkaji proposal dan negosiasi kerja sama perdagangan internasional serta memetakan dan menyusun daftar inventaris masalah yang menghambat perdagangan internasional.

Saat ini, kegiatan yang telah APINDO lakukan dalam rangka tujuan strategis tersebut diantaranya melalui program kerja sama APINDO dengan the European Union dalam menghadapi Perjanjian Kerjasama Ekonomi (CEPA) Indonesia - Uni Eropa. Tim Ekonom dan Kajian telah menghasilkan beberapa kajian dan makalah kebijakan APINDO sebagai representasi dunia usaha. Kajian dimaksud mengenai pandangan dari sektor bisnis Indonesia, Kajian Sektor-sektor Ekspor Unggulan Indonesia ke Uni Eropa, Kajian Daya Saing Indonesia dan Kajian Ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam rangka pemetaan dan pembentukan database anggota, bidang Hubungan Internasional telah menginisiasi pengadaan Aplikasi *Mobile* yang ramah pengguna (APINDO *Collaborative*) yang direncanakan akan rampung pengembangannya pada awal tahun 2015. Aplikasi *Mobile* ini akan memberikan tambahan informasi tentang produk, kegiatan ekspor dan impor serta hambatan dan masalah perdagangan yang dialami anggota.

Kegiatan APINDO dalam mempromosikan Investasi dan Perdagangan Internasional pada tahun 2014, sebagai berikut:

#### 2.1. US - Indonesia Investment Summit

*The US Chambers of Commerce, the American Chambers of Commerce* di Indonesia

berkerjasama dengan KADIN dan APINDO telah menyelenggarakan the U.S. - Indonesia Investment Summit di Jakarta pada tanggal 12 November 2012.

Konferensi tingkat tinggi ini dihadiri oleh para Investor Amerika Serikat terkemuka di Indonesia dan para Menteri Republik Indonesia dari kabinet baru terpilih untuk mengkaji kebijakan yang terbaik dalam mendorong investasi jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi.

Pada pertemuan ini menampilkan laporan yang baru diterbitkan "*Indonesia's New Path: Promoting Investment, Nurturing Prosperity*". Laporan tersebut berisi rekomendasi yang berfokus pada 3-4 permasalahan yang sangat penting dan mendesak per sektor dalam perekonomian Indonesia. Enam sektor unggulan dalam laporan tersebut meliputi minyak dan gas industri, industri ekstraktif, industri teknologi informasi, makanan sehari-hari dan kesehatan, pertanian, dan sektor keuangan.



#### 2.2. EU - Indonesia Business Dialogue

The 5<sup>th</sup>-Indonesia Dialog Bisnis Uni Eropa (EIBD) diselenggarakan di Jakarta pada 19 November 2014. EIBD merupakan forum tahunan bagi para pemimpin bisnis Indonesia dan Eropa untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang mungkin dilakukan terkait isu-isu yang mempengaruhi perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dan Indonesia.

EIBD Conference 2014 yang diselenggarakan oleh Jaringan Bisnis Uni Eropa-Indonesia (EIBN) dan diselenggarakan oleh komunitas



bisnis Indonesia termasuk APINDO dan KADIN Indonesia dan asosiasi anggotanya serta lima Kamar Dagang Eropa di Indonesia (Britcham, EKONID, EuroCham, IFCCI dan INA). Konferensi menampilkan beberapa diskusi sektoral yang diselenggarakan oleh EuroCham Indonesia berkoordinasi dengan asosiasi sektor Indonesia terkait. Pada tahun kelima ini, konferensi fokus pada sektor : Otomotif; Pertanian, Makanan dan

Minuman; Infrastruktur, Kelautan dan Logistik; Farmasi dan Kosmetik; Energi dan Energi Terbarukan.

Tujuan EIBD tahun ini adalah untuk membahas perspektif kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia yang baru terpilih 2014-2019. Selain itu, bertujuan untuk mempertahankan daya tarik Indonesia bagi investasi asing Eropa. Pembahasan langkah-langkah proteksionis diverifikasi di sektor bisnis, prospek nyata deregulasi dan liberalisasi dan daya saing Indonesia di Komunitas Ekonomi ASEAN mendatang.

Konferensi ini juga diarahkan pada meningkatkan kesadaran untuk Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (CEPA).

Kegiatan bidang Hubungan Internasional dalam rangka program perdagangan internasional dan promosi investasi lainnya, sebagai berikut:

No.	Negara	Program	Tempat dan Waktu
1.	China, Taipei	Trade and Investment Mission	2 - 7 November Jakarta, Indonesia
2.	Asia Pasifik	APEC CEO Summit & Economic Leaders' Summit	9 - 11 November Beijing, China
3.	Asia Tenggara	ASEAN Summit	10 - 11 November Mynmar
4.	Anggota G20 & B20	G20 Leaders' Summit & B20 Summit	12 - 14 November Brisbane, Australia
5.	India	FEIO - Trade and Investment Mission	9 Oktober Jakarta, Indonesia
6.	Indian Ocean Rim	Indian Ocean Rim Business Forum and Business Week	6 - 8 October Perth, Australia

### 3. Kerjasama Bilateral Internasional

Kerjasama bilateral internasional tahun 2014 merupakan kelanjutan dan optimalisasi dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Rangkaian

kegiatan berupa Pelatihan, Seminar, Lokakarya merupakan target pengembangan organisasi dan peningkatan kapasitas di berbagai tingkatan. Adapun Kerja sama Internasional yang dimaksud, sebagai berikut :



### 3.1. The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) - Japan

APINDO dan HIDA telah menjalin hubungan baik dan kerja sama se-jalan dengan perjalanan upaya pengembangan pusat pelatihan di Jepang yang diprioritaskan bagi dunia usaha, khususnya melalui wadah organisasi pengusaha dari negara-negara berkembang di dunia.

Hubungan kerja sama APINDO dan HIDA selain untuk meningkatkan hubungan persahabatan

antara negara-negara mitra dan yang utama adalah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan daya saing.

Program pengembangan sumber daya manusia di negara-negara berkembang dan keterlibatan APINDO untuk memfasilitasi pengembangan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada anggota secara khusus, maka pelatihan tersebut difokuskan pada program yang telah diikuti, sebagai berikut:

No.	Program	Peserta Terpilih	Tempat dan Waktu
1.	Role of Executive on Better Industrial Relations in Global Era [ERGE]	DPN APINDO	29 Januari – 11 Februari Tokyo, Japan
2.	Trainers' Training Course on Management Training Program [ERM1]	PT. Bakrie Sumatera Plantations	20 Mei – 5 Juni Osaka, Japan
3.	Program on Industrial Relations (IR) and Human Resource Management (HRM) [ERPM]	PT. Dupont Agricultural Product Indonesia	30 Juni – 11 Juli Tokyo, Japan
4.	Program on Occupational Safety and Health Management and Work Environment [ERWM]	PT. HM Sampoerna Tbk.	16 Juni – 27 Juni Tokyo, Japan
5.	Executive Management Program on Industrial Relations (IR) and Human Human Resource Management (HRM) [ERM]	DPN APINDO	01 – 14 Oktober Tokyo, Japan
6.	The Refresher Seminar for Former Participants [ERLX]	DPP Kaltim	04 – 12 November Tokyo, Japan

### 3.2. Confederation of Norwegian Enterprises (NHO)

Program kerja sama APINDO dengan NHO diantaranya ditujukan untuk pengembangan organisasi di tingkat Provinsi/Kota (DPP/DPK) melalui program peningkatan kapasitas organisasi, program pelatihan UKM/IKM, program sertifikasi profesional K-3, program peningkatan kapasitas hubungan industrial dan koordinasi para Hakim Ad-hoc unsur Pengusaha.

Program kerja sama ini telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak mengingat kerja sama telah berlangsung lebih dari 10 tahun dan berakhir tahun 2014 dari kerjasama berdasarkan perjanjian ketiga antara kedua belah pihak.

Adapun ringkasan Capaian Program sebagai berikut:

1. Kualitas dan kinerja dari staf Sekretariat di DPN APINDO dan sebagian DPP telah meningkat secara signifikan melalui program kemitraan ini.
2. Secara umum telah terjadi dampak yang signifikan dari program pada hubungan industrial yang sehat dan iklim usaha yang kondusif di Indonesia. Para perusahaan menjadi lebih sadar tentang tanggung jawab mereka untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan yang mendasar bagi para pekerja.
  - Jumlah industri perselisihan hubungan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 3.821 kasus pada 2011 menjadi 1.011 kasus pada tahun 2013;



- Jumlah kasus atas pemutusan hubungan kerja (PHK) menurun dari 3,875 kasus pada tahun 2011 menjadi 2.915 kasus pada tahun 2013, dan jumlah pekerja yang di PHK menurun dari 17.085 orang pada tahun 2011 menjadi 10.545 orang pada tahun 2013; jumlah pekerja yang terlibat mogok menurun dari 54.861 orang pada tahun 2011 menjadi 32.209 orang pada tahun 2013; hilang Jam Kerja menurun dari 233.718 jam kerja 2011 menjadi 131.006 jam kerja pada tahun 2013.
  - Ini menyiratkan bahwa saling pengertian antara pengusaha dan pekerja dan kedua belah pihak telah memperbaiki upaya penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit di Perusahaan .
3. Jumlah UKM baru terus meningkat dengan kondisi kerja yang lebih baik. Program pengembangan UKM binaan APINDO telah berhasil mengembangkan 1.714 UKM baru di tahun 2010 di 17 provinsi; 2.093 UKM baru di tahun 2011 di 21 provinsi; 2.446 UKM baru di tahun 2012 di 26 provinsi; 2.451 UKM baru di tahun 2013 di 26 provinsi dan 2.745 UKM baru di tahun 2014 di 26 provinsi.

Keberlanjutan kerja sama antara APINDO-NHO telah dibicarakan lebih lanjut, untuk memfasilitasi para anggotanya dalam memperluas kesempatan bisnis dan daya saing. Untuk memperkuat hubungan Norwegia dengan mitra organisasi di tingkat regional, baik dengan Indonesia (APINDO), Cina (CEC) dan Vietnam (VCCI) melalui pertemuan tahunan regional yang membahas isu-isu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Hubungan Industrial.

NO	Province	Year				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	ACEH	100	100	100	100	100
2	SUMUT	158	158	158	208	208
3	RIAU	5	65	65	65	65
4	KEPRI	32	70	70	70	70
5	SUMBAR	162	162	162	162	162
6	JAMBI	30	30	30	30	30
7	SUMSEL	-	-	-	54	54
8	LAMPUNG	-	95	170	170	170
9	DKI JAKARTA	100	100	100	100	394
10	JABAR	253	253	253	253	253
11	JATENG	360	360	360	360	360
12	YOGYAKARTA	-	62	50	50	50
13	JATIM	70	70	70	70	70
14	BALI	55	55	55	55	55

NO	Province	Year				
		2010	2011	2012	2013	2014
15	NTB	-	-	54	50	50
16	NTT	-	-	-	50	50
17	KALBAR	-	-	61	-	-
18	KALTIM	110	110	110	110	110
19	KALSEL	50	50	50	50	50
20	SULUT	-	-	50	-	-
21	GORONTALO	-	61	61	55	55
22	SULBAR	-	-	67	50	50
23	SULTENG	130	130	130	130	130
24	SULSEL	-	63	50	50	50
25	SULTRA	44	44	44	44	44
26	MALUKU UTARA	25	25	25	25	25
27	PAPUA	30	30	30	30	30
28	PABAR	-	-	71	60	60

### 3.3. Regional Meeting NHO - CEC - APINDO - VCCI ke-8

Program pertemuan tahunan bagi para mitra organisasi yang ke-8 dilaksanakan di Hangzhou, China pada tanggal 20 - 22 Oktober 2014. Program ini memiliki gagasan agar diantara organisasi pengusaha dapat mengembangkan secara komprehensif kebijakan organisasi dan pelaksanaannya dalam menghadapi tantangan dalam dunia usaha/kerja. Program dirumuskan untuk merangsang dan memperkuat kemampuan peserta dalam mengambil inisiatif dalam



mengembangkan kebijakan organisasi, pelaksanaan CSR dan tentunya saling memberi informasi tentang perspektif dunia kerja.

Delegasi APINDO telah merumuskan rencana aksi melalui program tahun 2015, sebagai berikut:

- Mempromosikan dan membentuk Tripartit Plus, sebagai wadah independen yang kredibel dan terpusat dengan mempertimbangkan kemampuan daerah masing-masing.
- Promosikan program pemagangan (*apprenticeship*) untuk mendukung usulan APINDO kepada Pemerintah, terkait penciptaan 3 juta lapangan pekerjaan. Program pemagangan dimaksudkan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja Indonesia.
- Bersama dengan Vietnam, merencanakan proses MRA (*Mutual Recognition Agreement*) untuk sektor khusus dan potensial bagi kedua belah pihak.
- Melalui dukungan NHO, diperlukan keberlanjutan kerjasama di tingkat regional antar mitra organisasi untuk program kerjasama yang relevan dalam pertukaran informasi.

### 3.4. Dutch Employers Cooperation Program (DECP)

Pada akhir tahun 2014 APINDO dan DECP telah melakukan kesepakatan untuk memperpanjang kerja sama yang bersifat bilateral dan jangka panjang. Jenis program memprioritaskan kepada pengembangan strategi organisasi, peningkatan kapasitas dan pengembangan Sekretariat serta pengembangan Sumber Daya Manusia.



APINDO sebagai organisasi yang berbasis pada keanggotaan, dalam memberikan pelayanan terhadap anggotanya memerlukan perangkat pendukung. Bekerjasama dengan DECP, APINDO saat ini telah melakukan pengembangan perangkat *Customer Relations Manager* (CRM) untuk kebutuhan manajemen database anggota dan kebutuhan spesifik organisasi lainnya dalam lingkup sektoral dan nasional.

DECP bersama-sama dengan ILO ITC Turin telah memfasilitasi beberapa pelatihan di Turin, Italia dan Indonesia terkait pengembangan dan peningkatan kapasitas manajemen keanggotaan melalui program *Customer Relation Manager* (CRM), Strategi Keanggotaan dan Organisasi Pengusaha yang Efektif.

## 4. Peran Apindo sebagai Konstituante ILO

APINDO sebagai unsur lembaga Tripartit Nasional telah menandatangani kerjasama untuk program Pekerjaan Layak Nasional untuk Indonesia. Sebagai konstituante Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) maka APINDO turut terlibat dalam program-program kegiatan *Decent Work Country Program* (DWCP). Pada Pakta Lapangan Kerja Indonesia (PLKI) menegaskan tiga bidang prioritas, yaitu Penciptaan Lapangan Pekerjaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Sosial.



Beberapa keterlibatan program yang dilaksanakan bersama-sama dengan ILO di tingkat nasional, regional dan internasional sebagai berikut :

No.	Project/Workshop / Training	Date/Venue
1.	ASEAN-ILO/Japan Project on Industrial Relations (AIJPIR): 6th Tripartite Regional Seminar on Industrial Relations in the ASEAN Region	26 - 27 Februari Chiba, Japan
2.	Workshop on Minimum Wage Determination	17 - 18 Maret Bangkok, Thailand
3.	2 <sup>nd</sup> ASEAN Seminar on Implementing the Decent Work for All	28 April Da Lat, Viet Nam
4.	Employers' Regional Workshop: Increasing Productivity and Safety of Migrant Workers	29 - 30 April Bangkok, Thailand
5.	Fellowship Training Program: Skills for Green Jobs	8 - 16 Mei Incheon, South Korea
6.	Employers' Forum on the ILO Better Work Programme	19 - 20 Mei Geneva, Switzerland
7.	CSO Forum on Decent Work for Domestic Workers in ASEAN	30 Juni - 1 Juli Manila, Philippines
8.	Fellowship Training Programme on Employment Services at Global Institute for Transferring Skills (GIFTS-HRD Korea)	23 Juni - 3 Juli Incheon, South Korea

### 5. APINDO-EU ACTIVE (Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment)

Setelah tiga tahun program ACTIVE (*Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment*) APINDO yang didukung pendanaan dari Delegasi Uni Eropa berjalan dari tahun 2012 hingga 2014, di bawah ini disimpulkan beberapa hal terkait rencana implementasi CEPA (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*) antara Indonesia dan Uni Eropa berdasarkan hasil studi tim ACTIVE yang dituangkan dalam position paper APINDO berjudul *APINDO Position Paper on Indonesia-European Union (EU) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Pada dasarnya, APINDO sangat berharap agar negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dapat dimulai secepatnya untuk mewujudkan CEPA antar kedua negara karena dipandang akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di

perekonomian internasional. Oleh karena itu, APINDO memberikan beberapa rekomendasi serta posisi dari dunia usaha terhadap pelaksanaan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut.

#### Mengapa dibutuhkan CEPA dengan Uni Eropa?

- CEPA Indonesia-Uni Eropa akan memberikan tambahan 0.1% pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka pendek, serta 1.3% GDP Indonesia pada jangka panjang;
- Produksi industri ringan akan meningkat 5%, peningkatan surplus perdagangan sampai USD 2 Miliar, serta meningkatkan upah sekitar 1.5%;
- Liberalisasi perdagangan dan investasi yang komprehensif akan dapat mengurangi kemiskinan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif;
- Merupakan saluran yang efektif untuk mengeksplorasi dan menciptakan peluang pasar yang baru bagi dunia usaha;



- Indonesia secara bertahap akan dikeluarkan dari penerima manfaat EU GSP; tertanggal 1 Januari 2014 beberapa produk Indonesia seperti *vegetable oil* (termasuk minyak kelapa sawit), produk hewan, serta produk kimia telah dikeluarkan dari skema GSP EU (akan ada lebih banyak lagi, mengingat Indonesia bukan negara miskin lagi);
- Tanpa CEPA, akan sulit untuk bersaing dengan negara-negara lain yang kurang berkembang yang masih mendapatkan skema GSP dari Uni Eropa, seperti: Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, dan lainnya;
- CEPA dengan Uni Eropa diperlukan untuk menjaga keunggulan kompetitif Indonesia dari negara-negara ASEAN lainnya;
- Melalui CEPA Indonesia dan Uni Eropa, Indonesia memiliki kesempatan untuk menegosiasikan relaksasi hambatan non-tariff yang selama ini menyandera potensi optimal perdagangan kita dengan Uni Eropa (contoh: negosiasi *Mutual Recognition Agreement (MRA)* pada produk kelapa sawit, dan produk kehutanan, kerjasama fasilitasi perdagangan).

Berikut merupakan beberapa posisi APINDO terkait pelaksanaan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa serta rekomendasi bagi pemerintah untuk dimasukkan dalam proses negosiasi, diantaranya sebagai berikut:

### Posisi APINDO pada Perdagangan Barang (Tariff)

- APINDO setuju terhadap 7 tahun modalitas pengurangan tariff; yang terpenting adalah cakupan produk serta kedalaman pengurangan tariff;
- APINDO meminta penghapusan tariff impor di Uni Eropa untuk berbagai produk utama dan potensial Indonesia, serta untuk produk-produk potensial lainnya yang masih dikenakan tariff peaks dan tariff escalation oleh Uni Eropa. Produk-produk tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada: tembakau dan produk turunannya, kakao dan produk turunannya, produk perikanan, TPT dan alas kaki, Palm oil serta produk-produk pertanian lainnya;
- APINDO menyarankan pemerintah untuk mengurangi atau bahkan menghapus besaran

tariff impor yang dikenakan untuk barang-barang modal dan bahan baku yang diimpor oleh industri domestik dari Uni Eropa. Misalnya: bahan-bahan baku untuk produk tekstil dan alas kaki, barang-barang modal seperti permesinan, Aturan Asal (*Rules of Origin*) juga harus dibuat sesederhana mungkin, CTH dan 10% *minimum local content requirement* untuk produk tembakau, *2-step process/fabric forward* untuk produk TPT.

### Posisi APINDO pada Perdagangan Barang (Hambatan Non-Tariff)

Berikut 5 (lima) strategi utama yang dapat diterapkan:

- Terciptanya konvergensi peraturan dengan Uni Eropa, untuk area-area dan produk-produk yang memungkinkan, misalnya membuat MRA yang mencakup penerimaan bersama mengenai standar, sertifikasi, dan testing antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya untuk produk-produk unggulan Indonesia, seperti sawit, kehutanan, perikanan, dan lainnya;
- Menciptakan program-program *capacity building* yang lebih intensif dan efektif yang menyasar kepada sektor swasta/dunia usaha agar semakin sesuai dengan standar internasional dan peraturan di Uni Eropa;
- Mengajak Uni Eropa untuk ikut serta berinvestasi dalam membuat pusat testing dan laboratorium khusus Uni Eropa di Indonesia;
- Mengajak Uni Eropa untuk berkomitmen lebih tegas pada penegakan transparansi, kepastian, dan konsistensi kebijakan pada penerapan regulasi non-tariff;
- Merancang program sosialisasi dan *positive campaign* untuk meng-counter kampanye negatif dan informasi yang salah yang selama ini diprovokasi oleh beberapa LSM di Uni Eropa (contohnya pada kelapa sawit).

### Posisi APINDO pada Perdagangan Jasa

- Tidak seperti perdagangan barang, pada perdagangan jasa posisi Indonesia agak sedikit tidak diuntungkan jika dibandingkan dengan Uni Eropa;
- Indonesia merupakan *net importer* sedangkan



- Uni Eropa adalah net eksportir produk jasa;
- Defisit perdagangan jasa Indonesia dengan Uni Eropa meningkat secara signifikan dari -147.7 Million Euro pada tahun 2005 menjadi -1330.3 Million Euro pada 2012;
  - APINDO merekomendasikan kepada pemerintah untuk secara bijaksana memilih sektor-sektor yang sudah benar-benar siap untuk dapat diliberalisasi dalam skema Indonesia-EU CEPA;
  - Jasa penerbangan dan konstruksi memiliki peluang yang besar untuk ekspansi ke Uni Eropa;
  - *MRA on construction/procurement certification* dengan Uni Eropa (jangka panjang);
  - Pada jangka pendek: mengadakan *technical assistance* untuk penyedia jasa konstruksi dalam negeri, dan menciptakan standar nasional dan sistem sertifikasi untuk layanan konstruksi yang diadopsi dari standar Uni Eropa dan standar internasional lain;
  - Meliberalisasi sektor jasa yang membutuhkan investasi skala besar dan dimana pemain domestik belum cukup kompetitif untuk menyediakannya, antara lain IT dan telekomunikasi, infrastruktur skala besar, dan energi & listrik;
  - Mendorong kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan Uni Eropa di sektor-sektor seperti logistik, transportasi, ritel dan distribusi, keuangan dan asuransi, akomodasi dan *leisure*;
  - *MRA on skills & professionals*:
    - komitmen untuk menyederhanakan dan memfasilitasi aplikasi visa bagi profesional dan dunia usaha Indonesia yang akan ke Uni Eropa;
    - Liberalisasi sektor pendidikan, khususnya pada bidang keterampilan dan pelatihan serta universitas/college;
    - Menyetujui *MRA on skills & professional*, contoh: keperawatan, mekanik, pekerja produksi di industri otomotif, serta lainnya.

#### Posisi APINDO pada Public Procurement

- Agenda liberalisasi *public procurement* di dalam Indonesia-EU CEPA sangat ambisius serta sangat sulit untuk direalisasikan;

- Terlalu banyak perusahaan skala kecil dan menengah yang bergantung pada proyek *procurement* pemerintah, khususnya *procurement* dari pemerintah daerah;
- Liberalisasi *public procurement* direkomendasikan hanya pada sektor infrastruktur, energi, dan listrik skala besar, dimana operator lokal juga belum memiliki kompetensi dan daya saing yang cukup baik dalam menyediakan hal tersebut.

#### Posisi APINDO pada Investasi

- Ekspektasi dunia usaha adalah agar Indonesia-EU CEPA membawa lebih banyak FDI dari negara-negara Uni Eropa;
- Indonesia hanya menerima 12% dari FDI Uni Eropa ke ASEAN, sedangkan FDI Uni Eropa ke Singapura mencapai 63%;
- *MoU on Investment, Industrial, and Technological Cooperation* antara Uni Eropa dan Indonesia, mencakup: transfer teknologi dan promosi investasi;
- Ketentuan dalam *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* harus mengecualikan aspek-aspek seperti kesehatan masyarakat, keamanan, serta lingkungan.

#### Posisi APINDO terhadap Cooperation and Capacity Building (CCB)

Berikut gambaran konsekuensi dari implementasi Indonesia-EU CEPA:

- Kompetisi lebih ketat dan perlu beradaptasi dengan sistem kepatuhan yang ketat di Uni Eropa;
- Agenda liberalisasi (perdagangan barang, jasa dan investasi) memerlukan reformasi peraturan dan kebijakan;
- Perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur nasional, sehingga masyarakat dan dunia usaha bisa mengambil manfaat yang optimal;
- Oleh karena itu, Indonesia memerlukan program *cooperation and capacity building (CCB)* yang komprehensif dan berdampak besar.



### APINDO-EU ACTIVE Project: Kegiatan dan Studi Lainnya

Selain studi mengenai posisi serta rekomendasi APINDO bagi pemerintah untuk pelaksanaan negosiasi CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, di tahun 2014 sebagai tahun terakhir pelaksanaan program ACTIVE juga telah melaksanakan beberapa kegiatan dan studi penting lainnya seperti:

- **Rangkaian FGD (Focus Group Discussion) sektoral**, FGD terfokus pada sektor-sektor diantaranya Kelapa Sawit, Kayu, Tekstil, Persepatuan, Pertanian, Makanan, Jasa, dan lainnya. Rangkaian FGD ini memiliki tujuan yang sangat penting yaitu mengumpulkan berbagai masukan langsung dari para pelaku sektor-sektor tertentu baik yang memiliki potensi ekspor ke Uni Eropa dan/atau diutamakan yang sudah melakukan ekspor produknya sehingga dapat diketahui hambatan para pelaku ketika ekspor ke luar negeri khususnya ke Uni Eropa terkait standard dan regulasi, untuk dijadikan pokok bahasan dan rekomendasi dalam position paper APINDO terkait rencana pelaksanaan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa;
- **4 (empat) publikasi mengenai “Langkah dan Strategi Ekspor ke Uni Eropa” untuk Produk Udang dan Produk Kopi**, bertujuan untuk dijadikan panduan awal bagi para pengusaha kecil/menengah yang produknya memiliki potensi ekspor ke Uni Eropa;
- **Indonesian and European Business Community Meeting**, pertemuan antara para pengusaha Indonesia dan pengusaha Uni Eropa yang memiliki perusahaan/perwakilannya di Indonesia, bertujuan membahas isu-isu terkini tentang perekonomian Indonesia serta menghasilkan *Joint Statement* guna memperbaiki dunia usaha Indonesia di masa mendatang;
- **Publikasi mengenai Daya Saing berjudul “APINDO’s 2014 Survey on Business Competitiveness in Indonesia”**, merupakan laporan mengenai hasil survei yang dilakukan ACTIVE terhadap para stakeholders mengenai pandangan responden terhadap daya saing

dunia usaha Indonesia saat ini dan proyeksi beberapa tahun ke depan;

- **Pelaksanaan Capacity Building berjudul “Strategi Ekspor ke Uni Eropa” di Medan, Semarang, Surabaya dan Jakarta**. Program pelatihan ini ditargetkan untuk para pengusaha (khususnya UKM) yang memiliki potensi melakukan ekspor ke Uni Eropa maupun perusahaan yang sudah melakukan ekspor ke negara lain;
- **Policy Advocacy Meeting dengan pemerintah**, Tim Negosiasi APINDO untuk CEPA didampingi oleh tim ACTIVE melakukan audiensi ke Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI bertujuan untuk memaparkan posisi dan rekomendasi dunia usaha terkait rencana pelaksanaan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, sekaligus berharap dengan kunjungan tersebut dapat mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan negosiasi dengan pemerintah Uni Eropa.



Para peserta Capacity Building “Strategi Ekspor ke Uni Eropa” sedang mendengarkan paparan dari seorang praktisi sektor furnitur dan kerajinan, 30 Oktober 2014 di Semarang



Policy advocacy meeting antara Tim Negosiasi APINDO untuk CEPA Indonesia-Uni Eropa dengan Dirjen KPI Bapak Bachrul Chairi, 12 Desember 2014 di KEMENDAG RI, Jakarta



## 6. Institusionalisasi ISD (Indonesia Services Dialogue)



ISD First Roundtable Dialogue Forum, 6 Oktober 2014

Sektor jasa merupakan katalisator perekonomian baik dalam skala domestik maupun skala global. Pada tahun 2011, 65% PDB dunia berasal dari aktivitas sektor jasa. Di Indonesia, selama kurun waktu 2002-2012, kontribusi sektor jasa bagi PDB nasional naik dari 52,66% menjadi 66,33% (BPS 2013). Sektor jasa juga turut andil dalam mengurangi tingkat kemiskinan sebanyak 80% di pedesaan dan 86% di perkotaan sebagaimana dilansir oleh SMERU (2008). Di samping itu, peran sektor jasa dalam menyerap tenaga kerja juga mengalami kenaikan signifikan dari 34% pada tahun 2002 menjadi 45% pada tahun 2010 (BPS, 2010).

Sebagai asosiasi pengusaha yang memiliki anggota penyedia dan pengguna jasa, APINDO turut mendorong perkembangan sektor jasa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mendukung terbentuknya *Indonesia Services Dialogue* (ISD). Selama lebih kurang 4 tahun sejak tahun 2010, ISD telah mengadakan berbagai forum dialog yang memfasilitasi pelaku usaha, pemerintah, dan institusi riset dalam pengembangan sektor jasa.

Seiring perjalanan waktu, ISD terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada tahun 2012, APINDO bekerjasama dengan USAID SEADI untuk membangun kepedulian akan pentingnya sektor jasa dengan melakukan public forum dan workshop. Selang setahun kemudian, tepatnya pada 2013, AIPEG (*Australia Indonesia*



Chris Kanter, Ketua Badan Pendiri ISD pada acara ISD Executive Luncheon, 4 Desember 2014



*Partnership for Economic Governance*) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung mendukung APINDO untuk mengembangkan ISD sebagai lembaga independen yang fokus pada pengembangan sektor jasa di Indonesia.

Tahun 2014 merupakan fase penting bagi APINDO dalam upaya menelurkan ISD sebagai lembaga independen penggerak sektor jasa di Indonesia. Pendekatan pun dilakukan terhadap sektor swasta, akademisi, dan pemerintah (Kementerian Perdagangan RI) untuk membentuk ISD menjadi institusi formal. *First Roundtable Dialogue Forum* yang diadakan tanggal 6 oktober 2014 merupakan langkah awal sosialisasi rencana pembentukan ISD yang berbadan hukum. Forum ini ditindaklanjuti dengan *ISD Executive Luncheon* pada 4 Desember 2014 sekaligus sebagai rapat pendirian ISD dan dihadiri oleh calon Badan Pendiri (*Board of Founders*). Sebanyak 19 perusahaan nasional dan multinasional, 4 (empat orang) perwakilan non-institusi, APINDO, KADIN, CSIS dan Kementerian Perdagangan RI, turut mendeklarasikan berdirinya ISD. Pada tanggal 6



## Bidang Hubungan Internasional

Januari 2015 ISD resmi terdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM dengan nama Indonesia Services Dialogue Council sesuai dengan Akta No. AHU-0000018. AH.01.07 Tahun 2015.

Dengan berdirinya ISD sebagai lembaga legal formal, semakin besar harapan terhadap ISD

agar terus menjadi fasilitator dialog berbagai pemangku kepentingan sekaligus *think tank* dalam mempromosikan dan mendorong efisiensi sektor jasa Indonesia sehingga mampu bersaing dalam kompetisi global. Lebih lanjut mengenai ISD dapat diakses di [www.isd-indonesia.org](http://www.isd-indonesia.org).

## Harapan

Bidang Internasional mengharapkan untuk menjadi partner aktif pemerintah dalam penyusunan kebijakan kerjasama ekonomi/perdagangan internasional yang akan sangat menentukan kinerja perekonomian Indonesia. Implementasi dari kontribusi pemikiran dunia usaha diharapkan tidak terhenti di kerumitan birokrasi dan koordinasi lembaga lembaga pemerintahan. Dalam hal investasi, ke depan APINDO berupaya untuk dapat memfasilitasi

peningkatan investasi di Indonesia melalui business match-making pelaku usaha dari luar negeri dengan pengusaha nasional untuk pengembangan investasi. Sementara itu, dalam forum internasional, APINDO juga diharapkan mampu memprioritaskan fokus strategik kontribusinya, diantaranya dalam forum ketenagakerjaan internasional di ILC, serta tidak terjebak dalam formalitas rutin forum-forum internasional.



**PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk**

Kawasan Industri MM2100 Jl. Sumatera, Cikarang Barat, Bekasi - Indonesia 17842 ☎ +62 21 898 0133 | [www.bekasifajar.com](http://www.bekasifajar.com)

 WARNA MARDHIKA



**HAMMER**



**NAIL**



 **Coconut Island**  
Rio de Janeiro, Brazil 1975



**waccoal**

# Bidang UKM - IKM





## Pendahuluan

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di tahun 2012, UKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, ini dapat dilihat dengan jumlahnya yang mencapai 56,53 juta unit dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto sebesar 59,08 persen. Selain itu kontribusi UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sampai dengan 97,16 persen atau mencapai 107 juta orang.

Melihat pentingnya peran UKM di Indonesia, sektor ini menjadi sangat penting sebagai strategi nasional untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sebagai upaya penghapusan kemiskinan di tingkat regional dan domestik.

Dalam upayanya untuk memajukan perekonomian nasional, APINDO memberikan perhatian besar terhadap penguatan dan pengembangan UKM melalui bidang UKM-IKM. Hal ini terlihat dari upaya APINDO dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan pengusaha UKM-IKM dengan memperjuangkan kebijakan yang

tepat dan berguna bagi UKM-IKM khususnya yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dan dunia usaha (UMP, jaminan sosial, pajak, energi, perdagangan, dll).

Bidang UKM-IKM di APINDO juga terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM melalui pelatihan yang berkesinambungan melalui penyelenggaraan kegiatan seminar, *training*, *workshop* dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas lainnya agar UKM-IKM dapat bersaing baik di tingkat lokal dan internasional dengan telah berjalannya integrasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan juga pasar bebas.

Dalam menjalankan aktivitasnya, beberapa kompartemen dibentuk pada tahun 2013 agar APINDO bidang UKM-IKM dapat bersinergi lebih baik yaitu Pengembangan Kewirausahaan, Kelembagaan dan Koperasi, Pemberdayaan SDM, Kemitraan Usaha dan Pemasaran dan Jejaring Usaha.

## Kegiatan

### 1. *Workshop "Home Worker"*

APINDO dan Proyek ILO MAMPU bekerja sama untuk mendukung pengembangan kebijakan nasional tentang pekerjaan rumah. Ini akan melibatkan konsultasi dan survei majikan untuk lebih memahami tantangan dan isu-isu yang dihadapi oleh pengusaha yang terlibat pekerja rumahan. Proyek Mampu dan APINDO juga ingin lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh pengusaha sehingga dapat mendukung pengembangan program percontohan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang teridentifikasi, dan secara bertahap meningkatkan kondisi kerja, hubungan kerja dan produktivitas pekerja rumahan.

Dengan diadakannya workshop di Solo dan Surabaya pada 27 dan 29 Januari 2014 ini, diharapkan para peserta lebih memahami tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha yang mempekerjakan pekerja rumahan, mendapatkan masukan dari pengusaha untuk penyusunan kebijakan tentang pekerjaan rumahan, meningkatkan kesadaran di kalangan pengusaha tentang praktik yang baik untuk mempekerjakan pekerja rumahan dan peran dan tanggung jawab hukum mereka, dan mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan program-program untuk menjawab tantangan yang teridentifikasi yang dihadapi oleh pengusaha dalam mempekerjakan pekerja rumahan. *Workshop* ini dihadiri peserta yang merupakan



30 pengusaha dalam industri rotan. Selain itu, perwakilan dari PROSPECT Indonesia, SNV dan IKEA juga hadir dalam acara ini.

Workshop ini bertujuan untuk menghasilkan beberapa hal:

- Berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi awal mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha dalam mempekerjakan pekerja rumahan;
- ILO MAMPU, dengan bermitra dengan APINDO dan PROSPEK Indonesia, agar mengadakan penelitian survei terhadap pengusaha untuk menggali lebih dalam tentang tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengusaha;
- ILO MAMPU dan APINDO juga bekerjasama dengan PROSPECT Indonesia, yang fokus pada pengembangan industri rotan di Indonesia, yang merupakan salah satu sektor yang melibatkan banyak pekerja rumahan dalam proses produksi.

Beberapa catatan juga diberikan dalam workshop ini, diantaranya ILO MAMPU agar mengkonsolidasikan laporan lokakarya dan mendiskusikannya dengan APINDO sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan dari pihak pengusaha. Selain itu, ILO MAMPU, dengan bermitra dengan APINDO, agar menyelenggarakan lokakarya dengan pengusaha untuk menyebarkan pedoman pengusaha tentang pekerja rumahan.

## 2. Indonesia Fashion Week (IFW) 2014

Sejalan dengan misi Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat mode dunia, APINDO mendukung Indonesia Fashion Week yang dilaksanakan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inspirasi mode. Menjadi pusat mode berarti harus mempunyai kemampuan mengedepankan kekayaan lokal untuk menjadi inspirasi industri mode global. Dengan demikian, bukan hanya produk akhir industri mode yang akan terserap namun juga mulai dari material mentah hingga sumber daya lainnya dari hulu ke hilir, sehingga misi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia melalui produk mode dapat tercapai.



Tujuan dari diadakannya IFW pada 20 - 23 Februari di Jakarta Convention Center adalah sebagai berikut:

- Indonesia Fashion Week bukan hanya momentum melainkan juga gerakan bangkitnya Industri Fashion Indonesia dan menandai penyusunan *roadmap* Indonesia untuk menjadi salah satu pusat fashion muslim dunia pada tahun 2020 mendatang
- Indonesia Fashion Week 2014 diharapkan menambah zona *green*, *starting point* dan *concept point* untuk lebih mempersiapkan acara ini menjadi lebih peduli akan perkembangan industri mode. *Event* ini dirancang menjadi *trade event* B to B total di tahun 2015.

Peserta IFW 2014 tercatat lebih dari 500 *brands* yang tersebar dalam beberapa zona, yaitu pakaian wanita, *casual*, *cocktail/party*, muslim, pakaian pria, anak-anak, aksesoris dan tekstil tradisional. Selain pameran dagang juga ditampilkan lebih dari 200 perancang mode dalam peragaan busana selama 4 hari penyelenggaraan IFW. *Pre Launching* buku Sarung juga dilaksanakan saat berlangsungnya Indonesia Fashion Week 2014.



### 3. Pembuatan Buku Sarung



Pembuatan Buku Sarung didasarkan pada beberapa pertimbangan bahwa sarung telah menjadi bagian hidup orang Indonesia, yang dimiliki dari ujung barat sampai timur Indonesia dengan motif atau corak khas daerah masing-masing. Sarung yang digunakan baik pria maupun wanita ini telah dikenal luas oleh generasi muda Indonesia, bahkan juga di dunia. Oleh karenanya, keberadaan sarung sebagai salah satu budaya Indonesia diharapkan tidak punah, dihargai sebagai warisan budaya, dilestarikan oleh generasi penerus dan dapat mengikuti *trend fashion* atau pakaian modern.

Pembuatan buku sarung ini didukung oleh *Confederation of Norwegian Enterprise* (NHO), *Chamber Trade Sweden* (CTS) dan beberapa korporasi. Acara ini diselenggarakan saat *Press conference* di IFW 20-23 February 2014 di JCC dan *Launch event* di Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) Juli 2014.

Dengan adanya pembuatan buku sarung, maka APINDO melalui Departemen UKM-IKM diharapkan dapat mengangkat keunikan dan keanekaragaman sarung dari daerah masing-masing, di mana industri *fashion* turut mendukung dan mengembangkan sarung sebagai bagian dari industri *fashion*. Selain itu, hal ini juga mengajak generasi muda untuk berwirausaha pada industri sarung.

### 4. Seminar Nasional Angkatan ke-2

APINDO bekerjasama dengan STIE Prasetya Mulya pada 27 Maret 2014 menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tajuk "*Membangun Motivasi Ekspor UKM Indonesia*" Angkatan ke-2.

Seminar ini bertujuan untuk memfasilitasi UKM di Indonesia agar memiliki motivasi dan semangat untuk menumbuhkan bisnisnya melalui kegiatan ekspor.

Tercatat sekitar 140 peserta dari Pengusaha Menengah, Kecil, dan Asosiasi melakukan *sharing* pengalaman dari para UKM pendahulu yang telah berhasil menembus pasar ekspor dengan produk masing-masing. *Sharing* pengalaman ini terkait konteks dalam melakukan ekspor, jenis produk yang diekspor, hingga hal-hal yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar produk ekspor. Dengan adanya seminar ini, maka tercipta transfer pengetahuan dan pengalaman dari praktisi UKM kepada UKM-UKM lainnya untuk berkeinginan melakukan kegiatan ekspor.

### 5. Konferensi Nasional UKM-IKM APINDO

DPN APINDO bekerjasama dengan NHO (*Confederation of Norwegian Enterprise*) mengadakan Konferensi Nasional bertajuk "*Membangun Sinergi APINDO untuk Peningkatan Daya Saing UKM-IKM di Seluruh Indonesia*" untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara bidang UKM-IKM APINDO agar dapat mengidentifikasi kemajuan, hambatan dan peluang yang ada yang telah dilakukan sejak pelaksanaan program kerjasama APINDO-NHO. Acara yang berlangsung pada Rabu - Kamis, 18-19 Juni 2014, berlokasi di Hotel Best Western Serpong diikuti 28 DPP APINDO tersebut juga bertujuan untuk:

- Melakukan Evaluasi atas Seluruh Program Bidang UKM-IKM yang telah berjalan dan *follow up* program yang telah dilakukan
- Perkuatan keorganisasian bidang UKM-IKM agar dicapai Perluasan keanggotaan UKM-IKM secara Nasional
- Mendokumentasikan aspek-aspek kemajuan serta keterbatasan upaya-upaya peningkatan produktivitas & daya saing UKM-IKM, khususnya terkait globalisasi dan pasar bebas
- Mensinergikan data UKM-IKM dan inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing
- Mengidentifikasi rumusan-rumusan, kebijakan-



kebijakan, agenda penting, kolaborasi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing UKM-IKM Nasional

- Menyusun suatu deklarasi bersama mengenai percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing UKM-IKM Nasional
- Bagian dari penyusunan database Nasional UKM-IKM versi APINDO

Konferensi Nasional tersebut menghasilkan:

- Sebuah visi bersama secara nasional dalam mengembangkan UKM-IKM di Indonesia
- Terkumpulnya laporan kegiatan bidang UKM-IKM seluruh DPP se-Indonesia
- Terbentuknya kelompok UKM-IKM binaan setiap DPP APINDO seluruh Indonesia
- Untuk memotivasi pengusaha UKM-IKM bergabung dengan APINDO

### 6. Trade Expo Indonesia ke-29 Tahun 2014

Kementerian Perdagangan kembali menyelenggarakan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-29 Tahun 2014 pada tanggal 8 - 12 Oktober 2014 di JIExpo Kemayoran, Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri,

Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pemerintah Indonesia telah menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu pilar penting pembangunan berkelanjutan Nasional. Untuk itu Trade Expo Indonesia (TEI) 2014 hadir dengan mengusung Tema “Towards Green Business” yang lebih mengedepankan Produk-produk ramah lingkungan Indonesia.

Tujuan dari TEI ini adalah mempromosikan potensi maupun eksistensi kekayaan dan keanekaragaman produk Indonesia sebagai produk yang berkualitas dan berwawasan lingkungan sehingga pada akhirnya mampu menopang perekonomian melalui peningkatan nilai ekspor non migas. Selain itu, pencapaian target TEI juga perlu didukung sebagai sarana peningkatan citra produk Indonesia.

Jumlah pengunjung mancanegara yang hadir sejumlah 14,345 orang atau meningkat 53,54% dibandingkan dengan TEI 2013 dengan pengunjung terbesar berasal dari Malaysia, India, Singapore, Saudi Arabia dan Bangladesh. Sementara itu transaksi terbesar berasal dari Kanada, India, Australia, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pameran TEI 2014 dengan tema *Towards Green Business* telah membukukan transaksi sebesar USD 1,42 miliar yang terdiri dari transaksi produk (USD 814,31 Juta),





transaksi jasa (USD 105,09 juta) dan transaksi investasi (USD 500 juta).



## 7. Workshop Kesetaraan Gender di Tempat Kerja

APINDO melalui bidang UKM bekerjasama dengan European Union, Plan Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Muda. Pada kerjasama ini, APINDO diharapkan

dapat berkontribusi didalam mendorong para anggotanya agar memiliki kebijakan yang sensitive gender di setiap perusahaannya.

Sebagai sebuah organisasi yang menaungi banyak perusahaan di Indonesia APINDO diharapkan dapat berkontribusi secara nyata tidak hanya dibidang investasi tetapi juga dibidang hubungan industrial utamanya menyangkut produktivitas para pekerja. Salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh APINDO kepada perusahaan anggotanya adalah dengan melakukan pengembangan pengetahuan bagi seluruh staf yang berkecimpung dibidang pengelolaan sumberdaya manusia baik yang ada di tingkat DPN sendiri maupun yang ada di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.

Salah satu bangunan pengetahuan yang harus dimiliki oleh dunia usaha salah satunya adalah terkait dengan isu kesetaraan gender. Pengetahuan yang mumpuni terhadap isu ini tentu saja tidak hanya akan berguna untuk mendorong produktivitas bagi pekerja tetapi juga berdampak pada citra positif dikalangan dunia usaha, karena perusahaan yang telah memperhatikan nilai-nilai kesetaraan gender akan dianggap sebagai sebuah perusahaan yang mampu memenuhi *social compliance*.

Tujuan diadakannya *workshop* ini adalah memperkenalkan isu kesetaraan gender dan 10 prinsip yang harus dipatuhi oleh dunia usaha dan memetakan tentang sejauh mana gender mainstream telah terimplementasi dalam kebijakan baik di tingkat APINDO maupun perusahaan anggotanya.

*Workshop* ini digelar di beberapa kota, di-





antaranya:

- Jakarta (14 - 15 Agustus 2014) dengan 18 peserta dari 8 Perusahaan (PT. BP Petrochemical Indonesia, PT ISS Indonesia, PT. Tripatra Engineers And Constructors, PT. Grama Bazita, Samsung, HM Sampoerna, PT BP Petrochemicals Indonesia), termasuk 10 peserta Staff APINDO;
- Surabaya (3 - 4 September 2014) yang diikuti 105 peserta dari Jawa Timur berasal dari Unit HRD & Pemilik/Pengusaha Kecil Menengah yang menjadi anggota APINDO;
- Semarang (15 - 16 September 2014) dengan menghadirkan 90 Peserta dari Jawa Tengah berasal dari Unit HRD & Pemilik/Pengusaha Kecil Menengah yang menjadi anggota APINDO, dan;
- Tangerang Banten (17 Desember 2014) dengan 104 peserta dengan komposisi: 66 peserta perempuan dan 38 peserta laki-laki.

*Output* yang dihasilkan dari *workshop* ini adalah adanya pemahaman gender untuk peserta yang berasal dari Unit HRD, Unit CSR, Pemilik Usaha, Pengurus DPK & DPP APINDO.

Workshop mengharapkan rencana tindak lanjut dari peserta untuk menyebarluaskan pemahaman gender ke dalam organisasi/instansi nya masing-masing.

### 8. Seminar Nasional - Membangun Kompetensi Ekspor UKM Indonesia

Seminar ini digelar pada 28 Agustus 2014 dan merupakan lanjutan kegiatan acara seminar sebelumnya yang bertajuk "*Membangun Motivasi Ekspor*" dimana APINDO dan Prasetya Mulya bekerjasama untuk memberdayakan UKM melalui peningkatan prestasi UKM ekspor dengan membangun kapasitas ekspor.

Melalui Seminar ini para peserta UKM bisa saling berbagi terkait pengetahuan dan pengalaman dari para UKM pendahulu yang telah berhasil menembus pasar ekspor dengan produk masing-masing. Beberapa materi yang dibahas dalam seminar ini meliputi: Cara Membangun Kualitas Produk Ekspor dan Penentuan Harganya, Menghitung Harga Pokok Produksi dan Titik Impas (BEP), hingga Menghitung Kapasitas Produksi Ekspor. Peningkatan kompetensi dalam melakukan kegiatan ekspor diharapkan menjadi output bagi UKM setelah mendapatkan transfer pengetahuan dan pengalaman dari praktisi UKM yang telah berhasil menembus pasar ekspor.

### 9. Pelatihan Disability Quality Training (DET)

Pelatihan ini merupakan bagian dari promosi pengembangan ketrampilan dan peluang kerja untuk penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip kesempatan yang setara. Peningkatan kesadaran mengenai isu disabilitas bagi lembaga pemerintah perlu terus dilakukan karena adanya mutasi staf, ketidaktahuan akan isu disabilitas dan untuk mendukung lembaga pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial dan APINDO mengenai penerapan kuota 1% pekerja dengan disabilitas di tempat kerja.



Pelatihan yang diselenggarakan selama dua hari (16 - 17 Oktober 2014 di Hotel San Pan Pacific), bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman peserta pada isu disabilitas dalam konteks program, proyek dan kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan atau yang didukung.
- Memperkenalkan kepada peserta perangkat dan konsep dasar disabilitas yang diperlukan dalam membuat perubahan pada kegiatan-kegiatan agar memastikan partisipasi penyandang disabilitas yang setara.
- Memfasilitasi peserta dalam mengidentifikasi elemen pekerjaannya yang perlu diprioritaskan untuk disesuaikan terkait inklusi disabilitas. Peserta yang menghadiri pelatihan ini berasal dari sejumlah perwakilan APINDO, KSPSI, KSPSI Kongres Jakarta, KSBSI, Universitas Atmajaya, Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Balai Latihan Kerja, Perusahaan, dan Media.

Dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu:

- Memiliki tambahan pemahaman pada isu disabilitas dalam konteks program, proyek dan kegiatan.
- Mempunyai pengetahuan pada perangkat dan konsep dasar disabilitas yang diperlukan dalam membuat perubahan pada kegiatan-kegiatan agar memastikan partisipasi penyandang disabilitas yang setara.
- Mengidentifikasi elemen pekerjaannya yang perlu diprioritas untuk disesuaikan terkait inklusi disabilitas.

## 10. Sosialisasi SCORE Modul 1 dan Sensivitas Gender bagi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan APINDO

Program SCORE merupakan program peningkatan usaha / industri kecil dan menengah melalui pelatihan dengan metodologi SCORE yang terdiri dari pelatihan di dalam kelas dan kunjungan ke perusahaan oleh instruktur ahli tentang cara- cara meningkatkan kerjasama di tempat kerja, produktivitas, mutu produk, kondisi kerja dan efisiensi produksi.

Sosialisasi SCORE Modul 1 dan Sensitivitas Gender kepada APINDO dan Serikat Pekerja/ Buruh diselenggarakan pada 21 - 23 Oktober 2014 di Hotel Oria dengan menghadirkan peserta dari staff DPN APINDO (2 orang), DPP DKI (1 orang), Karyawan pabrik (5 orang), dan Serikat Pekerja (8 orang).

Untuk meningkatkan daya saing dan kesinambungan UKM/IKM Indonesia dengan menjadikannya lebih produktif, bersih dan kompetitif serta mampu menerapkan praktik-praktik kerja yang baik dan bertanggung jawab, memperkuat kerjasama dan komunikasi antara pimpinan dan karyawan, meningkatkan kualitas dan produktivitas, dan mengurangi terjadinya limbah usaha.

APINDO, SPSI/SBSI dan Karyawan yang menghadiri sosialisasi ini diharapkan memahami SCORE Modul 1 mengenai Kerjasama Team, yaitu Kerjasama antara Karyawan dan Pengusaha yang berperspektif Gender. Selain itu, Konstituen tripartit juga dapat terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan dan standar ketenagakerjaan.

## 11. Pelatihan Teknis Kemitraan Ekspor UKM Indonesia 2014

Pelatihan teknis ini merupakan pendampingan yang lebih intensif sebagai sarana untuk mengidentifikasi internal bisnis dari UKM dan kemudian membekali para UKM dengan kompetensi yang dibutuhkan agar produk yang dimiliki oleh UKM tersebut berkualifikasi ekspor. Pelatihan teknis diharapkan mampu menciptakan UKM-UKM yang memiliki standar operasional bisnis yang berkualitas sehingga dapat menunjang kegiatan bisnisnya untuk semakin bertumbuh pesat.

Penyelenggaraan pelatihan teknis pada 25 November 2014 di Prasetya Mulya mengundang 25 peserta yang berasal dari sektor berbeda, antara lain; boneka (mainan anak), keripik, rangginang, asinan, kecap, jambu krista (makanan & minuman), kerajinan daur ulang kertas koran, bunga kering, batik (*handicraft*).



### 12. Pelatihan Enumerator Pemetaan Pekerja Rumahan, Pekerja Berbasis Rumahan dan Pekerja Penyandang Disabilitas Proyek ILO Mampu - Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perempuan



Proyek ILO MAMPU - Akses ke Ketenagakerjaan dan Pekerjaan yang Layak untuk Perempuan (Tahap 2) merupakan bagian dari Program MAMPU, Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan didanai oleh Pemerintah Australia, dan telah dilaksanakan sejak Februari 2014 untuk meningkatkan akses perempuan terhadap ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak dalam kondisi kesetaraan.

Pekerja rumahan adalah pekerja yang bekerja dari rumah atau tempat kerja lain yang bukan tempat kerja majikan mereka, untuk melakukan layanan atau menghasilkan produk untuk majikan mereka, sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan majikan. Pekerjaan rumah juga sering dipahami sebagai pekerjaan di "putting out system" di Indonesia. Para pekerja ini berada dalam hubungan kerja dengan si pemberi kerja. Mengingat bahwa pekerjaan pekerja rumahan berlangsung dalam privasi rumah mereka, pekerja rumahan seringkali sulit untuk teridentifikasi. Pekerjaan mereka sebagai besar terlihat untuk umum namun mereka tidak muncul dalam statistik angkatan kerja nasional.

Proyek ILO Mampu sudah memulai untuk mempromosikan pekerja rumahan. Namun



sangat sedikit informasi yang tersedia tentang di mana dan siapa saja pekerja rumahan itu. Oleh karena itu Proyek ILO Mampu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nasional berencana untuk mengumpulkan data tentang pekerja rumahan dan kondisi umum pekerja rumahan dalam Survey Angkatan Kerja pada bulan Februari 2015. Khususnya di 6 Propinsi wilayah kerja Proyek ILO Mampu.

Pelatihan diadakan pada 15 - 18 Desember 2014 di Hotel Santika Premiere Surabaya dengan menghadirkan tiga tim peneliti di wilayah Jawa Barat (Banten), Jawa Tengah (DIY) dan Jawa Timur. Mitra Pelaksana ILO MAMPU, yaitu MWPRI, YASANTI, TURC, GARTEKS, KAMIPARHO, TSK SPSI Rekonsiliasi, RTMM SPSI Rekonsiliasi, TSK SPSI Kongres Jakarta, KSPI, Kemenakertras, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan APINDO.

Adanya pelatihan Enumerator ini diharapkan mampu mengumpulkan data dan informasi mendalam tentang karakteristik dan kehidupan dan kondisi kerja pekerja rumahan beserta hambatan yang ditemui dalam menerapkan pekerjaan yang layak bagi perempuan penyandang disabilitas di beberapa propinsi di Indonesia. Data ini akan digunakan untuk memberikan *input* pembuatan kebijakan kepada lembaga pemerintah dan juga berguna bagi organisasi masyarakat sipil dalam membangun program dan layanan yang tepat untuk mendukung pekerja rumahan dan pekerja penyandang disabilitas.



## Harapan

APINDO akan terus berupaya mendukung, mendorong & memajukan UKM-IKM, dengan pelayanan yang handal juga melalui kegiatan yang memberikan manfaat, agar anggotanya (UKEA) mendapatkan pelayanan seperti halnya Anggota Luar Biasa (ALB) APINDO.

APINDO bidang UKM-IKM diharapkan dapat menjalin kerjasama lebih banyak dengan

institusi di dalam negeri dan juga internasional bagi kemajuan kemajuan UKM-IKM di Indonesia.

Di masa datang, anggota (UKEA) diharapkan dapat memajukan skala usahanya dan dapat bertransformasi menjadi perusahaan besar yang dapat terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) APINDO.

**PT Santiniluwansa Lestari**

*Indonesia Bangga*

**G FORCE**

PRODUK ASLI RIUTAN INDONESIA

PENERANGAN LAMPU JALAN

LAMPU SEHAT

**AIR ZUUR & AIR DEMINERAL**   **BATTERY ACCESSORIES**   **CAR BATTERIES**   **MOTORCYCLE BATTERIES**   **MOTORCYCLE TIRE & TUBE**   **INDUSTRIAL BATTERY**   **SISTEM ENERGI TENAGA SURYA**

SNI   GS   VdS   TÜV   CE   TS16949   ISO14001   ISO9001   OHSAS18001   T.K.D.N.   BPPT

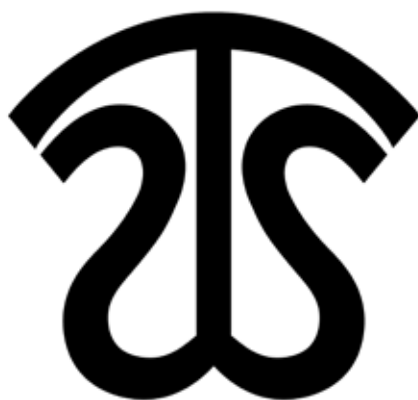
@GloriaSantini   gloria.santini   www.gloriasantini.com   info@gloriasantini.com   www.trinita-busana.co.id   www.santini-group.com   BATTERY GROUP

LEGENDARY HOSPITALITY



INFORMATION AND RESERVATION :  
R. Jend. Sudirman Kav. 16, Jakarta Pusat 10220, Indonesia  
P. (+62-21) 520-4444 | F. (+62-21) 520-2563 | E. [marketing@grandsahidjaya.com](mailto:marketing@grandsahidjaya.com)  
[www.grandsahidjaya.com](http://www.grandsahidjaya.com) | Follow us on [Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

*Where Tradition, Culture and Service Merge*



SINTESA GROUP



**aswata**  
asuransi terpercaya

**PT Asuransi Wahana Tata**

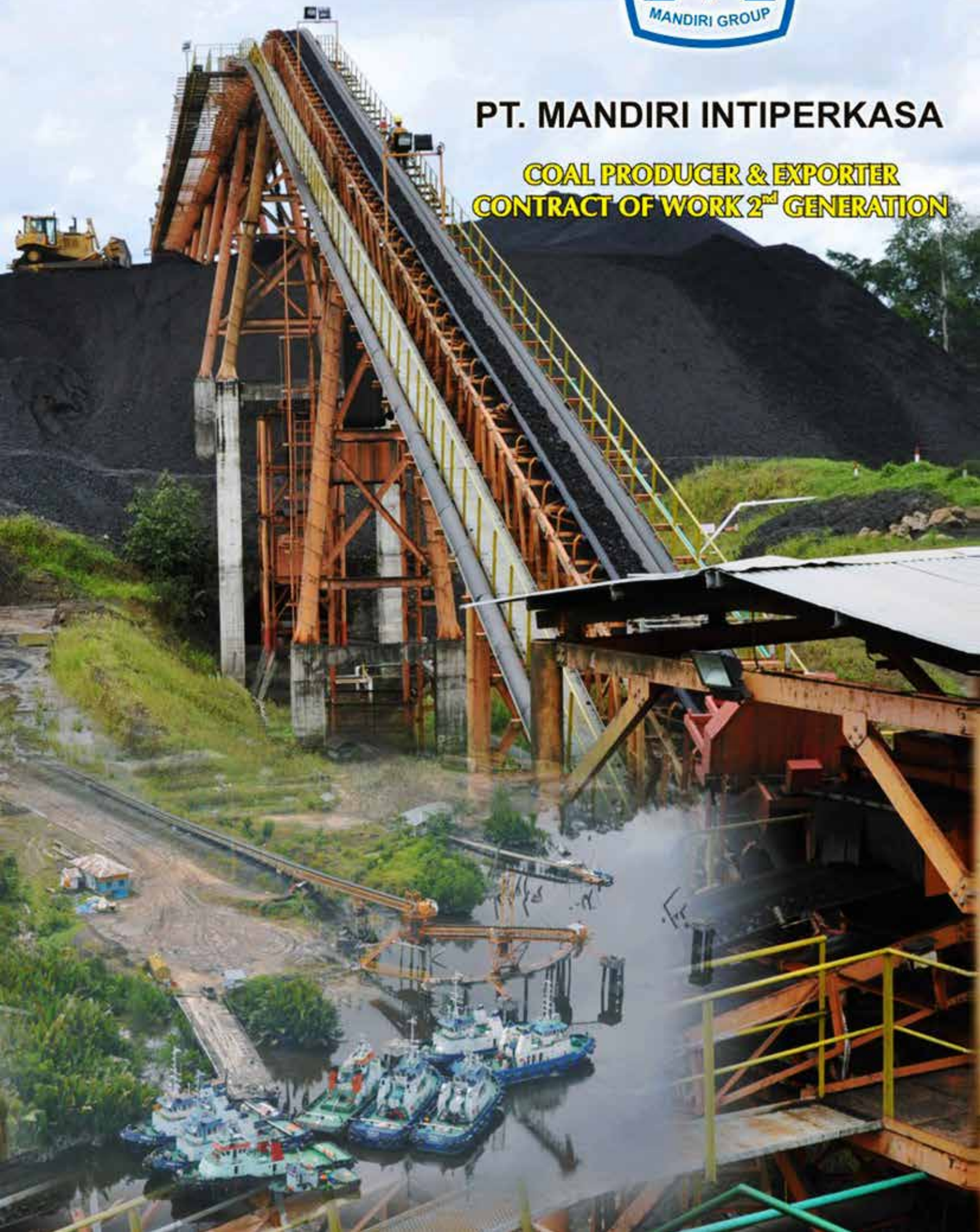
Gedung Asuransi Wahana Tata  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-4  
Jakarta 12920

Tel : (62-21) 520 3145, 520 3146  
Fax : (62-21) 520 3149, 520 5222-23  
Call Center : (62-21) 500 298 (AWT)  
Email : [aswata@aswata.co.id](mailto:aswata@aswata.co.id)  
Website : <http://www.aswata.co.id>



**PT. MANDIRI INTIPERKASA**

**COAL PRODUCER & EXPORTER  
CONTRACT OF WORK 2<sup>nd</sup> GENERATION**





# Bidang Ketenagakerjaan





## Pendahuluan

APINDO menjadi salah satu organisasi pengusaha yang hingga saat ini memainkan peran penting dalam mengurus bidang Ketenagakerjaan pada umumnya dan khususnya pada Hubungan Industrial. Keterlibatan APINDO dalam bidang ini telah mendapat pengakuan baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Misi utama pemerintah Indonesia di bidang ketenagakerjaan mampu diterjemahkan secara utuh oleh APINDO sebagai mitra yang telah teruji kontribusinya. APINDO bersama dengan Pemerintah c.q. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengembangkan dan membangun Hubungan Industrial di tengah dinamika yang luar biasa besar saat *people power* yang dikembangkan buruh menjadi tantangan yang berat.

Meskipun demikian, upaya mengkomunikasikan, mempromosikan kesempatan kerja, mem-

berikan pelayanan penempatan kerja, dan menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, demokratis, adil dan bermartabat terus dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan visi dan misi APINDO. Perkembangan dan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia terkadang menyebabkan perselisihan Hubungan Industrial, terutama di antara kalangan pengusaha dan pekerja.

Perbedaan pandangan yang mengarah pada peselisihan Hubungan Industrial menuntut adanya kreatifitas yang efektif dan efisien sebagai solusi alternatif atas persoalan-persoalan tersebut. APINDO berperan secara aktual dan maksimal melalui lembaga non-struktural yang bersifat tripartit, yaitu Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

## Kegiatan

### A. DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL (DEPENAS)

Melalui kontribusinya di dalam Dewan Pengupahan Nasional, APINDO memainkan peran strategis dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional dengan tetap menjadikan produktivitas kerja dan daya saing pasar sebagai pijakan dasar pemikiran. Berbagai peran strategis APINDO sebagai unsur Pengusaha di dalam DEPENAS antara lain kontribusinya secara aktif dalam merumuskan hal sebagai berikut:

- Sistem Manajemen Pembinaan Pengupahan di Perusahaan (SMP3 )
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Sepanjang tahun 2014, APINDO terlibat secara aktif dalam setiap pertemuan atau sidang pleno DEPENAS. Beberapa kajian yang telah dibahas pada tahun 2014 tidak hanya akan menjadi bahan dokumentasi tetapi diharapkan menjadi informasi dan bahan tinjauan (evaluasi) dalam rangka meningkatkan kinerja APINDO yang berperan strategis dalam pencapaian tujuan dari DEPENAS.

Rincian dan penjelasan atas hasil kerja di Dewan Pengupahan Nasional secara umum, dijelaskan sebagai berikut:



### 1. Penyusunan dan Perumusan Sistem Manajemen Pembinaan Pengupahan di Perusahaan (SMP3)

Penyusunan dan Perumusan SMP3 dilandasi pemikiran mengenai perlunya standarisasi bagi para pengusaha dalam menyusun skala upah sehingga mampu menentukan sistem pengupahan yang adil. Tidak adanya pedoman bagi pengusaha di dalam menentukan sistem pengupahan menyebabkan interpretasi secara parsial dan pada akhirnya menyebabkan timbulnya perselisihan para pihak.

APINDO bersama dengan Sekretariat DEPE-NAS secara intensif mengadakan pertemuan untuk membahas agenda SMP3 dengan harapan terciptanya sistem pembayaran upah dalam suatu standar atau skala pengupahan yang sesuai kemampuan pengusaha dan tingkat pekerja. Oleh karenanya, struktur upah yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya menjadi jelas dan proporsional dimana mengacu kepada masa kerja dan pengalaman.

Salah satu hal yang menjadi materi SMP3 adalah proses edukasi buruh, yang diartikan bahwa upah harus mengacu pada kompetensi sehingga produktivitas terdorong naik. Dengan demikian, kelangsungan usaha akan menjamin juga kelangsungan kerja.

### 2. Penyusunan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan

APINDO melalui DEPENAS juga telah membuat kajian secara intensif terkait proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. RPP Pengupahan merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 97 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan-peraturan yang disusun dalam RPP Pengupahan harus memacu peningkatan kompetensi, prestasi kerja dan produktivitas.

Atas dasar pertimbangan dari banyak aspek, DPN APINDO Bidang Pengupahan mempunyai 3 (tiga) langkah utama, yaitu:

- Meningkatkan kemampuan kinerja organisasi berupa Sumber Daya Manusia dan sumber

data di APINDO, terutama pada Bidang Pengupahan dan Bidang Hukum dan Advokasi. Kedua bidang tersebut merupakan ujung tombak keberadaan dan performa APINDO.

- Mendorong pengalihan pihak surveyor untuk pengambilan data yang menjadi dasar penentuan pengupahan, harus diambil oleh lembaga yang memiliki kredibilitas yang teruji. Jadi tidak ada lagi pengambilan data (survei) KHL oleh unsur yang memiliki kepentingan.
- Tetap memberikan ruang bagi usaha padat karya untuk memperoleh insentif atau keringanan, di antaranya penundaan upah minimum, bila memang cukup alasan untuk itu.
- Menghindari adanya generalisasi tipe perusahaan di dalam penentuan upah dengan mendata secara akurat jenis perusahaan dengan jenis UKM dan IKM sehingga tidak terbebani oleh kelompok upah perusahaan besar.
- Mencegah terjadinya politisasi kebijakan pengupahan demi mengamankan sistem dan ketentuan serta mekanisme yang sudah berlaku secara normatif.

### 3. Usulan APINDO Dalam Dewan Pengupahan

Beberapa masukan untuk Dewan Pengupahan baik di Tingkat Daerah maupun di Tingkat Nasional, yang diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan target Dewan Pengupahan Daerah/ Nasional dalam jangka pendek dan jangka panjang yang lebih nyata, yaitu:

#### a. Jangka Pendek:

- Menetapkan UMP tepat waktu di seluruh Indonesia.
- Membuat rujukan utama dalam perumusan kebijakan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- Mengimplementasikan kebijakan dan sistem pengupahan nasional yang terintegrasi dan berbasis riset (data ilmiah) di seluruh Indonesia.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif





# Bidang Kajian & Asistensi Eksekutif





## Pendahuluan

Struktur Organisasi DPN (Dewan Pimpinan Nasional) APINDO terdiri dari beberapa departemen internal yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Visi dan Misi APINDO. Sebagai bagian dari Sekretariat, Bidang Kajian & Asistensi Eksekutif mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dengan melaksanakan fungsi utama berupa kajian atas substansial atas hal-hal yang menjadi fokus perhatian APINDO, serta asistensi kepada Pengurus dalam menangani beberapa persoalan yang menjadi prioritas organisasi.

Bidang ini menyajikan informasi, data dan analisis yang disampaikan secara tepat dan akurat dengan tujuan memberi landasan keputusan jangka pendek, menengah dan panjang bagi stakeholder internal dan eksternal berdasarkan kerangka perencanaan waktu dan program kerja.

Fungsi Bidang Kajian tergambar dalam program kerja secara kerja 2014, yang berfungsi sebagai unit dalam Sekretariat APINDO yang membantu menginterpretasikan isu-isu perkembangan terakhir yang menjadi fokus utama APINDO, sebagai pemberi rekomendasi, serta sebagai unit yang membantu stakeholder APINDO, baik internal maupun eksternal, dalam pengambilan kesimpulan untuk pemecahan masalah.

Di tahun 2014, bidang ini memiliki beberapa program kerja yang telah dilaksanakan, yang dibagi berdasarkan tugas per unit kerja bidang kajian dan asisten eksekutif, serta berdasarkan program kerja departemen-departemen lain di Sekretariat APINDO yang memiliki irisan kerja dengan program kerja bidang ini. Implementasi dari program kerja bidang ini diwujudkan sebagai berikut:

- *Monitoring*, pencatatan dan kompilasi resume terhadap informasi dan data dari berbagai regulasi dan kebijakan publik yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perdagangan, investasi, dan hubungan industri. Kegiatan ini menunjang penyusunan

analisa dan sejenisnya untuk merespon perkembangan isu-isu yang ada.

- Penyusunan Memorandum Kebijakan (*Policy Memo/Note*) serta Penyusunan Analisa/ Makalah Kebijakan (*Policy Analysis/ Paper*) dengan latar belakang kajian yang terspesifikasi dalam bidang ekonomi c.q. ekonomi publik, hukum, kebijakan publik, dan lainnya yang terkait.
- Pelaksanaan Forum *CEO Gathering* tentunya memerlukan landasan topik / tema yang akan menjadi ajang diskusi pembahasan. Sehingga, penyusunan dan penyiapan *ToR (Term of Reference)* oleh bidang kajian menjadi penting dalam mendukung aktivitas ini.
- Pengembangan Wawasan melalui *Training, Workshop, Seminar*, dan lain-lain terkait Penulisan & Analisa Kebijakan. Program penunjang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan mutu SDM pada Sekretariat Bidang & Kajian, termasuk peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kemantapan analisa tim agar mampu melaksanakan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi, serta penyusunan langkah tindak lanjut yang diperlukan secara tepat dari sisi pelaku bisnis. Pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam program ini dikaitkan dengan upaya peningkatan dan pengembangan produktivitas dan wawasan tim kajian.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan pengembangan di lingkup internal tim kajian dan asisten eksekutif, maka tuntutan kualitas dan kuantitas mutu *output* program kerja merupakan keharusan dikarenakan penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas yang ada dalam Visi Misi APINDO. Guna mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelaksanaan program dan pengembangan di lingkup internal bidang ini, maka kegiatan monitoring dan evaluasi melalui rapat pembahasan sebagai wahana kontrol dan pengendalian program dilakukan secara berkelanjutan.



## Kegiatan

### 1. Kegiatan Eksternal, Publikasi & Seri Kebijakan

Bidang Kajian dan Asisten Eksekutif ini memiliki fungsi khusus untuk menjadi sarana diskusi dalam berbagai forum publik dan workshop dalam upaya untuk menjadi *think tank* organisasi di beberapa bidang yang menjadi fokus kesekretariatan untuk upaya sumbangsih pemikiran bagi rekomendasi kebijakan di dalam anggota APINDO itu sendiri maupun bagi pemerintah. Sumbangsih pemikiran sebagai suatu *think tank* diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya adalah melalui penyiapan dan penyusunan *Policy Memo* dan *Policy Paper* yang memiliki kapabilitas material publikasi bagi dunia usaha dan pemerintahan. Beberapa *Policy Memo* dan *Policy Paper* serta Publikasi APINDO diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1.1. “Labor Movement From Low To High Productivity Sectors : Evidence From Indonesia’s Provincial Data” (Maret - Oktober)

Produktivitas tenaga kerja Indonesia menghadapi tantangan berat untuk waktu mendatang ditengah melebarnya tingkat produktivitas pekerja Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, diiringi kontinuitas kenaikan upah minimum di Indonesia. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menggambarkan perkembangan struktural ketenagakerjaan di Indonesia. Perkembangan memperlihatkan transformasi struktural di Indonesia tidak hanya lambat, namun cenderung tidak mendukung perkembangan sektor manufaktur secara signifikan. Dalam mempercepat perubahan struktural, beberapa kebijakan direkomendasikan:

(1) mendukung sektor manufaktur yang penciptaan lapangan kerja,

- (2) mengevaluasi ulang upah minimum dan hambatan lainnya terhadap fleksibilitas pasar tenaga kerja,
- (3) mempromosikan akses yang lebih baik untuk pendidikan,
- (4) melakukan diversifikasi perekonomian di provinsi-provinsi yang bergantung pada sektor primer.

Rekomendasi kebijakan tersebut ditetapkan dengan argumentasi bahwa :

- (a) perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi adalah nyata walau memang semakin melambat dari tahun ke tahun,
- (b) tingkat pendidikan dan peran institusi pemerintah berperan penting terhadap kesuksesan transformasi ke arah sektor usaha dengan produktivitas tinggi,
- (c) tingkat transformasi struktural di propinsi-propinsi Indonesia masih timpang,
- (d) rigiditas pasar kerja telah menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja formal yang memiliki produktivitas tinggi,
- (e) ketergantungan terhadap sektor usaha primer / utama yang menjadi penghambat transformasi struktural.

#### 1.2. “In Facing The Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement : Perspective From Indonesia’s Business Sector”

Dalam perekonomian global yang dinamis seperti saat ini, rezim kebijakan ekonomi terbuka memperoleh popularitasnya di kalangan pembuat kebijakan negara maju dan negara berkembang. Ditengah stagnasi berbagai kesepakatan perdagangan melalui WTO, berbagai negara terus mencari terobosan melalui perjanjian perdagangan regional dan



bilateral, serta melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA). Publikasi ini mengidentifikasi isu-isu kebijakan utama yang diusulkan dalam kerjasama Indonesia-Uni Eropa CEPA dan berfungsi sebagai rekomendasi bagi pemerintah tentang metode pemecahan masalah dalam negosiasi Indonesia-Uni Eropa CEPA, khususnya dari perspektif sektor swasta. Sebagian besar berisi rekomendasi umum tentang bagaimana posisi terbaik pemerintah Indonesia bersikap dalam proses negosiasi Indonesia-Uni Eropa CEPA. Rekomendasi kebijakan yang terdapat dalam paper ini memberi landasan dasar mengenai maksimalisasi keuntungan serta minimalisasi kerugian dan biaya yang muncul dalam proses negosiasi Indonesia-EU CEPA. Apa isi substansialnya?

### 1.3. Policy Brief : “Masyarakat Ekonomi ASEAN”

Publikasi ini bertujuan untuk memperlihatkan dan memberi gambaran mengenai proses terbentuknya kesepakatan menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang merupakan proses yang dirumuskan sejak KTT ASEAN II tahun 1997 di Kuala Lumpur, dengan tujuan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil dan makmur yang memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bebas, pemerataan pembangunan ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di kawasan ASEAN.

Langkah strategis disusun secara terpadu diantara hulu hingga hilir dibawah koordinasi Badan Khusus atau Kemenko Perekonomian. Langkah strategis setiap sektor dijabarkan dalam tindakan perbaikan dan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik di setiap sektor. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mendorong kinerja ekspor harus dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh sektor Pembina dan Pelaku Usaha. Koordinasi antar sektor dan instansi dalam menyusun kesamaan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha, dan harmonisasi (reformasi) kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus dilakukan.

### 1.4. Policy Brief : “Rencana Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2014”

Pelaku usaha Indonesia senantiasa disibukkan dengan permasalahan mengenai penentuan Upah Minimum di setiap tahunnya. Kenaikan Upah Minimum merupakan hal yang wajar terjadi sebagai upaya kesejahteraan Pekerja, namun struktur dan skala kenaikan yang “fantastis” tanpa disesuaikan dengan kemampuan industri/perusahaan, akan memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) negatif, terutama pengurangan investasi asing, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta perluasan tingkat pengangguran terbuka.

Dengan demikian, tentunya penetapan Upah Minimum tentunya memiliki tujuan untuk keberlangsungan usaha dan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Kenaikan Upah Minimum yang tidak rasional mempunyai dampak pengganda (*multiplier effect*) di berbagai sektor dan terhadap instrumen lainnya, serta mempengaruhi investasi asing dan daya saing perekonomian Indonesia di masa depan. Selain gambaran singkat tersebut di atas, publikasi ini juga berkeinginan untuk membuka mata pembacanya bahwa terdapat isu-isu politis yang sangat rentan, dan juga seringkali “memanfaatkan” instrumen Upah Minimum untuk kepentingan politik semata, khususnya pada periode Pemilu Presiden 2014 lalu.

### 5. Policy Paper : “Biodiesel dari Minyak Sawit : Peran Industri dan Tantangannya”

Kebutuhan BBM fosil yang semakin mendominasi konsumsi energi, terutama di sektor transportasi, industri, serta pembangkit listrik menyebabkan Indonesia menjadi net importer country. Impor migas semakin menekan neraca transaksi berjalan nasional yang menimbulkan defisit. Tekanan lebih terasa saat harga minyak mentah dan pasar keuangan dunia bergejolak serta nilai tukar Rupiah vs Dollar AS melemah. Pemerintah c.q. Kementerian ESDM sebenarnya telah memulai mewajibkan pemanfaatan biodiesel dalam negeri. Upaya ini diharapkan dapat



meningkatkan produksi biodiesel yang lebih menguntungkan bagi semua pihak serta menjadi solusi atas tantangan kebutuhan BBM yang semakin meningkat. Pengembangan biodiesel Indonesia mulai diperhatikan Pemerintah sejak 2005. Namun implementasinya masih lamban dan jauh dari harapan. Kondisi ini memberikan iklim usaha biodiesel yang tidak pasti bagi para pengusaha / produsen atau investor.

### **1.6. Policy Brief : “Analisis Kebijakan Penge-naan dan Pembebasan PPN Barang dan Jasa”**

Policy Memo ini dikemukakan sebagai bentuk analisis terbaru terhadap kebijakan pemerintah mengenai PPN Barang dan Jasa. Kebijakan PPN berdampak langsung terhadap perekonomian mikro dan makro Indonesia. Dalam implementasinya Kebijakan PPN telah memberikan dampak positif dan negatif kepada para pelaku ekonomi, yaitu bagi rumah tangga (konsumen), perusahaan (produsen) termasuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan (regulator). Dengan demikian, kebijakan pengenaan dan pembebasan PPN harus dapat mengidentifikasi secara jelas macam barang atau jasa yang ditetapkan sebagai obyek pajak. Keputusan penentuan obyek yang dikenakan atau dibebaskan PPN harus mempertimbangkan indikator macam barang (barang produksi, barang konsumsi, barang substitusi, barang komplementer); elastisitas permintaan dan penawaran barang; serta dampaknya terhadap mikroekonomi (permintaan dan penawaran barang/jasa, produksi barang/jasa, daya beli konsumen) dan makroekonomi (inflasi, pertumbuhan, investasi, ekspor-impor). Kebijakan selalu menghasilkan dua macam keputusan, disatu sisi memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, namun disisi lain selalu ada pihak yang dirugikan karena kebijakan tersebut. Pemerintah perlu mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan. Pengenaan pajak pada objek yang tidak tepat atau mengenakan pajak pada objek tertentu dengan

tarif yang tidak tepat justru akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, lebih luas akan mengganggu perekonomian bangsa. Upaya pemerintah memungut potensi-potensi pajak melalui berbagai kebijakan dipandang perlu, namun jangan sampai menimbulkan berbagai permasalahan baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bangsa. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan dalam menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan dan menjaga iklim investasi yang baik.

### **1.7. “Roadmap Ekonomi 2014-2019 APINDO”**



Para pengusaha melalui APINDO meluncurkan Roadmap Perekonomian 2014-2019: Penciptaan Tiga Juta Lapangan Kerja Berkualitas per Tahun, Kontribusi APINDO bagi Kepemimpinan Nasional 2014-2019. Roadmap Perekonomian APINDO tersebut disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 dalam menggerakkan perekonomian, yang telah diserahkan secara langsung ke Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla dalam acara “*Launching Roadmap Perekonomian*” di Hotel Four Season pada 18 September 2014. Tim Kajian Sekretariat APINDO telah ikut serta dalam penyusunan Roadmap Perekonomian tersebut dengan didukung para pakar nasional, pejabat senior pemerintah, dan pakar dari lembaga-lembaga internasional untuk pengembangan pembangunan yang memiliki kompetensi keahlian di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan otonomi daerah.



Selain memberi target mengenai penciptaan 3 juta lapangan kerja, Roadmap Perekonomian ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur dalam jangka waktu spesifik, 100 hari, 1 tahun dan 5 tahun yang meliputi lima sektor kebijakan : Pangan dan Pertanian, Energi, Manufaktur, Jasa dan Finansial, serta Kebijakan Lintas Sektor seperti Kepastian Hukum, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kebijakan Makro dan Infrastruktur.

Rekomendasi Kebijakan yang terukur dalam 3 kelompok periode waktu tersebut memiliki landasan Strategi Makro, Sektor, dan Lintas Sektoral yang harus dilakukan selama pemerintahan baru 2014-2019, diantaranya :

- Strategi Makro Ekonomi dengan target pertumbuhan rata-rata 7% dalam 2014-2019 dengan target 6% (2015), 7% (2016), 7,5% (2017, 2018, 2019). Selain itu, Presiden dan Wapres terpilih diharapkan dapat menjaga defisit transaksi berjalan terhadap PDB di bawah 4%.
- Strategi Pengembangan Sektor Pangan dan Pertanian. Pemerintahan baru direkomendasikan memperbaiki sistem pasca panen komoditas pangan strategis serta perbaikan infrastruktur pertanian secara masif.
- Strategi Pengembangan Sektor Energi. APINDO merekomendasikan agar terdapat kepastian terhadap kontrak minerba yang akan berakhir dalam lima tahun dengan melibatkan stakeholder, serta pengembangan secara serius energi alternatif baru dan terbarukan.
- Strategi Pengembangan Sektor Manufaktur

dengan dukungan khusus bagi industri padat karya sebagai pull factor sektor pertanian yang rendah produktivitasnya dan pekerja di sektor informal yang berpendapatan rendah dengan memperbaiki prosedur investasi dan penyederhanaan perizinan pengadaan bahan baku.

- Strategi Pengembangan Sektor Jasa. APINDO merekomendasikan prioritas bagi sektor jasa keuangan, jasa logistik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
- Strategi Pengembangan Sektor Finansial secara inklusif untuk kemudahan akses seluruh sektor usaha di Indonesia.
- Strategi Pengembangan Infrastruktur diantaranya yang dibiayai dari hasil pengurangan subsidi BBM.
- Strategi Tata Kelola Hukum dan Pemerintahan melalui perwujudan keselarasan antara kualitas produk perundang-undangan, institusi kelembagaan pendukung, serta sumber daya manusia yang profesional.
- Strategi Perbaikan Ketenagakerjaan dengan penciptaan pengupahan yang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, pemerintah diharapkan aktif melibatkan pengusaha dan *stakeholder* terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menyangkut aktivitas bisnis sektor usaha. Terkait program transformasi dalam waktu 5 tahun, APINDO mendorong pelaksanaan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengusaha mendukung dimungkinkannya pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dari swasta untuk memperkuat kompetensi pegawai negeri sipil yang relatif minim.

### 1.8. Digital Library APINDO

Suatu organisasi / institusi, tentunya akan dapat beroperasi secara efektif dengan landasan kelengkapan database internal maupun eksternal. Database secara eksternal dapat diperoleh melalui survei, riset, dan lain-lain. Secara internal, hal tersebut dapat dibentuk



melalui perpustakaan data dan informasi, baik berupa data digital maupun data hard-copy. Dengan adanya paradigma baru perpustakaan Sekretariat APINDO tahun 2014 tersebut, maka bidang kajian memulai program Digital Library APINDO sebagai bentuk upaya penyediaan data dan informasi secara online dan elektronik kepada para staf dan *stakeholder* internal APINDO dalam mempermudah kegiatan operasional dan analisis Kesekretariatan.

Kegiatan membangun Digital Library APINDO tersebut mencakup penataan dan pengelolaan seluruh perpustakaan Digital Library APINDO yang mencakup Link : Buku, Jurnal, Makalah, Seri Kebijakan, Penelitian, Terbitan Umum, Peraturan, Konvensi ILO-ILC, Data, serta sub-sub Link nya masing-masing. Kegiatan pembangunan situs Digital Library APINDO dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi, yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

- Inventarisasi dokumen-dokumen dan produk yang dimiliki APINDO yang telah disimpan oleh unit kerja.
- Melakukan inventarisasi dokumen-dokumen dan data dari sumber-sumber internal.

Operasional utilisasi Digital Library APINDO telah dapat digunakan oleh para staf dan departemen-departemen internal. Penginputan data dan informasi masih terus dilakukan untuk memperkaya database data dan informasi, untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru.

## 2. Kerjasama

APINDO turut berperan dalam menyelenggarakan kerjasama kelembagaan, baik dengan lembaga domestik dan lembaga luar negeri, dengan tujuan untuk meningkatkan dialog dan kerjasama penelitian pada bidang-bidang yang menjadi perhatian utama Kesekretariatan APINDO. Dalam kaitannya dengan kegiatan bidang kajian dan asisten eksekutif 2014, kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional telah dilakukan, diantaranya dengan International Labour Organization

(ILO) dan European Chamber Of Commerce (EuroCham).

### 2.1. International Labour Organization (ILO)

Kebutuhan Sekretariat APINDO dalam mendukung aktivitas anggota dan sektor ekonomi Indonesia khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengupahan serta lingkup perekonomian yang lebih luas, menjadi landasan bagi perlunya APINDO melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik lembaga swasta maupun pemerintahan dan non-pemerintahan, di dalam dan luar negeri. Sehubungan dengan hal itu, APINDO, dalam hal ini bidang kajian telah melakukan kerjasama dengan ILO untuk kegiatan penelitian, workshop, seminar, pelatihan dan kegiatan lainnya terkait dengan isu-isu yang berkembang dalam bidang Ketenagakerjaan.

#### 2.1.1. Workshop : "The Role of the Recruitment Sector In Facilitating More Effective ASEAN Intra-Regional Labour Mobility"

Workshop tersebut diselenggarakan untuk membekali asosiasi-asosiasi pengusaha nasional dari seluruh negara-negara ASEAN dalam menanggapi isu-isu terkait migrasi ketenagakerjaan. Tentunya hasil workshop tersebut akan sangat bermanfaat bagi APINDO terkait dengan stand position kawasan regional terhadap isu migrasi tenaga kerja dalam hubungannya dengan stand point APINDO terhadap isu serupa. Workshop tersebut bertujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman menyeluruh mengenai industri perekrutan tenaga kerja serta peluang yang dihasilkannya dalam memfasilitasi pasar tenaga kerja nasional dan keseluruhan ASEAN secara lebih efektif.
2. Meningkatkan pemahaman sektor bisnis terhadap perlunya menciptakan iklim infrastruktur industri perekrutan tenaga kerja yang positif bagi mobilitas tenaga kerja intra-ASEAN.



3. Memampukan ASEAN dalam mengidentifikasi isu-isu prioritas terkait dengan industri perekrutan tenaga kerja menjelang MEA 2015 melalui rancangan kebijakan terhadap isu-isu permasalahan yang ada.

*Workshop* yang diselenggarakan di Hotel Doubletree by Hilton, Bangkok, 6-7 November 2014, diselenggarakan oleh Biro Aktivitas Pengusaha ILO (ACTEMP) dalam kaitannya dengan *ASEAN TRIANGLE Project*. *Workshop* tersebut mengikutsertakan para pakar regional dan internasional dari 10 negara anggota ASEAN, para pengambil kebijakan senior, Analis Media, Direktur HRD Senior, serta perwakilan ILO dan IOM (*International Organization for Migration*). Draft Posisi Kebijakan ACE (Konfederasi Pengusaha ASEAN / ACE) telah dikonsolidasikan menjadi suatu Policy Paper ACE yang komprehensif, dan akan ditindaklanjuti dengan *Workshop ACE* berikutnya di Phnom Penh pada tahun 2015, yang tentunya akan dijadikan wacana kebijakan migrasi ketenagakerjaan di level ASEAN.

### 2.1.2. Research Training “Policy Development : INDONESIA”

Research Training APINDO - ILO dengan fokus pada Policy Research yang diselenggarakan pada 27 November 2014 ditujukan untuk meningkatkan kapasitas riset dari para Board Member serta Staf inti DPN APINDO, khususnya dengan memperlengkapi para peserta Research Training dengan kemampuan riset bagi kontribusinya terhadap diskusi-diskusi kebijakan utama. Training tersebut akan dihubungkan dengan Akademi Kebijakan Asosiasi Pengusaha (Employers’ Association / EO) Regional pada tahun 2015 dan berfungsi untuk membantu APINDO dalam mengelola dan memetakan strategi serta kebutuhan para stakeholders APINDO sehingga dapat berdampak guna dan konsisten dalam mengikuti berbagai perkembangan isu yang ada di bidang riset.

Ruang Lingkup APINDO - ILO Research Training mencakup 2 hal:

### I. Training Untuk Kelengkapan Riset Berbasis Online Terbaru

Peralatan Riset berbasis Online terbaru tersebut dikembangkan untuk kawasan Asia Pasifik. Secara spesifik, terdapat 408 indikator yang melingkupi sebagian besar negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, yang akan mempermudah APINDO dalam mengakses indikator sosial ekonomi yang relevan, dan hal itu akan berkaitan erat dengan Roadmap Ekonomi APINDO 2014-2019. Peralatan / perlengkapan Riset Online tersebut akan memungkinkan APINDO untuk berpartisipasi dalam advokasi kebijakan secara efektif.

### II. Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Mengadvokasi Perubahan dan Berperan Dalam Penyusunan Kebijakan

Fokus lingkup ini untuk membekali para peserta training dengan metode penggunaan temuan survei, data sekunder dan penelitian tambahan yang dapat melandasi advokasi dan lobi yang kuat bagi penyusunan kebijakan EO. Trainer merupakan pakar senior ILO yang memiliki pengalaman substansial dalam membimbing EO terkait dengan penyusunan advokasi dan kebijakan.



### 2.2. European Chamber of Commerce

Selain dengan ILO, untuk beberapa permasalahan strategis, APINDO mengusahakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam



menyikapi beberapa sikap strategis, diantaranya dengan Kamar Dagang luar negeri, yang beberapa diantaranya telah memiliki MoU (Memorandum of Understanding) dengan chamber asing, diantaranya dengan European Chamber of Commerce (EuroCham).

Kerjasama dengan EuroCham tersebut salah satunya adalah dalam bentuk kerjasama pelaksanaan Serial Diskusi. Seri diskusi APINDO – EuroCham selama 2014-2015 akan dilaksanakan selama lima kali, dengan satu Diskusi yang telah diselenggarakan pada 18 September 2014 dan empat berikutnya pada tahun 2015, sesuai dengan kebutuhan dan penyesuaian isu-isu strategis 2014-2015. Sektor-sektor yang menjadi fokus investasi korporasi Uni Eropa adalah Telekomunikasi, Jasa Keuangan, Transportasi dan Logistik, dan ini tentunya dapat disinergikan dengan pelaku-pelaku bisnis di Indonesia dan Anggota APINDO terkait.

### 3. Kegiatan Asistensi & Pendampingan

Kegiatan Sekretariat APINDO, terutama kegiatan yang dilakukan para ALB (Anggota Luar Biasa) dan Anggota APINDO lainnya, tentunya memerlukan dukungan Sekretariat, yang merupakan bagian tugas sub-bidang asisten eksekutif. Dukungan pendampingan dan asistensi yang diberikan Departemen Sekretariat Bidang & Kajian telah terpenuhi dalam berbagai bidang, ketenagakerjaan dan pengupahan, sektor industri, perdagangan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam hal BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Green Investment, dan lain sebagainya, yang selama tahun 2014 diberikan dalam berbagai bentuk seperti materi presentasi dan materi pidato, talking points, notulensi dan lain-lain. Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sekretariat APINDO bersama dengan lembaga lainnya, seperti partner luar negeri (ILO, World Bank, HIDA, OECD, IFC, Chambers of Commerce, dan lain-lain), partner kelembagaan domestik, lembaga pemerintah (kementerian dan lain-lain), kalangan akademisi, development agency, korporasi, dan lain sebagainya.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan bidang ini dalam hal penyiapan puluhan materi presentasi, pidato, serta talking points, diantaranya adalah:

1. Penyempurnaan Masukan dan Usulan Indonesian Mining Association (IMA) terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. Penyusunan Presidential Message APINDO dalam periode kampanye Pemilihan Presiden 2014.
3. Penyiapan Talking Points APINDO terhadap publikasi Development Policy Review 2014 oleh World Bank.
4. Penyusunan Materi Presentasi “Peta Kekuatan SDM Lokal Vs Tenaga Impor” yang disampaikan pada Seminar Ketenagakerjaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).



5. Pembahasan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Jaminan Pensiun, luran dan Manfaatnya, dihadiri lembaga Tripartit : Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Selain itu, berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah sebagai mitra APINDO dalam berbagai kegiatan, secara rutin telah mengundang APINDO untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan tersebut yang tentunya akan memberi sumbangsih bagi APINDO dan Anggotanya. Bidang kajian telah ikut serta dalam puluhan kegiatan / event tersebut, serta memberikan laporan singkat dari berbagai kegiatan yang diikuti, diantaranya:
  1. Penyiapan Data Tarif Listrik negara-negara ASEAN untuk kebutuhan rapat APINDO-PLN.
  2. Rapat pembahasan APINDO dengan Bank Indonesia : Komitmen penggunaan Rupiah oleh dunia usaha dalam transaksi di dalam negeri.
  3. Bedah Buku Menyongsong 2014-2019 oleh Badan Intelijen Negara (BIN) di Balai Kartini.
  4. Rapat Diskusi Perpajakan antara APINDO-IFC (*International Finance Corporation*) *World Bank*.
  5. Kegiatan CEO Gathering APINDO pada 1 Desember 2014 yang menghadirkan Ketua BKPM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Tenaga Kerja.
  6. Kegiatan Forum Diskusi Analisa Pasar Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas oleh Kementerian Tenaga Kerja.
7. Seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2015, Komite Ekonomi Nasional (KEN) di Hotel Grand Hyatt.
8. Rapat Diskusi APINDO – Tim ILO mengenai *Mapping Roadmap* Ekonomi APINDO 2014-2019.
9. Diskusi Eksekutif Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) oleh Kemenakertrans RI.
10. Forum Bisnis The New Era Of the AEC 2015: *Opportunities And Challenges For BPC Members* oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal DKI Jakarta.
11. Rapat Diskusi APINDO – PLN mengenai Tarif Kelistrikan Nasional dan penyediaan kelistrikan bagi dunia usaha.
12. Diskusi penyiapan materi kerjasama APINDO dngan BPJS Kesehatan untuk mekanisme Koordinasi Manfaat.
13. Rapat Diskusi antara APINDO – BPJS mengenai Manfaat Pasti dan luran Pasti dalam Program Pensiun tenaga kerja.
14. Rapat internal Anggota APINDO mengenai perkembangan Pengupahan dan Penetapan UMP/UMK.
15. Diskusi Kementerian Tenaga Kerja RI mengenai Hasil Penelitian Bidang Ketenagakerjaan.

## Harapan

Penyusunan *stand-point* APINDO dalam berbagai persoalan hubungan industrial maupun persoalan lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan anggota APINDO menjadi fokus prioritas bidang ini di masa mendatang. Kontribusi APINDO dalam berbagai hal diantaranya seperti: Upah Minimum, BPJS Kesehatan, Dana Pensiun dalam lingkup BPJS Ketenagakerjaan, Perpajakan, Infrastruktur, Energi, Kerjasama

Ekonomi/Perdagangan Internasional, Dll. harus tercermin dengan jelas dalam kertas posisi APINDO sehingga memudahkan pemerintah dan para partner-nya menyerap pemikiran-pemikiran APINDO. Dinamika yang sangat cepat dalam perekonomian Indonesia menuntut bidang ini untuk tanggap dan terus meningkatkan kapasitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi yang berkembang pesat.

# Bidang Perdagangan





## Pendahuluan

APINDO memegang posisi strategis dalam meningkatkan hubungan perekonomian mengingat asosiasi pengusaha ini menjalin kerjasama dan mengadakan dialog rutin dengan misi perdagangan asing di Jakarta, diantaranya: American Chamber (AmCham), Indonesia-Australia Business Chamber (IABC), British Chamber (BritCham), Jerman Chamber (EKONID), European Chambers (EuroCham), Netherlands Chambers (INA), Jakarta Japan Club (JJC) dan Korea

Chambers (KoCham). Hubungan baik yang dijalin APINDO dengan misi perdagangan asing tersebut dinilai memberikan peluang dalam menciptakan kesempatan investasi dan perdagangan bagi Indonesia dengan pelbagai negara mitra. APINDO telah terlibat secara intensif menjadi rekan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dalam memberikan masukan strategis di bidang perekonomian dan perdagangan.

## Kegiatan

### 1. Penyusunan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Pemerintah dan dunia usaha menyadari bahwa investasi adalah salah satu unsur penting dalam membangun ekonomi yang kuat. Indonesia membutuhkan masuknya investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun demikian, kepentingan jenis investasi asing dan dalam negeri, tidaklah selalu sejalan. Oleh karenanya pengelolaan dan pengaturan yang cermat atas bidang investasi sangat diperlukan untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif, baik untuk investor asing maupun nasional.

Bidang Perdagangan APINDO sejak tahun 2013 sampai tahun 2014 terlibat secara aktif dalam penyusunan draf Peraturan Presiden mengenai revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Sebagai hasilnya di dalam

DNI yang baru, yaitu Peraturan Presiden nomor 39/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, telah mencakup usulan yang disampaikan oleh APINDO. Usulan APINDO yang diakomodasi dalam Perpres tersebut antara lain:

- Kepemilikan modal 100% oleh pengusaha nasional untuk bidang perdagangan eceran kendaraan bermotor, asesoris kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, perhiasan, barang antik, alat transportasi air, makanan dan minuman, mainan anak, kosmetik, alas kaki, dan elektronik.
- Kepemilikan modal 100% oleh pengusaha nasional untuk bidang usaha Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (*fee*) atau kontrak.
- Kepemilikan modal asing maksimal 33% untuk bidang usaha jasa perdagangan distributor dan pergudangan.



## Bidang Perdagangan

- Kepemilikan modal asing maksimal 33% untuk bidang usaha jasa cold storage untuk wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali; dan modal asing maksimal 67% untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

### 2. Perumusan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Perdagangan

Pada tahun 2014 Pemerintah telah menerbitkan UU Perindustrian nomor 3/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan UU Perdagangan nomor 7/2014 tanggal 11 Maret 2014. Dengan masih banyaknya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan, Bidang Perdagangan bekerjasama dengan Bidang Perindustrian DPN APINDO telah membentuk beberapa tim yang ikut memberikan masukan awal atas penyusunan 9 Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP), 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri terkait UU 7/2014 tentang Perdagangan. Proses penyusunan RPP, Perpres dan Permen tersebut belum berlanjut karena adanya pergantian kepemimpinan nasional di akhir tahun 2014. Daftar peraturan pelaksanaan UU Perdagangan yang harus diterbitkan disampaikan di bawah ini.

#### 1. Sembilan Peraturan Pemerintah (PP)

9 PERATURAN PEMERINTAH	
1.	Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang
2.	Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten
3.	Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor
4.	Perdagangan perbatasan
5.	Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan/atau standardisasi jasa

6.	Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik
7.	Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan anti dumping, dan tindakan imbalan
8.	Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional
9.	Sistem informasi perdagangan

#### 2. Empat Belas Peraturan Presiden (PerPres)

14 PERATURAN PRESIDEN	
1.	Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat
2.	Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan
3.	Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas
4.	Penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting
5.	Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting
6.	Barang yang diperdagangkan terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
7.	Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
8.	Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya
9.	Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan
10.	Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan luar negeri
11.	Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan
12.	Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang
13.	Komite Perdagangan Nasional
14.	Perdagangan barang dalam pengawasan



### 3. Dua Puluh Peraturan Menteri (PerMen)

20 PERATURAN MENTERI	
1.	Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia
2.	Distribusi barang
3.	Tata cara pendaftaran gudang
4.	Pencatatan administrasi barang
5.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
6.	Perdagangan antar pulau
7.	Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya
8.	Penetapan sebagai eksportir
9.	Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor
10.	Pengenal sebagai importir
11.	Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor
12.	Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru
13.	Perizinan ekspor dan impor
14.	Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor
15.	Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor
16.	Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang
17.	Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor
18.	Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang
19.	Tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia
20.	Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan

## Harapan

Merujuk pada aktivitas yang telah diupayakan oleh Bidang Perdagangan APINDO, pembangunan ekonomi diharapkan dapat berjalan lebih baik dalam iklim investasi yang semakin kondusif. Untuk melanjutkan kerjasama dengan kementerian perdagangan, APINDO akan memperpanjang nota kesepahaman dengan kementerian perdagangan untuk kerjasama perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

**AGUNG  
PODOMORO  
LAND**

**YOU DREAM IT, WE BUILD IT.**

021 290 34567  
www.agungpodomoroland.com

# Bidang Perindustrian





## Pendahuluan

Berdasarkan kebijakan makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter, sektor industri memegang peranan strategis dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Sebagai respon terhadap ketidakseimbangan eksternal Indonesia, Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan ekonomi pada 23 Agustus 2013 dalam:

- a. Mendorong ekspor dan mengurangi impor,
- b. Mempromosikan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menaikkan produktivitas dan

- c. Menyediakan peluang kerja selama kemungkinan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek

Untuk mencapai target pencapaian sektor industri dalam kurun waktu 2013 - 2014, APINDO telah terlibat aktif terkait pelbagai penyusunan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Keterlibatan APINDO diwujudkan melalui beberapa aktivitas di bawah ini.

## Kegiatan

### 1. Peninjauan, Penyusunan, dan Pembuatan Masukan Undang-Undang

#### 1.1. Penjabaran UU No.3 - 2014 tentang Perindustrian

Bersama Kementerian Perindustrian, APINDO menyusun peraturan perundang - undangan sebagai penjabaran dari UU Perindustrian yang terdiri dari:

No.	Penjabaran UU Perindustrian
1.	Satu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri
2.	Enam Belas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang dikelompokkan menjadi 6 Kelompok RPP
3.	Lima Rancangan Peraturan Presiden (R PerPres)
4.	Dua Belas Rancangan Peraturan Menteri (R PerMen)

Selama periode Februari-November 2014, APINDO bersama dengan Kementerian Perindustrian menyusun/merumuskan 6 Kelompok RPP, yang meliputi:

No.	6 Kelompok Rancangan Peraturan Pemerintah
1.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan yang bersifat Teknis untuk Bidang Industri Tertentu
2.	RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
3.	RPP tentang Sumber Daya Industri
4.	RPP tentang Pembangunan Saran dan Prasarana Industri
5.	RPP tentang Pemberdayaan Industri
6.	RPP tentang Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri

#### 1.2. Pembuatan UU No. 20 - 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Masukan-masukan APINDO telah diakomodasikan kedalam UU SDPK (Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian), seperti:



1. Badan Standarisasi Nasional sebagai pembuat Standard Nasional Indonesia
2. Komite Akreditasi Nasional memberikan Sertifikasi kepada Lembaga Penilai Kesesuaian
3. Kementerian sebagai Lembaga yang berwenang menetapkan SNI wajib
4. Lembaga Penilai Kesesuaian mengawasi implementasi SNI produk dan berhak melaporkan dugaan penyalah guna SNI kepada Pengadilan Tata Niaga

### 2. Pengembangan Produk Industri Berorientasi Ekspor

Berdasarkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap PDB dan sangat potensial untuk dikembangkan dan diperuntukkan untuk ekspor, meliputi:

- Industri Tekstil & Produk Tekstil dan;
- Industri Alas kaki (*Sport Shoes*), Kulit, dan Barang Kulit

#### a. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Tekstil & Produk Tekstil

No.	TEKSTIL & PRODUK TEKSTIL
1.	Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
2.	Peningkatan Kompetensi SDM Industri Tekstil dan Produk Tekstil
3.	Pemberian Insentif Fiskal (BMDTP)
4.	Penerapan Standar Industri TPT
5.	Fasilitasi Pusat Desain dan Fashion

#### b. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Alas Kaki (*Sport Shoes*), Kulit, dan Barang Kulit

No.	ALAS KAKI (SPORT SHOES), KULIT & BARANG KULIT
1.	Restrukturisasi Permesinan Industri Alas Kaki
2.	Peningkatan kompetensi SDM Industri Alas Kaki
3.	Peningkatan fasilitasi pusat desain alas kaki, kulit, dan barang kulit

- |    |   |
|----|---|
| 4. | Pengembangan merek lokal melalui kegiatan pameran |
| 5. | Penyediaan bahan baku                             |
| 6. | Penerapan Standar Industri Alas Kaki              |
| 7. | Mempertahankan penerapan BK                       |

### 3. Pengembangan Industri Substitusi Impor Bahan Baku & Barang Modal

#### a. Besi Baja

APINDO bersama dengan Kementerian dan asosiasi terkait saling berkoordinasi dan memberikan usulan terkait pembangunan Industri Besi Baja yang meliputi:

- Peningkatan penggunaan bahan baku produk dalam negeri. Sebagai upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dalam negeri, maka diperlukan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (peningkatan isian lokal)
- Perlindungan terkait pengamanan pasar dengan *safeguard*. Produk logam yang telah dikenakan *Safeguard* oleh Indonesia: Paku (2009), Kawat Seng (2011), Kawat Bindrat (2011), Tali Kawat Baja / *Wire Rope* (2011), Tali Kawat Baja / *Flattened Strand* (2011), Kawat Beronjong (2012), *Casing and Tubing Seamless* (2013), dan Baja Lapis Aluminium Seng / BjlAS (sedang dalam tahap penyelidikan KPPI).
- Perlindungan terkait pengamanan pasar dengan *anti dumping*. Produk logam yang telah dikenakan *anti dumping* oleh Indonesia :
  1. HRC (China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand) tahun 2008
  2. HRC (Republik Korea dan Malaysia) tahun 2011
  3. H,I Section (Republik Rakyat Tiongkok) tahun 2010
  4. HRP (RR Tiongkok, Singapura dan Ukraina) tahun 2012
  5. CRC (Jepang, Korea, RRT, Vietnam) tahun 2013
  6. Baja Lembaran Lapis Timah (Korea, RRT, China dan Taiwan), sedang penyelidikan KADI



- Promosi Investasi di Indonesia. Dilakukan promosi investasi dalam rangka pengembangan industri secara *upstream* dan/atau *downstream* (industri hulu, antara dan hilir).
- Insentif Fiskal *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*. Usulan pemanfaatan *tax holiday* dan *tax allowance* dapat diberikan juga dalam rangka perluasan dan /atau peningkatkan teknologi.

#### b. Kimia Dasar dan Barang Kimia

APINDO juga bekerjasama dengan Kementerian dan asosiasi terkait untuk berkoordinasi dan memberikan usulan terkait pembangunan Industri Kimia Dasar dan Barang Kimia, khususnya dalam hal:

- Perlindungan industri dalam negeri  
Dalam rangka perlindungan industri dalam negeri, muncul usulan kenaikan tarif BM dari MFN bagi produk-produk tertentu menjadi 5-15%.
- Penataan importir (IP, IT, dan PI)  
Penataan importir dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan cara Verifikasi Teknis oleh Lembaga Independen.
- Perluasan dan diversifikasi produk dengan pemberian *Tax Holiday* dan *Tax Allowance* :
  1. Prioritas kelompok 1 (nilai importasinya diatas 100 Juta US\$) fokus terhadap industri yang menghasilkan P-xylene, Ethylene, Polypropylene, ethanediol dapat diusulkan untuk mendapatkan fasilitas *Tax Holiday*.
  2. Prioritas kelompok 2 (nilai importasinya diatas 50 sampai dengan 100 Juta US\$) fokus terhadap industri yang menghasilkan Methanol (*methyl alcohol*) dapat diusulkan untuk mendapatkan fasilitas *Tax Allowance*.
  3. Mengupayakan pengoperasian kembali PT. Polytama oleh PT. Pertamina di Balongan (produksi polypropylene)
  4. Mendorong upaya perluasan oleh produsen eksisting.
- Pengembangan klaster industri Petrokimia (jangka panjang).  
Memfasilitasi pembangunan pabrik pengolah nafta (*NaphthaCracker*) di Cilegon dan memfasilitasi pengembangan industri Methanol to Ofelin (klaster ofelin, C-1) yang berbasis gas bumi di Teluk Bintuni, Papua Barat (perlu jaminan alokasi gas bumi sebesar 240 mmscfd).

## Harapan

Mengacu pada Laporan Kegiatan Usaha Bidang Industri Tahun 2014, pengembangan industri pemerintah lebih diarahkan kepada industri padat tenaga kerja sebagai penggerak perekonomian negara. Oleh karena itu, APINDO sebagai organisasi yang aktif sekaligus terlibat langsung dalam setiap kebijakan pemerintah

khususnya Kementerian Perindustrian dapat membantu merealisasikan peningkatan produktivitas industri besar dan usaha kecil menengah. APINDO juga diharapkan memberi kontribusi nyata dalam program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Indonesia.



# Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan

**APINDO TRAINING CENTER (ATC)**





Terlahir dari semangat dan idealisme para ketua DPN Apindo atas peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui proses pembelajaran terus menerus, PT Pusat Studi Apindo (PSA), dengan merek dagang Apindo Training Center (ATC) dibentuk pada 28 Januari 2010.

Visi PSA adalah menjadi *“center of excellence for human capital development in Indonesia”*, diwujudkan dengan cara :

- Mengembangkan kompetensi pelaku hubungan industrial di Indonesia
- Melakukan riset terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia
- Menyediakan pelayanan terbaik untuk meningkatkan praktek pengembangan human capital di Indonesia

Metamorfosis Pusat Studi Apindo dari organisasi non-profit menjadi organisasi profit berbentuk PT dilakukan pada tahun 2013- 2014. Perubahan ini membawa dampak positif terhadap ATC untuk memasuki tatanan dunia ketenagakerjaan nasional dengan menyediakan berbagai jawaban dan alternatif solusi atas ketidakpastian dan kompleksitas dunia perburuhan masa kini dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang.

Skenario pengembangan kompetensi sumber daya manusia pelaku hubungan industrial terpadu versi ATC dirancang secara akurat dan berbasis riset terapan di tempat kerja. Fleksibilitas ATC bekerja sama dengan seluruh pelaku hubungan industrial menempatkan ATC di lini terdepan pembangunan hubungan industrial untuk mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi nasional yang kondusif dan berkesinambungan.



**sekilasatc**



### Board of Commision :

Sofjan Wanandi  
Suryadi Sasmita  
Victor Hartono

### Board of Executive :

FX Sri Martono  
Franky Sibarani  
Sanny Iskandar  
M. Aditya Warman  
Iftida Yasar

### Excellent Team :

#### **General Manager :**

Henricus Punto Wicaksana

#### **Program Division Head :**

Zukra Budi Utama

#### **Marketing Division Head :**

Dammara Salam

#### **Operation & GA Dept Head :**

Gregorius Triyoga AP

#### **Strategic Planning :**

Jauhar Ismail

#### **Finance & Accounting :**

Priandoko

#### **Customer Relations :**

Mariety Ruth Siahaan

#### **Knowledge Managament Specialist :**

Adisti Hapsari

#### **Product & Sillabus Analyst :**

Made Dwi Mas Utami

#### **Operation & Training Support :**

Leonardo Didit Siswanto



## Kegiatan

Senantiasa fokus mengemban mimpi menjadi sebuah “*center of excellence for human capital development in Indonesia*”, tahun 2014 ini Apindo Training Center telah melaksanakan berbagai *training regular, in house training*, maupun membuat terobosan bentuk training lainnya yang diharapkan mampu menjawab tantangan terkini kebutuhan Hubungan Industrial di Indonesia.

### I. REGULER TRAINING

#### 1. Outsourcing Management for Beginners

*Outsourcing Management for Beginners* merupakan bagian dari training Industrial Relation Class berjenjang. Program baru dari ini merupakan sebuah pelatihan dasar untuk para pemula yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai *outsourcing* management. Program ini dilaksanakan pada 18, 19, 25, 28 Februari 2014, dengan jumlah peserta sebanyak 25 peserta.

#### 2. Industrial Relation Trend 2014 Batch 1 & 2

*Industrial Relations Trend 2014* merupakan program baru yang ditawarkan oleh ATC untuk mempelajari dan memberi arahan bagaimana membaca trend hubungan industrial dan membuat *framework* sebagai alternatif solusi permasalahan hubungan Industrial. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) *batch* di tahun 2014, yaitu :

- Pada 26 - 27 Februari 2014, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Program ini dibuka oleh Ketua Umum DPN Apindo Sofjan Wanandi dan BOD ATC Sanny Iskandar. Materi disampaikan oleh Bob Azam dan M. Aditya Warman.
- Pada tanggal 10 - 11 Desember 2014 ATC menghadirkan kembali *Industrial Relations Trend 2014* dengan peserta 17 orang. Mengadakan Pembicara-pembicara *expert* dibidangnya.

#### 3. LKS Bipartit

Program ini merupakan pembekalan *framework* bagi para peserta. Diselenggarakan di Apindo Training Center pada 26 - 27 Maret 2014, dengan peserta sebanyak 19 Orang. Sebagian besar dari peserta ini merupakan manajemen dari perusahaan yang belum memiliki LKS Bipartit aktif.

#### 4. Speak Up ATC Forum

ATC pada 2014 melaksanakan *Speak Up* sebanyak 2 kali, yaitu :

- Tanggal 16 April 2014 dengan topik *update IR Outlook 2014*. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 150 peserta praktisi Hubungan Industrial dari berbagai perusahaan dan instansi pemerintah.
- Pada tanggal 1 Juli 2014 kembali ATC menyajikan forum *Speak Up* dengan tajuk “*Mimpi Besar Jaminan Kesehatan Nasional, Kepastian Jaminan vs Kepastian Penjara*“. Dalam batch ini diikuti oleh 450 praktisi Hubungan Industrial dari berbagai perusahaan dan instansi pemerintah. Program ini cukup menarik perhatian karena tepat dengan momentum pemberlakuan SJSN Kesehatan dan Ketenagakerjaan tahun 2014.

#### 5. Industrial Relation Certification Program angkatan XI dan XII

- IRCP angkatan XI dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Selasa sampai dengan Sabtu 22 - 27 April 2014. Program ini awalnya dihadiri oleh 15 peserta umum dan 1 orang peserta dari Fakultas Hukum.
- IRCP angkatan XII dilaksanakan pada tanggal 11 - 15 November 2014 di Fakultas Hukum UI Depok, peserta batch ini sebanyak 18 peserta.

#### 6. PKB for Advance

*PKB for Advance* merupakan program pembekalan bagi PIC IR di perusahaan dalam



mempersiapkan & menghadapi perundingan PKB. Training ini diadakan pada 3 - 4 Juni 2014 dengan jumlah peserta 13 orang.

### 7. Dispute Management for Intermediate

*Dispute Management for Beginners* bertujuan untuk membekali peserta dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setiap batch terdiri dari 4 kali pertemuan. Dua pertemuan pertama membahas mengenai teori-teori Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan dua pertemuan selanjutnya membahas mengenai studi kasus. Dilaksanakan pada tanggal 5, 13, 20, 27 Juni 2014, dihadiri oleh 10 peserta dari berbagai perusahaan.

### 8. BPJS Management

BPJS Management merupakan program gebrakan baru dari Apindo Training yang menawarkan *framework* dan *best practice* aplikasi ideal BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan. *Training* dilaksanakan pada 24-25 Juni 2014, dengan jumlah peserta sebanyak 8 orang.

### 9. Diskusi Tertutup : Diskusi tertutup bersama hakim Ad Hoc PHI

Diskusi Hakim Ad Hoc dilaksanakan di Apindo Training Center pada tanggal 28 November 2014 dengan peserta 16 orang, terdiri dari

8 Hakim Ad Hoc, 5 team *research*, Pembicara *expert* dibidangnya. Diskusi ini dilaksanakan bertujuan untuk melihat sudut pandang para hakim dari kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang dibedah.

### 10. Business Incubator

ATC menghadirkan program terbaru *Business Incubator* yang disiapkan untuk UKM dan para pebisnis yang akan mengembangkan bisnisnya kedepan. Program ini membahas mengenai bisnis trend masa depan serta mempelajari *business tension & business creative and result* yang dikemas selama 5 hari, pada tanggal 5 - 9 November 2014. Konsep pelatihan tidak hanya mempelajari teori saja tetapi juga melaksanakan *benchmark* ke perusahaan-perusahaan dan UKM yang sudah berkembang.

### 11. Short Course

Pelatihan terbaru ATC ini pada *batch 1* menawarkan tema Pedoman Praktis Implementasi SJSN Kesehatan. Program ini akan mempertajam pengetahuan peserta mengenai implementasi SJSN Kesehatan yang meliputi kepesertaan, iuran, payroll dan strategi selama 5 tahun kedepan pelaksanaan di perusahaan dan memasukkan ke dalam PKB atau PP. *Short Course* ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2014 diikuti oleh 24 peserta.







## II. INHOUSE TRAINING

### 1. IRODP Batch VIII

*Industrial Relations Officer Development Program* (IRODP) merupakan salah satu tipe training berjenjang kerjasama antara ATC dengan PT. Pertamina (persero). Program ini merupakan sebuah program pelatihan hubungan industrial *level officer* dimana target kompetensi yang diharapkan dapat tercapai adalah peserta mampu menjadi seorang staf Hubungan Industrial yang memiliki kemampuan antisipasi di tingkat administratif. Program ini telah mengalami beberapa perkembangan sejak pertama kali diselenggarakan. *In-Class training* dilaksanakan selama 5 (lima) hari bertempat di Pertamina Learning Center, Simpruk, pada 17-21 Maret 2014, dihadiri oleh 16 peserta.

### 2. IR Certification for PT. Toyota Motors Manufacturing Indonesia and PT. Astra Daihatsu Motors Suppliers

Industrial Relations Certification merupakan sebuah program yang cukup diminati oleh dunia hubungan industrial di Indonesia. Program sertifikasi ini kemudian dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan menjadi *taylor made* dan dilaksanakan khusus bagi internal perusahaan.

Kali ini PT. Toyota Motors Manufacturing Indonesia dan PT. Astra Daihatsu Motors melakukan pembinaan kepada para *suppliers*-nya terkait hubungan Industrial dengan

menggandeng ATC dalam menyelenggarakan sertifikasi IR yang telah dilaksanakan pada hari Senin - Jumat, 16 - 20 Juni 2014, dihadiri oleh 9 peserta.

### 3. LKS Bipartit Certification Program PT. Sapta Indra Sejati

Program ini merupakan pembekalan *framework* kemitraan bagi seluruh pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) PT. Sapta Indra Sejati yang diikuti oleh kurang lebih 30 orang peserta. Diselenggarakan di *Training Center* PT. Sapta Indra Sejati, Graha Sapta Indra, Jalan TB Simatupang Kav, Hari Senin - Selasa, 1 - 2 September 2014.

### 4. IRODP Batch IX

*Industrial Relations Officer Development Program* (IRODP) merupakan salah satu tipe *training* berjenjang kerjasama antara ATC dengan PT. Pertamina (persero). Program ini merupakan sebuah program pelatihan hubungan industrial *level officer* dimana target kompetensi yang diharapkan dapat tercapai adalah peserta mampu menjadi seorang staf Hubungan Industrial yang memiliki kemampuan antisipasi di tingkat administratif. Program ini telah mengalami beberapa perkembangan sejak pertama kali diselenggarakan. *In-Class training* dilaksanakan selama 5 (lima) hari bertempat di Hotel Ambhara, Jalan Iskandar Raya, Kebayoran Baru, 15 - 19 September 2014.







### III. SJSN KESEHATAN PROJECT

Fokus dari project ini adalah mengkaji secara mendalam pada area Regulasi serta Strategi Implementasi berdasarkan riset di lebih dari 100 perusahaan besar di Indonesia untuk :

1. Mendapatkan masukan ideal dalam membangun SJSN sebagai sebuah sistem.
2. Mendapatkan ukuran ideal dari kontribusi dan kepentingan masing-masing pihak dan memberikan hasil analisa besaran kontribusi masing-masing pihak dalam sistem SJSN ini berdasarkan kepada data-data yang didapat dari:
  - a. Negara-negara yang gagal dalam penerapan SJSN seperti Yunani, Detroit yang berdampak pada negara/kota dan Jepang yang berdampak terhadap perusahaan.
  - b. Negara-negara yang berhasil dalam menerapkan SJSN misalnya Jerman.
3. Mendapatkan rekomendasi sistem SJSN ter-integrasi dengan perbaikan kondisi hubungan industrial yang memperbaiki produktifitas secara menyeluruh berdasar hasil analisa perubahan signifikan sistem hubungan industrial yang mengiringi perubahan sistem SJSN dari negara yang gagal maupun berhasil dalam menerapkannya.
4. Mempersiapkan perusahaan untuk dapat merancang “*social security smart strategic planning*” yang mendukung produktifitas dan keberlangsungan usaha tanpa mengesampingkan peningkatan kesejahteraan bersama.

Rangkaian event di dalam SJSN Kesehatan Project ini meliputi :

#### • **Speak Up**

Program *Speak Up* ini dikemas sebagai sarana getting issues dari rangkaian Project SJSN Kesehatan yang dimulai dengan acara *Speak Up* dengan mengangkat tema “*Mimpi*

*Besar Jaminan Kesehatan Nasional Kepastian Jaminan Vs Kepastian Penjara*” adapun *key point* dari acara ini yaitu :

1. *Concern* dunia internasional tentang implementasi *social protection* di setiap negara
2. Amanah *International Labour Conference* tentang implementasi *social protection*
3. Bagaimana membangun produktivitas melalui Program SJSN
4. Bagaimana memaksimalkan program SJSN dengan Skema CoB, bagi perusahaan. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014, dihadiri oleh 450 orang peserta dan 10 Pembicara.

#### • **One Day Seminar**

*One Day Seminar* bertujuan untuk mengumpulkan data implementasi SJSN Kesehatan, membentuk framework awal atas pelaksanaan SJSN Kesehatan di tahun 2014 di Indonesia. Fokus dari acara *One Day Seminar* ini adalah mengkaji secara mendalam area regulasi serta strategi implementasi dengan melibatkan peserta secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang dibahas secara nyata dan akurat. *One Day Seminar* diadakan pada tanggal 19 Agustus 2014, diikuti oleh 55 orang peserta dan menghadirkan 6 pembicara di bagi dalam 2 sesi yaitu pagi dari jam 08 - 12.00 dan dilanjutkan pada pukul 13.00 - 17.00 WIB.

#### • **The 1<sup>st</sup> Indonesia Industrial Relations Conference 2014**

*The 1<sup>st</sup> Indonesia Industrial Relations Conference 2014* merupakan puncak dari rangkaian Project SJSN Kesehatan. Dalam konferensi ini pemahaman awal yang telah dibangun dalam acara *Speak Up* dan *One Day Seminar* dipertajam lagi untuk dapat mengeluarkan rekomendasi implementasi ideal SJSN guna diserahkan kepada Presiden RI.

#### • **SJSN Kesehatan Workshop**

*Workshop* ini merupakan kelanjutan dari *The 1<sup>st</sup> Indonesia Industrial Relations Conference 2014* SJSN Kesehatan. SJSN Kesehatan



Workshop dirancang untuk membantu peserta menyusun kebijakan SJSN Kesehatan di perusahaan berdasarkan hasil riset team ATC yang dipadupadankan dengan rekomendasi

*The 1<sup>st</sup> Indonesia IR Conference*. Program ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 November 2014 pelaksanaanselama 2 hari *full day* serta diikuti oleh 22 peserta.





## Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian & Pengembangan

### Kinerja ATC 2014

No	Judul	Jenis	Tanggal	Peserta	Mitra
1	Outsourcing Management for Beginners	Retail	18, 19, 25, 28 Februari 2014	25	Umum
2	Industrial Relation Trends 2014	Retail	24-25 Februari 2014	30	Umum
3	LKS Bipartit	Retail	26 - 27 Maret 2014	19	Umum
4	Speak Up ATC Forum	Talk Show	16-Apr-14	130	Umum-Gratis
5	Industrial Relation Officer Development Program	In - House	17- 21 Maret 2014	16	Pertamina
6	Industrial Relation Certification Program	Retail	22-27 april 2014	16	Umum
7	PKB for Advance	Retail	3 - 4 Juni 2014	13	Umum
8	Dispute Management for Intermediate	Retail	5, 13, 20, 27 Juni 2014	10	Umum
9	BPJS Management	Retail	24 - 25 Juni 2014	8	Umum
10	Speak Up ATC Forum	Talk Show	01-Jul-14	450	Umum-Gratis
11	One Day Seminar	Retail	19-Agust-14	55	Umum
12	Sosialisasi BPJS Project EJIP	Update	20-Agust-14	60	Kawasan EJIP - Gratis
13	Sosialisasi BPJS Project MM2100	Update	28-Agust-14	40	Kawasan MM2100 - Gratis
14	LKS Bipartit Certification Program PT. SIS	In - House	1-2 September 2014	30	PT. Sapta Indra Sejati
15	Sosialisasi BPJS - Members Gathering Apindo	Update	05-Sep-14	100	Members Gathering APINDO - Gratis
16	Sosialisasi BPJS ATSI ( Asosiasi Telekomunikasi Indonesia )	Update	09-Sep-14	35	Umum - Gratis
17	Sosialisasi BPJS UKM	Update	11-Sep-14	10	UKM - Gratis
18	Industrial Relation Officer Development Program	In - House	15-19 September 2014	19	Pertamina
19	Sosialisasi BPJS - KIIC	Update	18-Sep-14	70	Kawasan KIIC - Gratis
20	IR Conference	Retail	14 – 17 October 2014	260	Umum
21	Business Incubator	Retail	5 – 9 November 2014	15	Pengusaha Batik
22	Diskusi Hakim Ad Hoc	Update	28 November 2014	16	Hakim Ad Hoc
23	Industrial Relation Certification Program	Retail	11 – 15 November 2014	18	Umum
24	Workshop	Retail	19 – 20 November 2014	22	Umum
25	Short Course	Retail	03-Des-14	24	Umum
26	IR Trend	Retail	10 – 11 Desember 2014	17	Umum
<b>TOTAL</b>				<b>1505</b>	

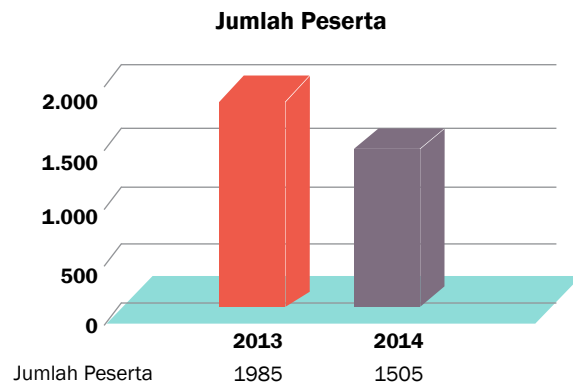


Selama tahun 2014 Apindo Training Center telah melakukan kurang lebih 26 (dua puluh enam) dengan jumlah partisipan 1505, kegiatan yang beragam baik skala kecil, skala menengah, maupun skala besar.

Dilihat dari perbandingan jenis training, ada peningkatan sebanyak 3 kegiatan dibandingkan tahun 2013. Namun apabila kita melihat

dari jumlah peserta, tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 480 peserta dari 1985 di 2013. Angka ini dipengaruhi oleh event yang mampu menarik peserta cukup banyak di 2014 mengalami penurunan penyelenggaraan yaitu 1 kali The 1<sup>st</sup> Indonesia Industrial Relations Conference serta Speak Up hanya 2 kali.

Tahun	2013	2014
Jumlah Peserta	1985	1505



Jenis Training	2013	2014
Training di Cabang	1	0
Management Sharing	3	0
In House	6	3
Retail	7	14
Talk Show	3	2
Up Date	3	7
Total	23	26



**KINERJA  
ATC  
2014**





## Target ATC 2015

Di penghujung tahun 2014 ATC telah membukukan kenaikan profit 200% dari profit di tahun 2013. ATC dengan semangat dan idealisme meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia berusaha untuk mencapai target yang lebih dari tahun sebelumnya.

Tahun 2015 ATC merencanakan akan menyelenggarakan program lebih banyak dibandingkan tahun 2014 untuk mendapatkan hasil pencapaian yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Berikut tabel rencana program ATC di tahun 2015 :

EVENT	EVENT	EVENT
<p><b>CONFERENCE &amp; CONVENTION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conference Minimum Wages and Productivity</li> <li>2. Convention SJSN Ketenagakerjaan- Jaminan Pensiun</li> </ol> <p><b>IRCP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IRCP XIII</li> <li>• IRCP XIV</li> <li>• IRCP XV</li> <li>• IRCP XVI</li> </ul> <p><b>ONE DAY SEMINAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKS Bipartit</li> <li>2. PKB</li> <li>3. Freedom Of Assosiation</li> <li>4. Hubungan Kerja</li> <li>5. Outsourcing</li> <li>6. Minimum Wages</li> <li>7. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>8. Mogok Kerja</li> </ol> <p><b>IR CLINIC</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Outsourcing</li> <li>2. LKS Bipartit</li> <li>3. Minimum Wages</li> </ol>	<p><b>WORKSHOP REASERCH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> <li>2. Hubungan Kerja</li> <li>3. Perjanjian Kerja Bersama</li> </ol> <p><b>IR STRATEGY CANVAS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IR Trend</li> <li>2. IR Strategyz4ed</li> <li>3. IR Measurement Speak Up</li> </ol> <p><b>FGD CASE STUDY</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mogok Kerja</li> <li>2. Freedom Of Assosiation</li> </ol> <p><b>EXECUTIVE SHARING</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Best Practice Companies</li> <li>2. Best Practice Companies</li> </ol>	<p><b>REASERCH</b> Wages and Productivity</p> <p><b>IR CAMP</b> IR Partnership</p> <p><b>SPEAK UP</b> Speak Up : Cost tinggi mana tahan !!! Speak Up Speak Up Speak Up Speak Up</p> <p><b>BUSINESS INCUBATOR</b> CSR Companies terkait UKM</p> <p><b>IN HOUSE TRAINING</b></p> <p>A. PERTAMINA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IRODP</li> <li>2. IRSDP</li> <li>3. IRMEP</li> </ol> <p>B. PAMA</p> <p>C. Danone Aqua</p> <p>D. Apac Inti Corpora</p>

OUR MARKET SEGMENT

AGRICULTURE



PALM OIL MILL



FLEET



WE SERVE YOU WITH OUR BEST



MARINE



STEEL MILL



SUGAR MILL



DIESEL ENGINE



HEAVY EQUIPMENT



PAPER MILL



OWN LUBES BLENDING PLANT

PT. PENLUBE OIL INDONESIA



RUKO RENATA SUTERA - KAV. 18A  
JL. JALUR SUTERA TIMUR 38 NO. 2 - ALAM SUTERA - TANGERANG 15144 +62 21 29 211 740 +62 21 29 211 783 - 4  
CUSTOMER.SUPPORT@PENLUBE.COM - WWW.PENLUBE.COM



MULTI BINTANG

# Estafet Kepemimpinan APINDO diserahkan kepada Bapak Hariyadi B. Sukamdani

---



Sesuai dengan Surat Keputusan nomor 005/SK-DPN APINDO/I/15 yang memperhatikan Rapat DPH DPN APINDO pada tanggal 14 November 2014, Rapat Pleno DPN APINDO pada 14 November 2014 serta Rapat Gabungan Dewan Pertimbangan dan DPN APINDO tanggal 24 November 2014, maka DPN APINDO memutuskan adanya pergantian antar waktu kepengurusan DPN APINDO masa bakti 2013 - 2018.

Salah satu keputusan tersebut adalah dengan mengangkat Dewan Pengurus DPN APINDO masa bakti 2013 - 2018, yaitu Bapak Hariyadi B. Sukamdani sebagai Ketua Umum, Bapak Suryadi Sasmita sebagai Wakil Ketua Umum, dan Bapak Sanny Iskandar sebagai

Sekretaris Umum DPN APINDO. Sementara itu, Bapak Sofjan Wanandi menjalankan tugas barunya sebagai Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI dan masih terus memberikan kontribusi bagi APINDO dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan APINDO.

Estafet kepemimpinan dari Bapak Sofjan Wanandi kepada Bapak Hariyadi B. Sukamdani penting dilaksanakan, dimana prioritas utama adalah melakukan sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha. Menurut Bapak Sofjan, APINDO akan menjadi partner terbaik pemerintah melalui pemberian masukan dan rekomendasi. Dengan demikian, APINDO bisa menggali lebih jauh terkait berbagai program pemerintah.

## DPN APINDO tingkatkan *capacity building* ke *Malaysian Employers Federation (MEF)*



The *Malaysian Employers Federation (MEF)* merupakan sebuah pusat organisasi pengusaha Malaysia yang menjadi forum konsultasi antar para anggota dalam isu Hubungan Industrial dan Pengembangan Manusia melalui pelbagai aktivitas seperti konsultasi, pelatihan, dan penelitian. MEF memainkan peranan yang signifikan dalam penyelesaian permasalahan Hubungan Industrial yang melibatkan perusahaan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari para staf MEF yang menjadi konsultan senior dalam Hubungan Industrial.

Sebagai dua asosiasi pengusaha, APINDO dan MEF dinilai memiliki pengaruh dan peran yang besar dalam perkembangan dunia usaha di masing-masing negara, baik Indonesia maupun Malaysia. APINDO menyadari perlunya peningkatan pengembangan kapasitas dan kualitas demi merepresentasikan kepentingan dunia usaha Indonesia di pelbagai lembaga nasional dan Internasional, termasuk di dalam

lembaga ketenagakerjaan. Pelayanan kepada Anggota Luar Biasa juga menjadi *stakeholder* penting dalam perkembangan APINDO.

Melalui program yang dilaksanakan pada 1 - 12 Desember 2014, APINDO memberikan kesempatan bagi para pengurus, manajemen, dan staf untuk mengenal MEF lebih dekat dalam rangka bertukar ide, gagasan, dan pengalaman dalam menjalankan asosiasi, khususnya dalam melayani anggota. Hasil dari program ini adalah penyusunan rekomendasi berupa *Action Plan* yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas staf DPN APINDO dan utamanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para anggota. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan masing-masing departemen, yaitu Departemen Informasi dan Layanan Anggota, Hukum dan Advokasi, Hubungan Internasional, Komunikasi, termasuk rekomendasi terkait Struktur Organisasi yang dirumuskan Pengurus dan Manajemen yang mengikuti program ini.



# Kegiatan Dewan Pimpinan Provinsi





## DPP APINDO ACEH

<b>Ketua</b>	<b>: H.M. Dahlan Sulaeman SE.</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Kenny Kurniadharna</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten /Kota</b>	<b>: 21 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 523 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 24 Perusahaan</b>

**B**eberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP APINDO Aceh selama tahun 2014 yaitu :

1. Pelantikan DPK APINDO Aceh Barat Daya masa bakti 2014-2018 serta LKS Tripartit Kab. Aceh Barat Daya oleh Ketua DPP APINDO Aceh (H. M. Dahlan Sulaiman, SE) pada tanggal 20 Pebruari 2014 di Aula Kantor Bupati Aceh Barat Daya, yang di hadiri Pengurus DPP APINDO Aceh, Pengurus DPK APINDO Abdy, Pemda Kab. Abdy, SP/SB Kab. Abdy, para Anggota DPK APINDO Abdy, Asosiasi/Lembaga dll.
2. APINDO Aceh Menolak Pembahasan Rancangan Qanun/Raqan Ketenagakerjaan di komisi F DPR Aceh yang dengan alasan tidak sesuai prosedur dan mengirimkan surat dengan nomor 017/APINDO- DPP/A/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 kepada:
  - a). Ketua DPR Aceh,



- b). Ketua Komisi F DPR Aceh dan
- c). Ketua Pansus Qanun Ketenagakerjaan DPR Aceh dengan tembusan kepada :
  - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia,
  - Gubernur Aceh,
  - DPN APINDO,
  - Kepala Disnakermobduk Aceh dan
  - Organisasi/Asosiasi/Himpunan/Gabungan Pengusaha di Wilayah Aceh. Surat Penolakan DPP APINDO Aceh ini dipublikasikan dalam beberapa surat kabar di Aceh.





# Kegiatan DPP APINDO



3. Pertemuan dengan IBC Malaysia di kantor APINDO Aceh yang dihadiri oleh Ketua (H.M. Dahlan Sulaiman, SE) beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Luar Biasa APINDO Aceh untuk membahas penanda tangan kerjasama investasi Budidaya Tiram, Rumput Laut dan Ikan antara Aceh/Indonesia dan Malaysia.



4. Sosialisasi bersama BPJS Ketenagakerjaan mengenai program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, acara ini diadakan di Hotel Mekkah Banda Aceh pada tanggal 19 dan 20 Juni 2014.

5. Sosialisasi Kebijakan Bidang Industri dan Perdagangan dalam mengembangkan Perekonomian Daerah Aceh bersama Pemerintah Daerah Aceh bidang Perekonomian pada tanggal 21 Agustus 2014 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

6. Liputan Khusus wawancara Ketua DPP APINDO Aceh (H.M. Dahlan Sulaiman, SE) dengan Surat Kabar Serambi Indonesia mengenai kebijakan-kebijakan di Aceh dalam pertumbuhan perekonomian dengan judul "Kalau Pemerintah Serius, Pengusaha Lebih Serius" pada tanggal 23 Agustus 2014.

7. Survey Daya Saing Usaha tahap 3 tahun 2014 di Provinsi Aceh bersama National University of Singapore – Asia Competitiveness Institute, dibuka oleh H.M. Dahlan Sulaiman, SE (Ketua DPP APINDO Aceh) serta dihadiri oleh 29 peserta dari berbagai bidang usaha di Aceh pada tanggal 26 Agustus 2014 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.

8. Mengikuti pertemuan tingkat Menteri IMT-GT ke 20 tanggal 11s/d 14 September 2014 di Hermes Hotel Palace Banda Aceh sebagai Delegasi Republik Indonesia dan unsur APINDO Aceh.

9. DPP APINDO Aceh menjadi nara sumber dalam acara bimbingan teknis Perencanaan tenaga kerja mikro di perusahaan pemerintah, dengan tema "Peranan APINDO Aceh dalam Perencanaan tenaga kerja mikro untuk Mendukung Informasi Pasar Kerja" pada tanggal 15 s/d 16 September 2014 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

10. DPP APINDO Aceh mengikuti Rapat Pokja Regulasi Tim Koordinasi MP3EI Aceh untuk membahas Regulasi Perizinan dan Investasi di Aceh, diselenggarakan pada tanggal 16 September 2014 di Bappeda Aceh.

11. Mengikuti Pelatihan Teknis Negosiasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pengusaha, SP/SB



untuk Angkatan I dan II pada tanggal 29 September 2014 s/d 01 Oktober 2014 dengan peserta dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh.

12. Rapat Pengurus DPP APINDO Aceh dalam pembahasan Road Map (Jangka Pendek dan Jangka Panjang) di Aceh, menyesuaikan dengan Program Kerja APINDO tahun 2014-2018.
13. Rapat Pembentukan Koperasi APINDO Aceh pada tanggal 01 Oktober 2014 dan 15 Oktober 2014
14. Mengikuti Pelatihan Teknis Negoisasi Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja Buruh SP/SB untuk Angkatan III dan IV di Hotel Mekkah pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2014.
15. Sosialisasi Pembinaan Pengembangan Produk Kreatif Daerah di Provinsi Aceh ada tanggal 06 November 2014 di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh.

16. Rapat Kelanjutan Pembentukan dan Pengesahan Koperasi APINDO Aceh yang dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi serta 4 (empat) orang mewakili Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Aceh di Kantor DPP APINDO Aceh pada tanggal 27 November 2014.



17. Mengikuti Sosialisasi Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dalam Rangka meningkatkan Pertumbuhan Industri di Provinsi Aceh melalui pemberian fasilitas di bidang Kepabeanaan dan Cukai tentang Kawasan Berikat pada tanggal 3 Desember 2014 di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
18. Pertemuan dengan *CEO President Dubai Port World* dalam Rangka Kerjasama Pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang untuk Percepatan *Maritime Transportation Connectivity* bersama Badan Investasi dan Promosi Aceh.



## Kegiatan DPP APINDO

19. Ketua DPP APINDO Aceh (H. M. Dahlan Sulaiman, SE) memfasilitasi perundingan bipartit antara Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSPPP-SPSI) Aceh mengenai pembahasan Upah Minimum Sektorial untuk Provinsi Aceh di kantor DPP APINDO Aceh yang juga dihadiri oleh Pengurus APINDO Aceh lainnya (Sekretaris, Wakil Ketua serta Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan) pada tanggal 11 Desember 2014.
20. Pada tanggal 12 Desember 2014 Ketua DPP APINDO Aceh (H. M. Dahlan Sulaiman, SE) melakukan Dialog di TVRI Aceh tentang Ekonomi Aceh 2015.
21. Tanggal 15 Desember 2014 Ketua DPP APINDO Aceh (H. M. Dahlan Sulaiman, SE) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh serta Ketua KSPI Aceh memaparkan tentang Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015.
22. Tanggal 30 Desember 2014 Pukul 12.00 wib di Bunda Resto Banda Aceh, Ketua DPP APINDO Aceh (H. M. Dahlan Sulaiman, SE), Sekretaris (Kenny Kurniadidarma, ST), Wakil Ketua (M. Yusuf Hambay, SE), Ketua Bidang Organisasi/Pembinaan Anggota dan Ketua Bidang Pengupahan/Jaminan Sosial bersama Kepala Wilayah BPJS Kesehatan serta jajarannya Cabang Banda Aceh melakukan Diskusi Bersama (Duk Pakat) untuk melakukan implementasi kedepan dari Nota Kesepahaman (22 Desember 2014) yang dilakukan DPN APINDO dan BPJS Kesehatan Pusat di Jakarta.

### I. Jumlah DPK dan Anggota APINDO di Provinsi aceh

Saat ini jumlah DP Kabupaten/Kota APINDO Aceh berjumlah 21 (dua puluh satu) daerah yaitu : Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya,

Sabang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Subussalam, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Utara, Lhoukseumawe, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Aceh Tengah dan Simeulue.

Dari 23 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh , ada 2 kabupaten yang belum terbentuk DPK APINDO yaitu : Aceh Selatan dan Gayo Lues.

## II. Peluang Investasi

### A. Sektor Pertambangan dan Energi;

1. Pembangkit Listrik Panas Bumi (Geothermal)  
Provinsi Aceh menyimpan potensi panas bumi yang cukup besar. Dua kawasan panas bumi yang tengah dikembangkan di Provinsi Aceh adalah wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Seulawah Agam, Aceh Besar dan WKP Jaboi, Pulau Weh.
2. Emas  
Provinsi Aceh banyak terdapat potensi lokasi penambangan emas yang tersebar di beberapa daerah, antara lain di Gunung Ujeung Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur masih digarap secara tradisional oleh masyarakat.
3. Biji Besi, di Kabupaten Aceh Besar
4. Timah Hitam (Pb)
5. Granite, di Kabupaten Aceh Selatan
6. Marmer, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Selatan
7. Magnesium, di Kabupaten Aceh dengan yang cukup banyak
8. Pabrik Semen, di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.

### B. Kelautan dan Perikanan

1. Perikanan tangkap lepas pantai
2. Budidaya rumput laut
3. Keramba ikan dan Lobster

### C. Pertanian dan Peternakan

1. Peternakan dan penggemukan sapi
2. Peternakan ayam potong dan ayam petelur.



## D. Perkebunan

1. Kopi
2. Coklat
3. Karet
4. Sawit
5. Nilam
6. Jagung
7. Kayu Jabon.

## E. Industri/Pengolahan

1. Pengolahan CPO
2. Pengolahan CPO ke barang jadi (minyak makan, margarine dan lain-lain)
3. Pengolahan Cacao
4. Pengolahan ikan dan tepung ikan
5. Pakan Ternak
6. Packing (kemasan).

## F. Pariwisata dan Hiburan

1. Pembangunan kawasan wisata
2. Pengolahan wisata air/sungai (kapal, resto terapung)
3. TV Lokal.

## G. Perhubungan

1. Maskapai penerbangan lokal (antar Kabupaten dan Provinsi)
2. Perhubungan lintas laut

## H. Perdagangan dan Ritel

1. Mall di Kota Banda Aceh, Lhoukseumawe dan Langsa.

## DPP APINDO SUMATERA UTARA

<b>Ketua</b>	<b>: Parlindungan Purba</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>: Pratama</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 13 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 1233 Perusahaan</b>

**D**ewan Pimpinan Provinsi APINDO Sumatera Utara (DPP-SUMUT) merupakan salah satu DPP yang cukup aktif melakukan kegiatan di tahun 2014 dan berhasil dalam menetapkan UMP untuk tahun 2015 bersama dengan Serikat Pekerja dan Pemerintah daerah secara lancar, tertib dan aman, sehingga tidak menimbulkan gejolak dari para tenaga kerja / Serikat Pekerja yang ada di daerah Sumatera Utara dan khususnya kota Medan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP-SUMUT selama tahun 2014 antara lain :

### 1. Muskab & Pelantikan DPKAB Apindo Batubara Periode 2014-2019





## Kegiatan DPP APINDO

Musyawarah Kabupaten & Pelantikan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kab. Batu Bara tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2014 di kabupaten Batu Bara dengan acara menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban APINDO Kab. Batu Bara periode 2008-2013, Memilih Kepengurusan APINDO Kab. Batu Bara yang baru dan menyusun program kerja.

### 2. Perayaan Imlek Bersama DPP APINDO dengan Insan Media dan Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Sumatera Utara.

Perayaan Imlek tahun 2014 yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara dihadiri oleh Insan Media dan Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Sumatera Utara, dalam acara ini diadakan pula diskusi terbuka mengenai permasalahan pengupahan dan perburuhan yang ada di Sumatera Utara.

Perayaan Imlek bersama DPP APINDO dengan insan media dan serikat pekerja/buruh provinsi Sumatera Utara diadakan pada hari Senin, 3 Februari 2014 di Restoran Chun Yen Medan.



### 3. Sosialisasi Panduan Perilaku Pengusaha Bersih Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi jumlah, mutu dan tepat

waktu, diharapkan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat lebih efektif dan efisien, mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak, sehingga dapat berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dunia usaha pada umumnya.

Pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk itu lembaga Kemitraan dan Integritas bekerjasama dengan DPP APINDO Sumatera Utara mengadakan acara sosialisasi Panduan Perilaku Pengusaha BERSIH dalam bentuk sharing information dan menumbuhkan kesadaran dari pelaku pengadaan barang dan jasa (vendor/asosiasi) untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa yang bersih dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan, Partisipasi, akuntabilitas, efektif dan efisien, independensi, penegakan hukum dan keadilan.



### 4. Muskot & Pelantikan DPKOT APINDO Medan Periode 2014 - 2019

Menetapkan kebijaksanaan umum dan strategis DPKot APINDO Medan ke depan, mempersiapkan penyusunan garis-garis besar kebijakan organisasi dalam periode hunan 2014 - 2019. Muskot Ke-II Apindo Medan dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2014 di



Istana Koki Medan dan telah memilih Pengurus Baru DPKot APINDO Medan yang kemudian dilantik pada tanggal 26 Februari 2014 di Hotel Grand Aston Medan.



DPP APINDO-SUMUT berkerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Diskusi publik forum redaktur Sumut yang bertema Sinergitas Media dan Dunia Usaha mendukung Sumut maju dan bangkit, dengan dukungan peran media dalam menyampaikan pemberitaan yang baik dan membangun. Acara ini dilaksanakan di Istana Koki pada tanggal 24 April 2014.



## 6. Survey Daya Saing Usaha

## 5. Diskusi Publik Forum Redaktur Sumut "Sinergitas Media dan Dunia Usaha Mendukung Sumut Bangkit"





## Kegiatan DPP APINDO

Survey daya saing usaha yang diadakan di Medan tahun 2014 adalah merupakan survey daya saing usaha tahap ketiga yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumatera Utara dan DPN APINDO bekerjasama dengan *National University of Singapore (NUS) / Asia Competitiveness Institute (ACI)*. Acara ini dilaksanakan pada Hari Rabu, 18 Juni 2014 di Grand Aston Hotel Medan.

### 7. Diskusi Publik Forum Redaktur Sumut “Pro-Kontra Kenaikan Tarif Daya Listrik”

DPP APINDO Sumatera Utara bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan Diskusi publik forum redaktur Sumut dengan topik “Pro-Kontra Kenaikan Tarif Daya Listrik”. Dalam diskusi dibahas dampak kenaikan tarif listrik terhadap masyarakat maupun dunia usaha. Acara ini dilaksanakan di Istana Koki pada tanggal 4 Juli 2014 dan dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama dengan anak-anak Panti Asuhan (Yatim Piatu).



### 8. Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)



Sesuai dengan Undang-undang RI No.24 Tahun 2011 dimana BPJS sebagai penyelenggara Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) didalamnya diatur Pasal 10 huruf g yaitu memberikan informasi mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial kepada Peserta dan Masyarakat.

BPJS Kesehatan KCU Medan bersama dengan Dewan Pengurus Provinsi (DPP) APINDO Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Pekerja dan Pemberi Kerja. Acara Sosialisasi ini diadakan pada Hari Kamis, 14 Agustus 2014 di Grand Aston Hotel Medan dihadiri oleh anggota dan pengurus DPP APINDO SUMUT.

### 9. Bantuan Kemanusiaan APINDO Sumatera Utara untuk Musibah Meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo





DPP APINDO Sumatera Utara bersama dengan DPD RI pada Hari Minggu, 12 Oktober 2014 menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk musibah meletusnya gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang diterima oleh pemerintahan daerah Kabupaten Karo.

sangat keberatan dan menyampaikan agar Direktur utama KIM mencabut keputusan tersebut.

## 10. Pertemuan APINDO Sumut, Organda dan Manajemen KIM

Pertemuan yang dilaksanakan pada Hari Senin, 15 Desember 2014 ini membahas pemberlakuan sistem pas masuk kendaraan berbayar di Kawasan Industri Medan (KIM). APINDO SUMUT bersama ORGANDA SUMUT menyatakan



## DPP APINDO RIAU

<b>Ketua</b>	<b>: Helfried Sitompul</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Peri Akri</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kab. / kota</b>	<b>: 10 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 183 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 121 Perusahaan</b>

**D**PP APINDO RIAU sangat memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya, oleh karena itu bidang advokasi dan pelayanan menjadi konsentrasi dan perhatian khusus dari pengurus DPP APINDO RIAU untuk dapat memberikan pelayanan dan bantuan yang terbaik khususnya kepada anggota

dari DPP APINDO RIAU yang berjumlah sekitar 304 perusahaan.

APINDO Riau memiliki tim layanan / advokasi yang kompeten, memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada anggota dan non anggota.



Ketua Tim advokasi DPP APINDO RIAU  
Bapak Abdul Muthalib Sembiring



Tim layanan dan advokasi DPP RIAU siap melayani anggota dan non anggota



# Kegiatan DPP APINDO



Dalam rangka pendampingan dan pemberdayaan anggota, pengurus APINDO RIAU mengadakan Pertemuan dengan management PT CPI berkaitan tindak lanjut permasalahan yang dihadapi perusahaan

Beberapa kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh DPP APINDO RIAU selama tahun 2014 antara lain :

1. Halal Bihalal dan Silaturahmi DPP APINDO RIAU bersama stakeholders di Propinsi Riau yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau H. Arsyad Juliandi Rahman, Kepala SKK MIGAS Sumbagut Bahari Abbas, Kapolda Riau, Danlanud Riau, Dandempom 1/3, dan Kadisnakertransduk Riau.



2. Diskusi mengenai Permenakertrans No.19 tahun 2012. Acara ini diadakan di Pekanbaru dengan menghadirkan pembicara Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPN APINDO, Ibu Endang Susilowati dan Hakim Ad Hoc unsur APINDO di Mahkamah Agung, Bapak Horadin Saragih.





3. Dalam forum Members Gathering diadakan acara Eksaminasi Putusan di pengadilan Hubungan Industrial Riau, dengan menghadirkan pembicara : Ketua Tim Advokasi DPP RIAU : H. Abdul Muthalib Sembiring dan Hakim Ad Hoc unsur APINDO di PHI Riau : Tumpak Tinambunan dan Isna Fatimah.



4. DPP APINDO RIAU mengadakan acara Coffee Morning bersama dengan para stakeholders di Propinsi Riau.



5. Beberapa kunjungan kerja yang dilakukan ketua DPP APINDO RIAU, Helfried Sitompul selama tahun 2014 antara lain mengunjungi: Kapolda Riau , Danrem 031 Wirabima, Kepala Pengadilan Negeri Riau, Kepala Pengadilan Tinggi Riau, Kepala SKK Migas Sumbangut, Ketua PWI RIAU dan Tokoh Masyarakat Riau, dimana bertujuan untuk bersilaturahmi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan tokoh dan pimpinan daerah di Propinsi Riau.



Mengunjungi Kapolda Riau



## Kegiatan DPP APINDO



Mengunjungi Danrem 031/Wirabima



Mengunjungi Kepala SKK Migas Sumbagut



Mengunjungi Kepala PN Pekanbaru



Mengunjungi Tokoh Masyarakat Riau

## DPP APINDO LAMPUNG

<b>Ketua</b>	<b>: Yusuf Kohar</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>: Ridwan Hasyim</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 6 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 428 Perusahaan</b>

**D**PP APINDO Lampung merupakan salah satu DPP yang cukup aktif mengadakan koordinasi dengan DPKabupaten / Kota yang ada di wilayah propinsi.

DPP Propinsi Lampung mengadakan koordinasi dalam rangka konsolidasi dan

sosialisasi serta memberikan informasi kepada anggota DPP Lampung dengan tujuan agar anggota cepat menerima informasi atau peraturan yang dirasa perlu bagi semua anggota.

Beberapa Kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP APINDO Lampung selama tahun 2014 :



1. Rapat Koordinasi yang diprakarsai oleh DPP dan DPK Lampung beserta Anggota dalam rangka persiapan pertemuan dengan Pemerintah Propinsi Lampung, acara ini diadakan pada tanggal 7 Januari 2014
2. Berpartisipasi dan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Rakerkonas APINDO ke 25 di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 14 - 15 Maret 2014.
3. Mengadakan *Members Gathering* pada tanggal 26 Juni 2014, guna mencari pemecahan masalah-masalah dunia usaha yang ada di Propinsi Lampung bersama dengan seluruh pengurus dan anggota DPP APINDO Lampung.
4. Mengadakan Dialog dan temu wicara tentang daya saing usaha di Propinsi Lampung dan ASEAN bersama Asia Competitiveness Institute (ACI Singapore). Acara ini diadakan pada tanggal 14 Agustus 2015 dan diikuti oleh pengurus dan anggota DPP APINDO Lampung.
5. Rapat Koordinasi dalam rangka persiapan Musprop APINDO Lampung ke VI tahun 2014 pada tanggal 24 Oktober 2014
6. MUSPROP DPP APINDO Lampung yang diadakan di Hotel Sheraton kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Desember 2014, dengan agenda acara memilih dan menetapkan pengurus baru DPP APINDO Lampung dan hasilnya telah terpilih kembali Bapak Yusuf Kohar sebagai ketua DPP APINDO Lampung periode 2014 - 2019.

## DPP APINDO SUMATERA SELATAN

<b>Ketua</b>	<b>: Sumarjono Saragih</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Harry Hartanto</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota</b>	<b>: 1 Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 72 Perusahaan</b>

Beberapa Kegiatan yang telah dilakukan DPP Sumsel di tahun 2014 :

### 1. Perayaan Hari Buruh 1 Mei - Deklarasi Harmoni Bipartit

DPP APINDO Sumsel bekerja sama dengan GAPKI Sumsel bersama seluruh Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan silaturahmi APINDO - GAPKI - SP/SB Sumatera Selatan dalam rangka Hari Buruh 1 Mei 2014. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP APINDO Sumsel ini dilaksanakan di Hotel Classie pada tanggal 30 April 2014.



Silaturahmi APINDO-GAPKI-SP/SB Sumsel



## Kegiatan DPP APINDO



Penandatanganan Deklarasi Harmoni Bipartit

Pada acara tersebut ditandatangani bersama “*Deklarasi Harmoni Bipartit*” antara DPP APINDO Sumsel dengan seluruh Serikat Pekerja/Buruh yang terdiri 4 (empat) SP/SB dengan tujuan utama untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

### 2. Membentuk Forum Komunikasi Dunia Usaha (FKADU) Sumatera Selatan

DPP APINDO Sumsel menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Dunia Usaha (FKADU) Sumatera Selatan. Forum ini terdiri dari APINDO dan Asosiasi-Asosiasi Sektoral di Sumatera Selatan. Sampai dengan saat ini terdapat 13 Asosiasi yang bergabung di FKADU Sumsel.

Tujuan APINDO menginisiasi terbentuknya FKADU adalah untuk membangun kerjasama dan untuk menyuarakan suara pelaku usaha secara bersama-sama.



Audiensi FKADU Sumsel dengan Gubernur Sumsel membahas UMP Sumsel 2015

Salah satu langkah kongrit FKADU adalah audiensi dengan Gubernur Sumsel untuk memberikan masukan perihal UMP 2015 Sumsel yang diwacanakan untuk direvisi oleh Gubernur pasca kenaikan harga BBM. Masukan tersebut diterima oleh Gubernur dengan statement di media cetak, bahwa Pemerintah Provinsi tidak akan merevisi SK UMP 2015 yang telah diterbitkan.

### 3. Audiensi

- Audiensi dengan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 30 September 2014. Pada audiensi ini, DPP APINDO Sumsel mengajak beberapa Asosiasi Sektor dan perwakilan pelaku usaha di berbagai sektor, untuk menyampaikan perkembangan dunia usaha di Sumatera Selatan.
- Audiensi dengan Bupati Banyu Asin tanggal 19 Mei 2014 di Kabupaten Banyu Asin



Audiensi DPP APINDO Sumsel dan Asosiasi-Asosiasi Sektoral Sumsel dengan Gubernur Sumsel



Audiensi DPP APINDO Sumsel dengan Kadisnakertrans Kabupaten Banyu Asin



Audiensi DPP APINDO Sumsel dengan DPD IWAPI Sumsel

- Audiensi dengan Kadisnakertrans Kabupaten Banyu Asin tanggal 8 Mei 2014 di Kantor Sekretariat DPP APINDO Sumsel.
- Audiensi dengan DPD IWAPI Sumsel tanggal 4 November 2014 di Kantor Sekretariat DPP APINDO Sumsel

#### 4. Pembinaan UKM/IKM dan Penandatanganan MOU di Kementerian Perindustrian

DPPAPINDOSumsel berupaya untuk membina UKM/IKM pandai besi yang memproduksi alat-alat panen kelapa sawit dalam aspek pemasaran yang akan bekerja sama dengan GAPKI Sumsel (Asosiasi Kelapa Sawit).

Tanggal 27 Oktober 2014 pada acara Sriwijaya Expo di Kementerian Perindustrian di Jakarta dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Wilayah I Kementerian



Kunjungan DPP APINDO Sumsel ke Sentra IKM Pandai Besi di Kab. Ogan Ilir



Penandatanganan Nota kesepahaman antara Kemenperind RI, Disperindag Sumsel dan DPP APINDO Sumsel

Perindustrian RI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Selatan dan DPP APINDO Sumsel.

#### 5. Aktif Memperjuangkan UMP 2015

- UMP 2015 telah ditetapkan melalui SK Gubernur No.675/KPTS/Disnakertrans/2014 sebesar Rp. 1.974.346,- sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan dan pencapaian KHL adalah 100%.
- Dengan alasan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), pihak buruh meminta UMP ditinjau ulang, dimulai dengan melaksanakan survey ulang KHL di 9 Kabupaten/Kota.
- APINDO menolak survey ulang dan ditinjau ulangnya UMP dengan beberapa pertimbangan.
- Survey ulang tetap dilaksanakan tanpa unsur APINDO, dan dalam rapat Dewan Pengupahan yang notabene tanpa unsur APINDO tersebut disepakati rekomendasi UMP revisi sebesar Rp. 2.213.001,-
- APINDO secara tertulis dan lisan langsung menyampaikan keberatan dan pendapat perihal tersebut kepada Gubernur yang juga didukung oleh FKADU (Forum Komunikasi Dunia Usaha) Sumsel.
- Pernyataan Gubernur di media cetak pada tanggal 31 Desember 2014 (setelah pertemuan dengan APINDO dan FKADU) adalah bahwa Pemerintah tidak akan merevisi UMP yang telah ditetapkan.



## Kegiatan DPP APINDO

- Gelombang tuntutan dari buruh melalui aksi unjuk rasa tetap menuntut agar Pemerintah menepati janji untuk menetapkan angka UMP revisi meskipun pemerintah Pusat telah menurunkan harga BBM.
- Pemerintah mengundang APINDO untuk membahas hal tersebut bersama pihak Serikat Pekerja/Buruh. Sikap APINDO tetap sama yaitu tidak menyetujui revisi SK UMP dengan pertimbangan:
  - a. Harga BBM telah diturunkan, harga tarif angkutan dan bahan pokok juga akan diturunkan.
  - b. Untuk menjaga wibawa pemerintah di hadapan investor dan untuk kepastian hukum bagi para investor.
  - c. Ruang untuk perubahan dapat dilakukan melalui perundingan upah sektoral.

### 6. Aktif sebagai narasumber diberbagai kegiatan di Sumatera Selatan

DPP APINDO Sumsel aktif menjadi narasumber di beberapa kegiatan, antara lain:

- Kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) Bank Indonesia.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro bagi Aparatur Pemerintah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- Wawancara Sriwijaya TV tentang perkembangan dunia usaha di Sumatera Selatan.

### 7. Forum Diskusi SDM/HR Anggota



Forum Diskusi SDM/HR Anggota DPP APINDO Sumsel dengan Narasumber Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Unsur APINDO Sumsel

### 8. Sosialisasi BPJS Kesehatan



Sosialisasi BPJS Kesehatan untuk Anggota DPP APINDO Sumsel; Kerjasama DPP APINDO Sumsel dengan BPJS Kesehatan

### 9. Survey Daya Saing Usaha ACI Singapore – APINDO

Sebagai bentuk kerjasama dengan ACI Singapore, APINDO Sumsel menjadi salah satu provinsi yang menjadi responden pada Survey Daya Saing Usaha oleh Tim ACI Singapore secara langsung dengan anggota DPP APINDO Sumsel. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Palembang pada 12 Juni 2014.



Survey Daya Saing Usaha Hotel Grand Zuri Palembang, tanggal 12 Juni 2014

### 10. Rapat Pengurus DPP APINDO Sumatera Selatan

Beberapa rapat Pengurus dan Anggota dilaksanakan selama tahun 2014, dengan agenda antara lain:



- Pembahasan program kegiatan DPP APINDO Sumsel.
- Melanjutkan Inisiasi pembentukan DPK (Kabupaten/Kota: OKU, Muara Enim, OKI)
- Pembahasan mengenai UMP Sumsel Tahun 2015
- Isu lain-lain

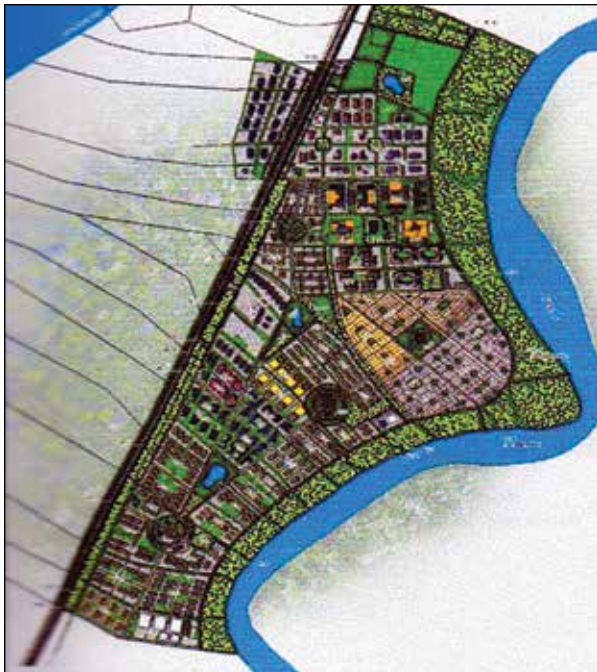
## 11. Menghadiri Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh Pihak Luar

DPP APINDO Sumsel selalu aktif dalam setiap kehadiran rapat/pertemuan/kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.

## PROSPEK INVESTASI DI SUMATERA SELATAN

Dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat seluas ±300 Ha.

### 1. Maket/peta konsep pengembangan tanjung api-api



### 2. Peran Swasta

- Menjalankan Core Bisnis pengembangan dan pengelolaan kawasan
- Menguasai bisnis penyediaan energi , pengelolaan air
- Limbah, sampah dan kontruksi bangunan



### 3. Port Development Plan

### 4. Peluang industri pengolahan

- Industri hilir produk karet
- industri hilir pengolahan kelapa sawit/CPO (*oleo chemical*, minyak goreng/margarin, bio diesel, dll)
- Power plant*
- Pengolahan limbah *replanting* kelapa sawit.

- Eco Industrial Park
- Pengembangan industri hilir kelapa sawit, karet, batubara
- Terintegrasi dengan jaringan jalan, kereta api, pelabuhan, dan pusat distribusi regional
- Pelayanan satu pintu



## DPP APINDO BANTEN

<b>Ketua</b>	<b>: Deddy Djunaedi</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Arwin Kusmanta</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota</b>	<b>: 7 Kabupaten/Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 535 Perusahaan</b>

Beberapa Kegiatan DPP APINDO Banten selama Tahun 2014 :

### 1. Musyawarah Propinsi Ke III APINDO Banten Tahun 2014

Setelah berakhirnya Kepengurusan DPP APINDO Provinsi Banten Masa Bakti 2008-2013, maka DPP APINDO Banten kembali menyelenggarakan Musyawarah Propinsi guna membentuk kepengurusan yang baru, dan acara tersebut diselenggarakan pada 29 Januari 2014 di Padang Golf Modernland, Tangerang - Banten.

Dalam Musprov III APINDO Banten ini, Bapak Deddy Djunaedi terpilih kembali sebagai Ketua dan Bpk. Arwin Kusmanta terpilih sebagai Sekretaris DPP APINDO Provinsi Banten Masa Bakti 2014 - 2019.



Foto bersama pengurus DPP APINDO Banten setelah pelantikan



Pelantikan ketua dan sekretaris DPP APINDO BANTEN yang telah terpilih periode 2014 - 2019 oleh Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO Bapak Anthony Hilman

### 2. Seminar Sehari BPJS

Pelaksanaan BPJS Kesehatan sudah diberlakukan mulai Per 1 Januari 2014, namun masih banyak perusahaan di Provinsi Banten khususnya Anggota APINDO yang ingin menanyakan terkait pendaftaran dan juga kendala dalam pelaksanaan BPJS tersebut. Sehingga DPP APINDO Provinsi Banten menyelenggarakan Seminar Sehari BPJS guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dari perusahaan dan memberikan informasi yang lebih lengkap terkait pelaksanaan BPJS.

Seminar Sehari BPJS ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Dirut BPJS Kesehatan dan juga Pakar Praktisi Kesehatan. Tema seminar adalah "Menyongsong Pelaksanaan BPJS Bagi Perusahaan Per 1 Januari 2015 dan Evaluasi Pelaksanaan BPJS Per-1 Januari 2014". Seminar ini diselenggarakan pada 12 Maret 2014 di RS Mayapada, Modernland - Tangerang.



Sosialisasi dan penjelasan mengenai BPJS Kesehatan dengan narasumber dari BPJS dan Kementerian Kesehatan Provinsi Banten

### 3. Pelantikan Kepengurusan DPP APINDO Provinsi Banten Masa Bakti 2014 - 2019 dan Business Gathering APINDO - NHO

Musyawarah Provinsi Ke III APINDO Provinsi Banten telah sukses diselenggarakan pada 29 Januari 2014. Team Formatur terpilih telah melengkapi Susunan Kepengurusan DPP APINDO Provinsi Banten Masa Bakti 2014 - 2019. Untuk menetapkan susunan kepengurusan tersebut, maka diselenggarakan Pelantikan Kepengurusan DPP APINDO Provinsi Banten Masa Bakti 2014 - 2019 pada 2 April 2014 di Padang Golf Modernland, Tangerang Banten. Seusai Acara Pelantikan tersebut kemudian dilanjutkan Business Gathering Diskusi Panel Kerja sama APINDO - NHO dengan tema “Kesiapan Dunia Usaha (APINDO) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”.



Pelaksanaan *Business Gathering* di Provinsi Banten dengan pembicara diantaranya Mr. Bjorn Delbaek dari NHO Norwegia.

### 4. Survey Daya Saing Usaha Tahap Ketiga Tahun 2014 ACI - APINDO Banten

Menindaklanjuti penandatanganan MOU antara DPN APINDO, DPP APINDO dengan *National University of Singapore* (NUS) / *Asia Competitiveness Institute* (ACI) di Singapore pada 26-27 November 2013, untuk penyelenggaraan Survey Daya Saing Usaha Tahap Ketiga Tahun 2014. Pada tahun 2012 dan 2013 Survey Daya Saing Usaha telah berhasil dilaksanakan oleh ACI dan DPP APINDO Banten. Tim Survey dari ACI Singapore hadir langsung kepada calon responden di masing-masing provinsi untuk mengadakan survey tersebut. Survey Daya Saing Usaha Tahap Ketiga Tahun 2014 di Provinsi Banten ini diselenggarakan pada 2 September 2014 di Hotel Grand Serpong, Tangerang, Banten, yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan Se-Banten selaku responden survey tersebut.

### 5. Pertemuan Konsolidasi Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten Unsur APINDO Se-Banten

Dalam rangka persiapan menghadapi UMK dan UMSK Tahun 2015, DPP APINDO Provinsi Banten menyelenggarakan Pertemuan Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten Unsur APINDO Se-Banten dengan tema “*Konsolidasi Pengupahan DPP APINDO Provinsi Banten Dalam Persiapan Menghadapi UMK dan UMSK 2015*”.

Konsolidasi Dewan Pengupahan yang berlangsung di Hotel Narita Cipondoh Kota Tangerang, pada tanggal 4 Juni 2014 dihadiri oleh Kabid Pengupahan Kemenakertrans RI, Ibu Ir. Dinar Titus J, MBA; Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Provinsi Banten, Bapak Ubaidillah; Pimpinan DPP Apindo Provinsi Banten; Dewan Pengupahan Kota, Kabupaten dan Provinsi Banten Unsur APINDO.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah Bahwa penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektorial mengacu kepada regulasi yang berlaku yaitu Permenaker No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum dan Inpres No. 9 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum. Besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten tidak



## Kegiatan DPP APINDO

boleh lebih dari besaran KHL di masing-masing Kota/Kabupaten.

Terkait Upah Minimum Sektor, Apindo tidak mempunyai wewenang dalam perundingan dan penetapan mengenai besaran Upah Minimum Sektor. Asosiasi di masing-masing Sektor yang mempunyai wewenang dalam perundingan dan penetapan mengenai besaran Upah Minimum Sektor, bersama dengan SP / SB di masing-masing sektor. Apindo hanya mempunyai wewenang sebatas melakukan penelitian mengenai Sektor Unggulan.



Narasumber sedang membacakan makalah dan memberikan penjelasan dihadapan Pengurus dan anggota dari DPP APINDO Banten mengenai UMK dan UMSK 2015

## DPP APINDO DKI JAKARTA

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Soeprayitno, MBA. MSc. Ph.D</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Danny Herwidodo</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 5 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 150 Perusahaan</b>

**K**egiatan utama yang dilakukan DPP APINDO DKI Jakarta sampai dengan saat ini tetap memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Anggota APINDO DKI Jakarta dan senantiasa memberikan konsultasi maupun informasi *update* yang didapat dari berbagai Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Menciptakan Hubungan Industrial yang kondusif dan harmonis dalam dunia usaha adalah salah satu peran DPP APINDO DKI Jakarta agar seluruh anggota APINDO DKI Jakarta merasakan manfaat yang nyata menjadi Anggota DPP APINDO DKI.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan DPP DKI Jakarta selama tahun 2014 :

### 1. Bidang Pengupahan

Dari tahun ke tahun proses penetapan UMP DKI Jakarta membutuhkan waktu yang

lama, cukup mengurus tenaga dan biaya serta mendapat tekanan dan hambatan dari pihak-pihak lain. Ketua DPP APINDO DKI Jakarta (Bpk. Soeprayitno) dan Anggota Dewan Pengupahan (Bapak Sanyoto AS, Bapak Bambang Adam, Bapak Nurjaman, Bapak Asrial Chaniago dan Bapak Kasturi) senantiasa berusaha bernegosiasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam menetapkan upah di DKI Jakarta.

Hasil yang didapat berdasarkan negosiasi secara rasional dunia usaha dan Serikat Pekerja yaitu kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2013, 2014 dan 2015 berkisar sekitar 11 - 15%.

### 2. Tripartit

Perwakilan DPP Apindo DKI Jakarta yang menjadi anggota Tripartit DKI Jakarta telah melakukan beberapa pembahasan/ kegiatan



antara lain :

- Kunjungan ke perusahaan-perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan *Outsourcing* dan PKWT
- Kunjungan lapangan ke perusahaan-perusahaan terhadap pelaksanaan LKS Bipartit
- Pembahasan strategi penetapan UMP yang lebih efisien & efektif dalam rangka menghindari terjadinya konflik2 pada saat penetapan UMP.
- Pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang memiliki Hubungan Industrial yang baik, dalam rangka memacu terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis di perusahaan DKI Jakarta.

### 3. Hubungan Industrial & Advokasi (HI & Advokasi)

Pengurusan Bidang HI & Advokasi (Bapak Edwan Hamidy Daulay, Bapak Herman Darmansyah dan Bapak Ari Supriadi) selalu memberikan konsultasi terkait masalah ketenagakerjaan di perusahaan anggota dan juga menjadi pendamping atau kuasa hukum atas kasus yang dialami oleh anggota DPP DKI Jakarta.

Dalam tahun 2014 team HI & Advokasi menjadi pendamping atau kuasa hukum bagi 5 perusahaan anggota di antaranya PT Kawasaki Motor Indonesia, PT MBPI, PT Citra Air, PT Mecosuprin Grafia, PT Chubb Safes Indonesia dan PT sinar Antjol, dalam rangka menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan tersebut.

### 4. Members gathering, Sosialisasi & pertemuan UMKM binaan APINDO DKI Jakarta

- Management Gathering tanggal 8 Mei 2014 di Gedung Pertemuan Cawang Kencana, Jakarta Timur dengan topik aktual yakni masalah UMSP DKI Jakarta Tahun 2014 dan Masalah Aplikasi Produktivitas dalam

Dimensi Upah, menghadirkan Narasumber Ibu Estiarty Haryani, Direktur Produktivitas dan Kewirausahaan Kementerian Tenaga Kerja RI dan Bapak Mustofa, Praktisi Produktivitas Unsur Pakar di Dewan Pengupahan Nasional RI.



- Pertemuan UMKN Binaan APINDO DKI Jakarta dibawah kepengurusan Ibu Renny Nurhadi, Ketua Bidang UKM, Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Acara telah terlaksana pada 16 September 2014 di Kediaman Ibu Renny Nurhadi dengan dihadiri lebih kurang 20 Anggota UMKM topik yang dibicarakan perihal isu terkait Gender dan topik UKM lainnya.



- Dengan terbitnya PERPRES No. 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, banyak muncul pertanyaan dari Anggota APINDO DKI Jakarta terkait proses pelaksanaannya dan untuk menanggapi



## Kegiatan DPP APINDO



pertanyaan serta memberikan informasi lebih lengkap lagi maka DPP APINDO DKI Jakarta telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional IV dengan mengadakan Members Gathering dan Sosialisasi BPJS Kesehatan pada tanggal 6 Oktober 2014 di Hotel Best Western Jakarta, acara ini dihadiri lebih kurang 100 peserta dengan menghadirkan Narasumber Bapak Oendrio, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional IV dan Bapak Soeprayitno, Ketua DPP APINDO DKI Jakarta.

- Masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh Anggota APINDO DKI Jakarta terkait proses pelaksanaan pendaftaran BPJS Kesehatan maka DPP APINDO DKI Jakarta perlu untuk mengadakan kembali Members Gathering tgl.

19 Desember 2014 membahas tentang BPJS Kesehatan dan juga UMSP DKI Jakarta 2015 dengan dihadiri lebih kurang 70 peserta dengan Narasumber Soeprayitno, Ph.D, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional & Ketua APINDO DKI Jakarta serta Bapak Hadi Broto, Disnakertrans DKI Jakarta. Selain itu informasi mengenai MOU antara APINDO dengan BPJS Kesehatan merupakan hal yang penting bagi anggota, yaitu penundaan aktivasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan bagi yang mempunyai masalah dengan COB dan FKTP.

### 5. Seleksi Hakim Ad Hoc Unsur Apindo DKI Jakarta

Sehubungan dengan telah pensiunnya 2 (dua) orang Hakim ad hoc PHI unsur Apindo di PHI DKI Jakarta yaitu Sdr. M. Sinufa Zebua, SH (NPU 02/CHA/DKI) pada bulan Agustus 2013 dan Sdr. Sri Razziaty Ischaja, SIP,SH,MH (NPU 0180/CHA/DKI) pada bulan Mei 2014 yang sampai dengan saat ini belum ada penggantinya, sehingga Hakim Ad Hoc unsur Apindo di PHI DKI Jakarta saat ini hanya ada 2 orang yaitu Bapak Supono, SH dan Bapak Sweden Simarmata, SH sementara Hakim Ad Hoc unsur SP berjumlah 5 orang, yang berakibat kepada terganggunya penanganan kasus yang sangat banyak dan beban yang tidak berimbang dari Hakim ad Hoc PHI yang ada pada saat ini, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Hakim ad hoc PHI unsur Apindo di PHI DKI Jakarta telah dilakukan upaya perekrutan calon Hakim Ad Hoc dari para anggota.

Sosialisasi informasi telah dilakukan pada tanggal 16 September 2014 dan telah mendaftar ke Sekretariat APINDO DKI Jakarta. sebanyak 7 (tujuh) calon Hakim Ad Hoc. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses wawancara dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.



## DPP APINDO JAWA BARAT

<b>Ketua</b>	<b>: Dedy Widjaja</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Rudi Martono</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/ Kota</b>	<b>: 27 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 1.950 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 38 Perusahaan</b>

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk terpadat dari seluruh propinsi yang ada di Indonesia, karena itu banyak investor yang ingin menanamkan modal dan memasarkan produk industrinya di propinsi Jawa Barat, selain itu banyak industri padat karya yang membuka usahanya di Propinsi Jawa Barat karena jumlah tenaga kerja yang besar, misalnya industri tekstil dan produk tekstil, industri manufaktur dan industri lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja.

Beberapa sektor industri di Jawa Barat selama tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebelumnya, diantaranya: sektor industri manufaktur dan sektor pertanian, sementara sektor perdagangan, hotel dan restaurant mengalami peningkatan.

Di Sektor Infrastruktur Pemerintah Pusat dan Pemprov Jawa Barat akan mempercepat pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati. Pembangunan bandara ini masih terkendala dengan relokasi sungai, sinkronisasi landasan pacu dan interkoneksi dengan pembangunan tol agar tercipta integrasi infrastruktur yang memadai. Rencananya pemerintah juga akan menyambungkan pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan dengan Bandar Udara Internasional Kertajati yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara bandara dengan penduduk sekitar. Apabila bandara dan jalan tol sudah rampung, pemerintah memprediksikan Jawa Barat akan memiliki aksesibilitas yang baik, yang nantinya akan mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

### BEBERAPA KEGIATAN PENTING DPP APINDO JAWA BARAT SELAMA TAHUN 2014 :

#### 1. Audiensi dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat

Audiensi dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2014, bertempat di Kantor OJK Regional II Jawa Barat, Jl. Braga No. 108 Bandung.

Pada kesempatan audiensi tersebut, Bapak Dedy Widjaja selaku Ketua DPP APINDO Jawa Barat, menyatakan memberikan dukungan kepada OJK dalam melaksanakan tugasnya yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan di Propinsi Jawa Barat.

Maksud dan tujuan dari acara audiensi tersebut adalah :

- Perkenalan dan silaturahmi DPP APINDO Jawa Barat dengan Kepala OJK Regional II Jawa Barat, mengawali terjalinnya sinergitas peran DPP APINDO Jawa Barat dengan OJK Regional II Jawa Barat.



Pengurus DPP APINDO mendengarkan pemaparan dari team OJK Jabar



## Kegiatan DPP APINDO



DPP APINDO Jabar dan pimpinan OJK Jabar mengadakan foto bersama

- b. Saling bertukar pikiran dan informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas masing-masing, dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Barat.

### 2. Audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan

Audiensi dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2014, bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Barat, Jl. PHH Mustafa No. 39 Bandung.

Dalam Pasal 26 d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM), yang selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero). BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat hingga saat ini mengelola sekitar 25% atau sekitar Rp 35 triliun dana



Team DPP APINDO Jabar sedang mendengarkan pemaparan dari Kakanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan

kelolaan nasional yang nilainya sekitar Rp 160 triliun. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting di dalam mensukseskan pelaksanaan fungsi dan tugas BPJS Ketenagakerjaan.

Maksud dan tujuan dari acara audiensi tersebut adalah :

- a. Perkenalan dan silaturahmi DPP APINDO Jawa Barat dengan Kepala Kanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Saling bertukar pikiran dan informasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, utamanya dalam rangka menjalin kerjasama yang sinergis antara ke dua belah pihak, termasuk di antaranya :
  - Melaksanakan program-program yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
  - Partisipasi BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat untuk menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) DPP APINDO Jawa Barat.



Bapak Dedy Widjaja dan Bapak Kakanwil Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan berfoto bersama

### 3. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO Ke-25 Tahun 2014

Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO Ke-25 Tahun 2014 diadakan pada tanggal 14-15 Maret 2014, di Hotel Grand Clarion Jl. A.P. Pettarani No. 3 Makassar, Sulawesi Selatan.

Bapak Dedy Widjaja memimpin rombongan DPP APINDO Jawa Barat yang berjumlah 20 orang untuk hadir pada acara Rakerkonas



tersebut, dimana pembukaan Rakerkonas dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI, Bapak Muhammad Lutfi dan dalam acara Rekerkonas tersebut sejumlah Narasumber hadir, antara lain: (1) Kepala BKPM RI, Bapak Mahendra Siregar; (2) Kepala BPJS Kesehatan, Bapak Dr. Fahmi Idris, (3) Anggota LKPP, Bapak Agus Raharjo; (4) Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.



Bapak Menteri Perdagangan dan Bapak Sofjan Wanandi (Ketua Umum APINDO) membuka secara resmi acara Rakerkonas APINDO tahun 2014



Para Tamu Undangan dan Peserta acara pembukaan Rakerkonas APINDO Ke-25 tahun 2014

#### 4. Business Meeting dengan Delegasi Pengusaha dari Selandia Baru

Business Meeting dengan Delegasi Pengusaha Selandia Baru diadakan pada tanggal 18 Maret 2014, bertempat di Hotel Hilton Bandung.

Pihak *New Zealand Trade Enterprise* (NZTE) membawa delegasi pengusaha dari Selandia Baru yang bergerak di sektor Energi dan Energi Terbarukan, berjumlah 20 orang dan dipimpin oleh Mr. Tim Anderson (*Trade Commissioner NZTE*).

Bapak Dedy Widjaja hadir dan memberikan

sambutan (*welcoming speech*) pada acara Business Meeting tersebut selaku Ketua DPP APINDO Jawa Barat didampingi oleh Bapak Martin B. Chandra (Sekretaris DPP APINDO Jawa Barat). Para pengusaha dari DPP APINDO Jawa Barat yang hadir sekitar 30 orang. Selain dari DPP APINDO Jawa Barat, hadir pula dari Ketua Umum KADIN Jawa Barat dan Ketua Umum HIPMI Jawa Barat.



Bapak Dedy Widjaja sedang bertukar cinderamata dengan Mr. Tim Anderson (NZTE)



Bapak Dedy Widjaja, Ketua Umum KADIN Jabar dan Ketua Umum HIPMI Jabar berfoto bersama dengan Mr. Tim (NZTE)

#### 5. Pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen (Pol) Drs. Mochamad Iriawan, SH. MM.

Pertemuan dengan Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen (Pol) Drs. Mochamad Iriawan, SH. MM dihadiri juga oleh Wakapolda Jawa Barat Brigjen (Pol) Drs Rycko Amelza Dahniel, bertempat di Mapolda Jawa Barat, Jl Soekarno Hatta No. 748 Bandung pada tanggal 28 Maret 2014.

Bapak Dedy Widjaja hadir dalam acara ini didampingi oleh sekitar 25 orang pengusaha anggota APINDO Jawa Barat.



## Kegiatan DPP APINDO

Inti dari pertemuan tersebut adalah membahas sinergitas antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Polda Jawa Barat terkait dengan upaya mewujudkan kamtibmas di lingkungan perusahaan pada khususnya dan di lingkungan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.



Bapak Kapolda Jawa Barat memberikan sambutan dan sekaligus menyampaikan pengarahannya



Bapak Kapolda Jawa Barat berfoto bersama dengan Bapak Dedy Widjaja dan peserta lainnya

### 6. Focus Group Discussion (FGD)

Acara *Focus Group Discussion (FGD)* diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah VI Jabar-Banten, pada hari Selasa 15 April 2014, pada pukul 14:00 - 16:00, bertempat di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah VI Jabar-Banten, Jl. Braga No. 108 Bandung.

Bapak Dedy Widjaja hadir sebagai salah satu Narasumber pada acara FGD yang bertema “*Mapping Sub Industri Tekstil dan Produk Tekstil dari Hulu ke Hilir*” tersebut.



Bapak Dedy Widjaja memberikan paparannya dalam acara FGD mengenai industri tekstil



DPP APINDO Jabar menjawab pertanyaan dari peserta FGD

### 7. Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-5 Tahun 2014 DPK APINDO Kabupaten Subang

Acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-5 Tahun 2014 DPK APINDO Kabupaten Subang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, bertempat di Lembah Gunung Kujang, Wisata Pancing Terpadu, Jl. Raya Gunung Tua Km. 8 No. 11, Cijambe Subang.



Bapak Dedy Widjaja berfoto bersama para peserta Muskab DPK APINDO Kabupaten Subang



Bapak Dedy Widjaja selaku Ketua DPP APINDO Jawa Barat membuka secara resmi acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-5 Tahun 2014 DPK APINDO Kabupaten Subang.

Agenda utama Muskab adalah memilih Ketua DPK APINDO Kabupaten Subang Masa Bakti Tahun 2014 - 2019, dan sekaligus untuk menyusun program kerja 5 tahun ke depan.

## 8. Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Subang Masa Bakti Tahun 2014 - 2019

Bapak Dedy Widjaja selaku Ketua DPP APINDO Jawa Barat melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Subang Masa Bakti Tahun 2014 - 2019 pada tanggal 21 Mei 2014 di Aula Pemda Kabupaten Subang dihadiri pula oleh Sekda Kabupaten Subang, dan Ketua DPK APINDO Kabupaten Subang terpilih yang dilantik adalah Bapak Oo Irtotolisi.



Pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Subang Masa Bakti Tahun 2014 - 2019



Foto bersama dengan Sekda Kabupaten Subang dan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Subang

## 9. Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Sukabumi Masa Bakti Tahun 2014 - 2019

Acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Sukabumi Masa Bakti Tahun 2014 - 2019 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2014 di Hotel Pangrango Jl. Salabintana Km. 7 Sukabumi.

Ketua DPP APINDO Jawa Barat melantik dan mengukuhkan Ibu Ning Wahyu Astutik sebagai Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi Masa Bakti Tahun 2014 - 2019.



Pelantikan dan Pengukuhan pengurus DPK APINDO Kabupaten Sukabumi Masa Bakti Tahun 2014 - 2019 oleh Ketua DPP APINDO Jawa Barat



Bapak Dedy Widjaja menyaksikan serah terima dari Ketua DPK APINDO Kabupaten Sukabumi yang lama kepada Ketua yang baru terpilih periode 2014 - 2019

## 10. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Save The Children International

Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara DPP APINDO Jawa Barat dengan Save The Children International, dilaksanakan



## Kegiatan DPP APINDO

pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014, di Hotel Jayakarta Jl. Ir. H. Djuanda No. 391 A Bandung, diwakili oleh Bapak Dedy Widjaja dan Mr Ricardo Caivano (Direktur *Save the Children* wilayah Indonesia).

Nota Kesepahaman ini lebih difokuskan kepada upaya integrasi hak anak ke dalam program CSR Perusahaan. Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat semakin mendorong terwujudnya Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak.



Bapak Dedy Widjaja sedang menandatangani MOU antara DPP APINDO Jabar dengan *Save the Children*



Berfoto bersama setelah penandatanganan MOU

### 11. Launching *Road Map* Perekonomian Indonesia Bersama dengan Presiden Terpilih (Bapak Joko Widodo) dan Wakil Presiden Terpilih (Bapak Jusuf Kalla)

Bapak Dedy Widjaja dan DPK APINDO se-Jawa Barat hadir pada acara Launching *Road Map* Perekonomian Indonesia ini diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APINDO, pada

hari Kamis tanggal 18 Setember 2014 di Hotel Four Season, Ruang Ballroom, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta.



Presiden Terpilih Bapak Joko Widodo menyampaikan paparannya terkait *Road Map* Perekonomian yang disampaikan DPN APINDO



Bapak Dedy Widjaja sedang mengajukan pertanyaan kepada Presiden Jokowi dalam acara penyampaian *Road Map* ke Pemerintah

### 12. Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-7 Tahun 2014 DPK APINDO Kabupaten Bekasi

Acara Musyawarah Kabupaten (Muskab) Ke-7 DPK APINDO Kabupaten Bekasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 di Hotel Sahid Jaya Lippo Cikarang – Bekasi.

Pada Muskab ini Bupati Bekasi berkenan hadir dan memberikan sambutannya, yang sekaligus membuka secara resmi acara Muskab. Acara Muskab ini diselenggarakan untuk memilih Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2014 – 2019, dan sekaligus untuk menyusun program kerja 5 tahun ke depan.



Dalam Muskab ini Bapak H. Sutomo, SH. terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi Masa Bakti Tahun 2014 - 2019.



Ibu Bupati Bekasi membuka secara resmi Muskab DPK APINDO Kabupaten Bekasi dengan memukul gong



Bapak Dedy Widjaja melantik dan mengukuhkan Pengurus DPK APINDO Kabupaten Bekasi Masa Bakti 2014 - 2019

### 13. Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis dengan Tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Bisnis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”

Acara Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis ini diadakan oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI), dengan tema “Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Bisnis dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014, bertempat di Hotel Aston Primera Pasteur Jl. Dr. Djundjunaan No. 96 Bandung.

Bapak Dedy Widjaja menjadi Narasumber pada acara Seminar Nasional tersebut, dengan

membawakan makalah yang berjudul “Peluang dan Tantangan Dunia Usaha Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”.

Narasumber lainnya adalah Ibu Dr. Hendri Saparini, seorang pakar dan pengamat ekonomi di Indonesia.



Bapak Dedy Widjaja sedang diskusi dan menjawab pertanyaan dari para peserta Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis



Bapak Dedy Widjaja berfoto bersama dengan Dr. Hendri Saparini dan Pembantu Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani

### 14. Rapat Koordinasi (Rakor) Pengupahan APINDO Seluruh Jawa Barat

DPP APINDO Jawa Barat mengadakan acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengupahan APINDO Seluruh Jawa Barat, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bertempat di Hotel Savoy Homann, Ruang Embassy, Jl. Asia Afrika No. 112 Bandung.

Rakor Pengupahan ini diselenggarakan dengan tujuan :



## Kegiatan DPP APINDO

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap perkembangan pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2015 di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat.
2. Memberikan informasi dan pemahaman yang benar tentang ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pembahasan dan penetapan Upah Minimum.
3. Memberikan informasi dan pemahaman yang benar tentang tugas dan kewajiban Anggota Dewan Pengupahan.

Sebagai Narasumber pada acara ini adalah Bapak Hariyadi B. Sukamdani (Ketua DPN APINDO Bidang Ketenagakerjaan) yang didampingi oleh Tim Pengupahan dari DPN APINDO.

Para peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi sebanyak 66 orang, terdiri dari:

1. Pengurus DPP APINDO Jawa Barat
2. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat unsur APINDO
3. Pengurus DPK APINDO seluruh Jawa barat
4. Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota unsur APINDO seluruh Jawa Barat.



Bapak Hariyadi B. Sukamdani dan Tim Pengupahan DPN APINDO memberikan paparannya



Para peserta Rakor sedang menyimak pemaparan dari para Narasumber

## DPP APINDO JAWA TENGAH

<b>Ketua</b>	<b>: Frans Kongi</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Daryanto</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 31 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 1.198 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 86 Perusahaan</b>

Setiap tahun anggota dari DPP APINDO Jawa Tengah selalu meningkat cukup signifikan, hal ini membuktikan bahwa Sekretariat DPP Jateng banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat di provinsi Jawa Tengah dan khususnya kepada anggota DPP APINDO Jawa Tengah mengenai berbagai hal yang penting untuk diketahui, diantaranya:

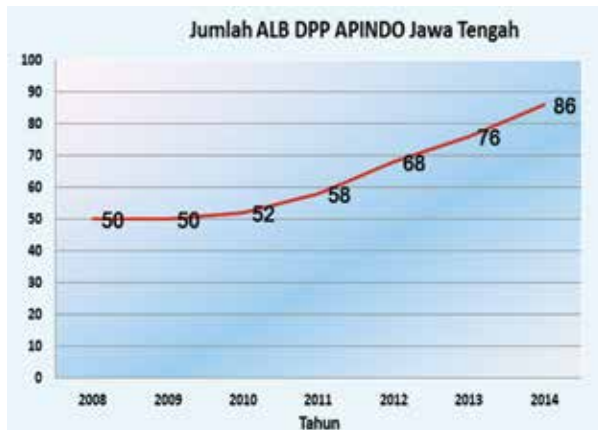
sosialisasi mengenai BPJS Kesehatan, mengadakan seminar mengenai SMK3, sosialisasi peng-upahan berbasis produktivitas, disamping itu beberapa pelatihan yang telah diadakan antara lain mengenai Gender dan *workshop saving energy*.

Kegiatan yang dilakukan oleh DPP APINDO Jateng semata mata untuk memberikan



sebanyak banyaknya informasi kepada anggota dan kemajuan dunia usaha pada umumnya.

Peningkatan anggota DPP APINDO Jateng dapat dilihat dari grafik jumlah anggota di bawah ini.



Beberapa kegiatan yang telah diadakan oleh DPP APINDO Jateng selama tahun 2014 yaitu :



Sosialisasi program BPJS Kesehatan, tanggal 18 Maret 2014 di Hotel Quest- Semarang



Muskab DPK APINDO Kabupaten Pemalang, Pemalang, 19 April 2014



Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Survei, tanggal 11 Maret 2014 di Hotel Neo Semarang



Peringatan May Day Disnakertrans Jateng, 1 Mei 2014



Kepesertaan tim APINDO Jawa Tengah pada RAKERKONAS APINDO tahun 2014 di Makassar yang berlangsung pada 14 - 15 Maret 2014



Muskab DPK APINDO Kabupaten Kudus, Hotel Graphita Kudus, 21 Mei 2014



# Kegiatan DPP APINDO



Seminar tentang SMK3, Grasia Hotel, 22 Mei 2014



Pelatihan Gender di Bandungan Semarang pada tanggal 15 - 16 September 2014



Rakor Bidang Pengupahan dengan DPK APINDO se-Jawa Tengah, Hotel Neo 24 Juni 2014



In house training PT Phillips Seafood, tanggal 19 November 2014



Workshop Saving Energy, Gumaya Tower Hotel, Tanggal 4 Juli 2014



Sosialisasi pengupahan berbasis produktivitas, Hotel Neo Semarang, 24 November 2014



Kunjungan DPP Jateng ke Propinsi NTT dan Pelatihan Gender & Social Compliance, 18 - 22 Agustus 2014



Rapat Koordinasi DPP-DPK APINDO se-Jawa Tengah Hotel Grasia 18 Desember 2014



## DPP APINDO JAWA TIMUR

Ketua	: Alim Markus
Sekretaris Eksekutif	: Drs. M. Sudjana
Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota	: 38 Kabupaten / Kota
Jumlah Anggota Biasa	: 1.578 Perusahaan

**D**PP APINDO Jawa Timur merupakan salah satu Propinsi yang aktif dalam melakukan kegiatan terkait memberikan pelayanan dan sosialisasi berbagai hal kepada anggotanya, dalam tahun 2014 banyak hal yang dilakukan DPP APINDO Jawa Timur sebagai layanan kepada para anggotanya antara lain :

### A. Bantuan Hukum & Advokasi

Konsultasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan didalam bidang ketenaga kerjaan seperti bantuan hukum/advokasi, konsultasi masalah ketenaga kerjaan, perselisihan, pemutusan hubungan kerja, pengupahan, pembuatan PP dan PKB serta pemberian bantuan advokasi investasi kepada para investor yang menanamkan modalnya di Jawa Timur.

### B. Pengadilan Hubungan Industrial

Mengadakan rapat berkala dan monitoring terhadap segala tugas dan kegiatan dari para Hakim Ad-Hoc unsur APINDO.

### C. Dewan Pengupahan

1. Mengikuti secara aktif rapat-rapat Dewan Pengupahan dalam menetapkan usulan upah minimum tahun berjalan yang disampaikan kepada Gubernur.
2. Aktif dalam rapat-rapat dan survey harga berkaitan dengan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum.

### D. Pendidikan dan Latihan

Untuk meningkatkan ketrampilan para anggota DPP APINDO Jawa Timur telah menyelenggarakan *training* atau seminar-seminar yang berkaitan dengan bidang ketenaga kerjaan, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan serta melaksanakan program pemagangan para lulusan SMK pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam APINDO.

### E. Temu Konsultasi

Mengadakan pembinaan terhadap para anggota melalui acara temu konsultasi anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan saat itu atau permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan yang berkembang antara lain :

1. Lokakarya "Mempekerjakan pekerja rumahan bagi pengusaha (*home worker*)" dengan ILO.





## Kegiatan DPP APINDO



2. Sosialisasi “Panduan perilaku bersih pengadaan barang & jasa publik” dengan Kemitraan



3. Temu Konsultasi “Penjelasan Perda Jawa Timur No.9/2013 tentang Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain”



4. Forum diskusi “Program penguatan ekonomi perempuan muda” dengan Plan Indonesia

5. Temu Konsultasi “Implementasi dan anti-sipasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.100/PUU-X/2012 terkait dengan tidak adanya kedaluwarsa dari perselisihan hak dalam hubungan industrial”



6. Pelatihan sehari “Manajemen SDM menghadapi pasar bebas ASEAN 2015/2016”.

7. Forum dialog “Dinamika Perdagangan pasar bebas ASEAN 2015/2016” dengan Disnakertransduk di Malang.



8. Seminar tentang “Informasi persyaratan Teknis Negara Tujuan Ekspor” dengan Kemendag & *EU Indonesia Trade Suport Programme*.
9. Pelatihan & Sosialisasi “Membangun pengetahuan tentang kesetaraan gender ditempat kerja & dampaknya pada produktivitas kerja” dengan Plan Indonesia.
10. Workshop “Kajian penurunan biaya logistik serta survey kinerja logistik perusahaan” dengan World Bank & PT. Pelindo II.
11. Pertemuan tentang survey daya saing dengan ACI/Pemerintah Singapura
12. Temu Konsultasi “ Implementasi Keputusan Menakertrans RI No.307/2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional”.
13. Temu Konsultasi “Prediksi UMK tahun 2015 di Jawa Timur”
14. Dialog tentang “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional dengan meningkatkan Daya Saing Industri dan Perdagangan” .



## F. Potensi Ekonomi Jawa Timur

### 1. Kinerja Perdagangan Ekspor-Impor Barang & Jasa (Triliun Rupiah)

KINERJA	2010	2011	2012	2013
<b>EKSPOR</b>	375,176 100%	439,972 100%	523.658 100%	585,517 100%
• Luar Negeri	169,423 45,2 %	200,500 54,4 %	222,170 42,4 %	239,495 40,9 %
• Antar- Provinsi	206,753 54,8 %	239,472 54,4 %	301,488 57,6 %	346,021 59,1 %



## Kegiatan DPP APINDO

<b>IMPOR</b>	340,140 100 %	405,395 100 %	473,206 100 %	531,788 100 %
• Luar Negeri	155,717 45,8 %	196,641 48,5 %	234,573 49,6 %	256,183 48,2 %
• Antar-Provinsi	184,423 54,2 %	208,754 51,5 %	238,573 50,4 %	275,604 51,8 %
<b>SURPLUS</b>	<b>35,036</b>	<b>34,576</b>	<b>50,451</b>	<b>53,728</b>

### 2. Realisasi Investasi

INVESTASI	2009	2010	2011	2012	2013
<b>PMDN</b>	38,77	56,26	70,07	79,57	76,58
<b>Non-Fasilitas</b>	82,7 %	68,1 %	63,4 %	59,6 %	52,8 %
<b>P M D N</b>	4,29 9,2 %	9,59 11,6 %	20,33 18,4 %	28,73 21,5 %	34,85 24,0 %
<b>P M A</b>	3,80 8,1 %	16,73 20,3 %	20,07 18,2 %	25,13 18,8 %	33,63 23,2 %
<b>TOTAL</b>	<b>46,86</b>	<b>82,54</b>	<b>110,47</b>	<b>133,43</b>	<b>145,06</b>

### 3. Realisasi PMDN Non-Fasilitas Per Kab/Kota Tahun 2013

NO	KABUPATEN/KOTA	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp.Triliun)	TK (orang)
1	KOTA SURABAYA	10.150	26.67	80.930
2	KAB. SIDOARJO	11.927	10.54	29.182
3	KAB. PASURUAN	658	10.41	10.353
4	KAB. JEMBER	1.572	7.19	9.083
5	KAB. MOJOKERTO	1098	2.78	15.120
6	UPT P2T PROV JATIM	113	2.21	8.513
7	KAB. BANYUWANGI	1996	2.02	52.847
8	KAB. PROBOLINGGO	966	1.73	1.893
9	KAB. TUBAN	89	1.07	3.041
10	KAB. MAGETAN	485	0.92	2.338

NO	KABUPATEN/KOTA	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp.Triliun)	TK (orang)
11	KAB. GERSIK	468	0.84	7.746
12	KAB. KEDIRI	1.143	0.78	4.591
13	KAB. LAMONGAN	859	0.74	5.241
14	KAB. BOJONEGORO	1.645	0.74	17.448
15	KOTA PROBOLINGGO	1.187	0.73	2.173
16	KAB. NGAWI	566	0.72	2.863
17	KAB. SAMPANG	709	0.68	3.138
18	KAB. SITUBONDO	2.128	0.67	8.460
19	KAB. SUMENEP	11.793	0.67	10.447
20	KOTA MALANG	1.401	0.50	8.631



NO	KABUPATEN/KOTA	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp.Triliun)	TK (orang)
21	KAB. BONDOWOSO	3.284	0.48	174.313
22	KAB TLG AGUNG	1.386	0.39	4.271
23	KAB. PONOROGO	1.128	0.34	3.230
24	KAB. BANGKALAN	838	0.33	3.116
25	KAB. BLITAR	1.715	0.33	4.802
26	KOTA PASURUAN	305	0.32	2.564
27	KAB. JOMBANG	1.161	0.32	4.736
28	KOTA KEDIRI	517	0.20	2.233
29	KAB. PAMEKASAN	962	0.20	4.025
30	KAB. NGANJUK	579	0.17	1.995

NO	KABUPATEN/KOTA	UNIT USAHA	INVESTASI (Rp.Triliun)	TK (orang)
31	KOTA BLITAR	340	0.17	1.078
32	KAB. MALANG	717	0.15	1.599
33	KAB. TRENGGALEK	596	0.13	2.193
34	KOTA MOJOKERTO	133	0.12	356
35	KAB. LUMAJANG	605	0.10	3.247
36	KOTA BATU	318	0.09	986
37	KOTA MADIUN	266	0.06	1.243
38	KAB. MADIUN	249	0.04	495
39	KAB. PACITAN	434	0.04	1.248
<b>TOTAL</b>		<b>66.488</b>	<b>76.58</b>	<b>501.768</b>

## DPP APINDO KALIMANTAN SELATAN

<b>Ketua</b>	<b>: Dr (Cand ) H. Supriadi S.PD.MM</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>: YM. Sri Kusminingsih SE.</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 10 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 308 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 7 Perusahaan</b>

Dengan wilayah yang luas di Provinsi Kalimantan Selatan dan kaya akan bahan tambang serta sumber mineral lainnya, menjadikan daerah ini sangat menjanjikan untuk berkembang pesatnya sektor Pertambangan dan Perkebunan.

Sektor pertambangan yang masih ber-peluang baik untuk diolah adalah Batu Bara dan Biji Besi, sementara itu untuk Sektor Perkebunan, saat ini yang sedang berkembang dengan pesat adalah perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, dimana usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dari lingkungan setempat.

Selain bidang pertambangan dan perkebunan, industri UKM dan koperasi juga mendapat perhatian besar dari pemerintah propinsi Kalimantan Selatan, dimana pengusaha UKM di Kalimantan Selatan banyak bermunculan khususnya untuk kerajinan tangan dan Sasirangan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP Kalsel selama tahun 2014 antara lain :

1. Mengadakan Seminar mengenai Perkara Hubungan Industrial pada tgl 11 Maret 2014 di Swissbell Hotel , Banjarmasin.



## Kegiatan DPP APINDO

2. Dalam rangka hari buruh sedunia, mengadakan Gerakan jalan santai pada tanggal 6 Mei 2014, kerjasama dengan Serikat Pekerja dan pemerintah setempat, lokasi dipusatkan di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin.
3. Tanggal 4 Juni mengadakan Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (*safe guard*) kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan KPPI , acara ini diadakan di hotel Area Barito, Banjarmasin.
4. Pelaksanaan Survey Daya Saing Usaha kerjasama dengan pihak ACI Singapore diadakan pada tanggal 24 Juni 2014 di Hotel Mercure, Banjarmasin
5. Sosialisasi mengenai proses penentuan KHL/UMP/UMSP tahun 2014 untuk anggota DPP APINDO Kalsel , diadakan di Swissbell Hotel Banjarmasin pada tanggal 4 September 2014
6. Kerjasama dengan PT Askes / BPJS Kesehatan, diadakan sosialisasi mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk Anggota dan pengusaha di Banjarmasin , dan acara ini diadakan di Hotel Palm pada tanggal 30 Oktober 2014.

## DPP APINDO SULAWESI SELATAN

<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Latunreng, MM.</b>
<b>Direktur Eksekutif</b>	<b>: Yusran IB Hernald</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 23 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 152 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 25 Perusahaan</b>

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 45.764,53 km persegi yang meliputi 21 kabupaten dan 3 kota, sedangkan jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2012 berjumlah 8.190.222 jiwa, dengan penduduk terbesar berada di kota Makassar yakni sebesar 1.369.606 jiwa. Jumlah angkatan kerja di Sulawesi selatan pada tahun 2014 sebanyak 3.391.044 , jumlah yang bekerja: 3.095.365 sedangkan yang tidak bekerja: 296.559.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPP Sulsel selama tahun 2014 antara lain :

1. Temu konsultasi pengusaha dalam rangka penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 di kota Makassar, tujuan acara adalah mendapatkan masukan dan pendapat pengusaha sebelum pembahasan UMP di Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel.





2. Penandatanganan MoU DPP APINDO Sulsel dengan pemerintah Propinsi Sulsel yang diwakili oleh Walikota Makassar, LSM Kemitraan dan LSM Kopel, melalui Deklarasi Forum Tudang Sipulung mengenai pengadaan barang dan jasa bebas korupsi dan gratifikasi di kota Makassar, acara diadakan pada tanggal 29 Oktober 2014.



4. Ketua DPP APINDO Sulsel Bp. Drs. La Tunreng MM menjadi narasumber dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, acara ini diselenggarakan oleh POLDA SULSELBAR, dihadiri oleh unsur Muspida Sulsel dan pemkot Makassar.

Acara diadakan di hotel Warkop Sija Boulevard Makassar pada tanggal 6 Desember 2014.



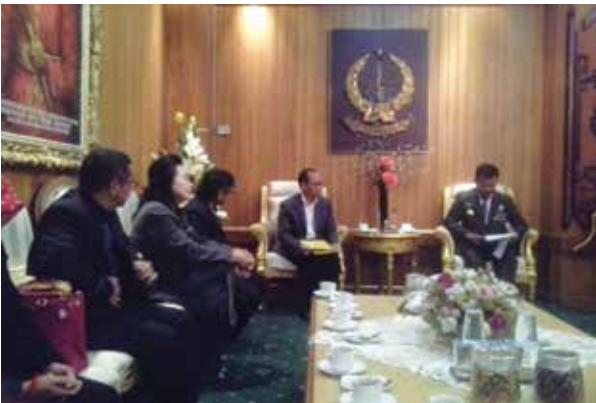
3. Menerima kunjungan Delegasi Bisnis pengusaha New Zealand yang berada di Makassar dari tanggal 31 Agustus hingga 2 September 2014.





## Kegiatan DPP APINDO

5. Ketua dan jajaran pengurus DPP APINDO Sulsel melakukan audiensi dengan Gubernur Sulsel menjelang pelaksanaan Rakerkonprof dan Dialog nasional Ekonomi dan Investasi yang akan diselenggarakan di kota Makassar.



6. Penganjangan Kawasan Industri bebas pekerja anak kota Makassar diadakan pada tanggal 29 Desember 2014, dan APINDO Sulsel memberikan dukungan penuh bagi kebijakan penghapusan pekerja anak di Sulawesi Selatan.



7. Ketua DPP APINDO Sulsel menjadi narasumber dalam acara diskusi akhir tahun bersama Gubernur Sulsel, Ketua Kadin Sulsel, Kepala Perwakilan BI Sulsel dan Chairman Fajar Group, dengan tema diskusi: Kesiapan Sulsel dalam menghadapi MEA 2015. Acara diadakan pada tanggal 22 Desember 2014.





## Potensi investasi di wilayah Sulawesi Selatan :

- Bidang pertanian : jagung, kakao , kopi, Jambu mente, vanili, ubi kayu, tambak udang, penangkaran ikan laut, budidaya rumput laut dan penggemukan sapi.
- Bidang Industri : Industri keramik/marmer, industri semen, industry pakan ternak, industri sutra, industri pengolahan kayu, industri pengolahan buah-buahan, industri pengalengan ikan dan hasil laut, industri kapal dan industri pengolahan garam.
- Bidang Pertambangan dan Energi
- Bidang Pariwisata termasuk bidang jasa dan perdagangan

## DPP APINDO NUSA TENGGARA TIMUR

<b>Ketua</b>	<b>: Freddy Ongko</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>: Roby Rawis</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota</b>	<b>: 11 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 313 Perusahaan</b>

### 1. KEGIATAN

Beberapa Kegiatan yang telah dilakukan DPP APINDO NTT di tahun 2014 :

#### a. Februari 2014

- Tanggal 27 Februari 2014 : mengikuti Rakerda program kependudukan dan KB
- Tanggal 28 Februari 2014 : mengikuti sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### b. Maret 2014

- Tanggal 4 - 5 Maret 2014 : mengikuti sosialisasi tentang peternakan sapi dan rumput laut.
- Tanggal 14 - 15 Maret 2014 : mengikuti Rakerkonas APINDO ke 25 dan HUT APINDO ke 62 di Jakarta.

#### c. April 2014

- Tanggal 16 April 2014 : mengikuti sosialisasi perundang undangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### d. Mei 2014

- Tanggal 13-14 Mei 2014 : mengikuti kegiatan fokus group discussion penanganan hambatan perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### e. Juni 2014

- Tanggal 10-11 Juni 2014 : mengikuti workshop Eksaminasi Hasil Penelitian di Jakarta.
- Tanggal 10-21 Juni 2014 : mengikuti kegiatan pelatihan sebagai pelatih kewirausahaan sekaligus pendamping UMKM yang tersertifikasi dengan modul kewirausahaan yang berperspektif gender dan modul pendidikan keuangan untuk keluarga yang diselenggarakan oleh ILO cabang Kupang.
- Tanggal 18-19 Juni 2014 : mengikuti Konferensi Nasional UKM-IKM yang diselenggarakan di Tangerang.

#### f. Juli 2014

- Tanggal 3-5 Juli 2014 : mengikuti kegiatan pelatihan negosiasi hubungan industrial bagi pekerja/buruh, pengusaha dan



## Kegiatan DPP APINDO

organisasi pengusaha tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Tanggal 25 Juli 2014 : mengikuti *workshop* mekanisme koordinasi bursa kerja penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### g. Agustus 2014

- Tanggal 19-21 Agustus 2014 : DPP APINDO NTT bersama dengan PLAN Internasional dan DPP APINDO Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke daerah Timor Tengah Selatan dan Timor Tengah Utara.
- Tanggal 31 Agustus 2014 : Pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Alor (DPK APINDO Kabupaten Alor) masa bakti 2014-2019 yang diketuai oleh Denny Lalitan bertempat di Hotel Kenari, Kalabahi.



Penyerahan Bendera APINDO oleh Ketua DPP APINDO NTT kepada Ketua DPK APINDO Kab. Alor periode 2014-2019

### h. September 2014

- Tanggal 10-12 September 2014 : mengikuti Forum Konsolidasi dan Eksaminasi Nasional di Hotel Cakra Kusuma, Yogyakarta.
- Tanggal 25 September 2014 : mengikuti edukasi publik tentang masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

### i. Oktober 2014

- Tanggal 28-29 Oktober 2014 : menghadiri acara pembukaan Pasar di Batugade

(Perbatasan RI dan Timor Leste) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Timor-Leste.



Pembukaan pasar di Perbatasan R.I dan Timor Leste oleh Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste.

### j. November 2014

- Tanggal 7-8 November 2014: Pelantikan Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Belu (DPK APINDO Kabupaten Belu) masa bakti 2014-2019 yang diketuai oleh Agustinus Lise Pio bertempat di Hotel Matahari, Atambua.



Pengurus baru DPK APINDO Kab. Belu Periode 2014-2019



Foto bersama Pengurus DPK APINDO Kabupaten Belu periode 2014-2019 yang diketuai oleh Agustinus Lise Pio, Bupati Belu, Ketua DPP APINDO NTT, Ketua DPK APINDO Kabupaten Lembata dan para undangan lainnya.

- Tanggal 19-22 November 2014: mengikuti kegiatan Tripartit Nasional di Jakarta.

#### k. Desember 2014

- Tanggal 1 Desember 2014 : mengikuti Kegiatan Keorganisasian dan Pemerintahan Kabinet Kerja dan *Owner Gathering* APINDO di Jakarta.
- Tanggal 6 Desember 2014 : menghadiri Gathering Badan Usaha yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sekaligus memberikan sambutan.
- Tanggal 20 Desember 2014 : menghadiri acara pembukaan Rumah Sakit Siloam yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia.

## 2. PELUANG BISNIS

Peluang bisnis yang masih berpeluang di NTT saat ini adalah :

1. Pertambangan Batu Mangan ;
2. Pariwisata;
3. Transportasi laut;

## DPP APINDO PAPUA

<b>Ketua</b>	<b>: Simon P. Morin</b>
<b>Sekretaris Eksekutif</b>	<b>: Darwin Tandilintin</b>
<b>Jumlah Dewan Pimpinan Kabupaten / Kota</b>	<b>: 5 Kabupaten / Kota</b>
<b>Jumlah Anggota Biasa</b>	<b>: 177 Perusahaan</b>
<b>Jumlah Anggota Luar Biasa</b>	<b>: 14 Perusahaan</b>

Provinsi Papua secara geografis berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG), terdiri dari 28 kabupaten dan 1 Kota dengan ibu Kota Provinsi adalah Jayapura, luas wilayah Provinsi Papua yaitu 319.036,05 kilometer persegi dengan jumlah penduduk ditahun 2010 sebanyak 2.833.381 orang atau setara dengan 9 orang perkilometer persegi.

Disebagian besar wilayah Provinsi Papua akses jalan sangat terbatas dan terhambat oleh kondisi geografis. Transportasi udara adalah modal transportasi utama untuk menjangkau

wilayah di Provinsi Papua, selain transportasi laut yang menjadi andalan utama untuk menjangkau di wilayah pesisir. Saat ini terdapat 1 pelabuhan utama yang terletak di Kota Jayapura, 25 pelabuhan standar nasional, 1 pelabuhan regional dan 78 pelabuhan perintis. Beberapa perusahaan penerbangan swasta perintis melayani rute penerbangan antar kabupaten dan antar distrik/kampung sedangkan jalan darat masih sangat kurang dan jalan yang ada merupakan jalan trans papua.



## Kegiatan DPP APINDO Papua Tahun 2014

DPP Apindo Papua telah membentuk 5 DPK yaitu : DPK Kota Jayapura, DPK Kabupaten Biak, DPK Kabupaten Mimika, DPK Kabupaten Jayapura dan DPK Kabupaten Merauke.

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Dunia Swasta, Perbankan dan melibatkan APINDO Papua antara lain :

- Bimbingan Teknis Pemahaman Hubungan Industrial Bagi Organisasi Pengusaha pada tanggal 8-10 September 2014 di Hotel Swiss-bell Jayapura
- Musyawarah Kabupaten Khusus Pembentukan DPK APINDO Kabupaten Merauke pada tanggal 20 September 2014 di Merauke.
- Forum Jasa Kontruksi Provinsi Papua tanggal 29 November 2014 di Hotel Swiss-bell Jayapura
- Seminar “Membangun Potensi Ekspor UKM Papua” 13 Desember 2014 di Hotel Aston Jayapura.

DPP / DPK APINDO PAPUA	Jumlah Anggota (Perusahaan)
DPP Provinsi Papua	14 (Luar Biasa)
DPK Kota Jayapura	58
DPK Kabupaten Biak	15
DPK Kabupaten Mimika	43
DPK Kabupaten Jayapura	28
DPK Kabupaten Merauke	19
Jumlah Anggota APINDO	177

## Keanggotaan DPP APINDO PAPUA

### 1. Potensi dan Peluang Usaha di Provinsi Papua

Potensi dan Peluang Usaha di Provinsi Papua tercakup dalam Strategi Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2013-2018 dengan VISI yaitu Papua Mandiri, Papua Bangkit dan Papua Sejahtera

- Potensi Pertambangan minyak dan gas bumi meliputi wilayah Teluk Cendrawasih, Pantai Selatan Papua dan Pegunungan Tengah

- Potensi Pertambangan batubara meliputi wilayah Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Boven Digul
- Potensi Pertambangan emas, tembaga, perak meliputi wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Deyai
- Potensi pertambangan logam dasar di kab. Jayapura
- Potensi Pariwisata Budaya di Kabupaten Asmat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura
- Potensi Perkebunan dan Pertanian meliputi seluruh wilayah di Provinsi Papua.
- Potensi Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Pabrik CPO di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Nabire
- Potensi Perikanan Laut di kabupaten Biak, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yapen, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Merauke

### 2. Kendala-kendala

- Fasilitas bongkar muat pelabuhan masih sangat terbatas sehingga berdampak pada proses arus bongkar muat di pelabuhan yang lama.
- Jaringan Telekomunikasi di beberapa wilayah masih minim
- SDM masih sangat minimal sehingga masih sulit untuk bersaing secara kompetitif.
- Permasalahan sosial budaya di mana masih sering terjadi pertikaian antara suku-suku khususnya di wilayah Pegunungan.
- Pemerintah belum membuat peraturan perdasu dan perdasus dalam menata batas-batas hak ulayat wilayah masyarakat adat sehingga berdampak pada kepastian hukum dalam penggunaan lahan.
- Masih adanya sekelompok masyarakat yang terorganisir yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI dan masih sering ada konflik yang berdampak kurang kondusif.

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **NAD**

Ketua : H.M. Dahlan Sulaiman, SE  
Jl. Tengku Daud Beureuh No. 170 E,  
Lampriet - Banda Aceh (23126)  
T. 0651-227 36 / 21614  
F. 0651-227 36 / 635554  
E-mail: nad@apindo.or.id  
wisataindomatha@gmail.com  
smdahlan@yahoo.co.id

## **Sumatera Utara**

Ketua : Parliindungan Purba, SH, MM  
Jl. Sungai Deli No. 21 Medan (20114)  
T. 061-773 980 21/457 5651/414 4657  
F. 061-457 5651  
E-mail: apindosu@yahoo.co.id

## **Riau**

Ketua : Helfried Sitompul  
Hotel Premiere Lt. 3 Ruang Mulia 9  
Jl. Jend. Sudirman No.389 Pekanbaru  
T. 0761-7891818  
F. 0761-7891818  
E-mail: apindo\_riau@yahoo.com  
riau@apindo.or.id

## **Kepulauan Riau**

Ketua : Ir. Cahya  
Kompleks Citra Indah Blok A3 No. 1 - 2  
Batam Centre, Batam (29432)  
T. 0778 - 469 955  
F. 0778 - 467366  
E-mail : apindo.kepri\_santi@yahoo.co.id

## **Sumatera Barat**

Ketua : Muzakir Aziz Akin  
Jl. Ombilin No. 2 Rimbo Kaluang,  
Padang (25115)  
T. 0751 - 443390  
F. 0751 41584  
E-mail : sekretariat@apindo-sumbar.or.id;  
akins@apindo-sumbar.or.id,  
akinse@rocketmail.com;  
sumbar@apindo.or.id

## **Jambi**

Ketua : Junus Abdullah  
Jl. Raden Wijaya No. 92 Jambi (63137)  
T. 0741 - 420 38  
F. 0741 - 420 38  
E-mail : jambi@apindo.or.id,

## **Bengkulu**

Ketua : M. Basri Muhammad  
Jl. Merapi No. 116 Kebun Tebeng, Bengkulu  
T. 0736 - 284 05  
F. 0736 - 284 05  
HP. : 0811 737 281  
E-mail : apindobengkulu@yahoo.co.id

## **Sumatera Selatan**

Ketua : Sumarjono Saragih  
Jl. Brigjend Hasan Kasim  
Komplek Jaya Raya Garden No. C-3  
Palembang, Sumsel (30116)  
T. 0711-813154  
F. 0711- 813154  
E-mail : sumsel@apindo.or.id

## **Bangka Belitung**

Ketua : WFM Nasution  
Jl. Air Selan No. 232 Gabek I Pangkal  
Pinang (33118)  
T. 0717-421 793  
F. 0717-425 6635 / 422 007  
E-mail : wanfahreza@yahoo.co.id

## **Lampung**

Ketua : Yusuf Kohar  
Jl. Gajah Mada No. 17B  
Bandar Lampung (35241)  
T. 0721-258 614  
F. 0721-261 327  
E-mail : lampung@apindo.or.id;  
mykohar@gmail.com

## **Banten**

Ketua : Deddy Djunaedi  
Jl. Yusuf Martadilaga No. 59 Kel. Cipare  
Kec. Serang, Banten 42117  
Telp. : 0254 - 914 4849  
Facs. : 0254 - 212 741  
E-mail : banten@apindo.or.id  
dppapindobanten@yahoo.com

## **DKI Jakarta**

Ketua : Drs. Soeprayitno. MBA; MSc, Ph.D  
Graha Mampang L6  
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100  
Jakarta (12760)  
T. 021-797 0323/770 365  
F. 021-797 0018  
E-mail : apindodki@gmail.com

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **Jawa Barat**

Ketua : Deddy Widjaya  
Putraco Gading Regenci  
Jl. Gading Utama Blok K - 3  
Soekarno - Hatta Bandung (40292)  
T. 022-730 3029  
F. 022-732 3131  
E-mail : apindo.jabar@yahoo.co.id

## **Jawa Tengah**

Ketua : Frans Kongi  
Ruko Semarang Indah Blok E II No. 28  
Jl. Madukoro Raya, Semarang (501444)  
T. 024 - 766 32990  
F. 024 - 766 32989  
E-mail : jawatengah@apindo.or.id

## **DI Yogyakarta**

Ketua : Buntoro  
Gedung Mega Andalan Kalasan (MAK)  
Jl. Tanjung Tirto No.34-36  
Yogyakarta (55571)  
T. 0274-496393, 497068  
F. 0274-496226  
E-mail : apindodiy@yahoo.co.id

## **Jawa Timur**

Ketua : Alim Markus  
Jl. Citandui 22 Surabaya (60264)  
T. 031-561 4865, 5677918  
F. 031-561 5436  
E-mail : apindo\_jtm@yahoo.co.id

## **Bali**

Ketua : Drs. Panudiana Kuhn, MM  
Jl. Menuh No. 1 Denpasar (80235)  
T. 0361-263 243/751 816  
F. 0361-263 243/756 647  
E-mail : apindobali\_dpp@yahoo.co.id;  
panudiana.kuhn@gmail.com

## **NTB**

Ketua : Ni Ketut Wolini  
Jl. Kecubung No. 6 Gomong Lama Mataram  
T. 0370-634 680 (Komang)  
F. 0370-634 680  
E-mail : ntb@apindo.or.id  
mekarswamitra@yahoo.co.id

## **NTT**

Ketua : Freddy Ongko  
Jl. Timor Raya No. 122 Km.5  
Oesapa, Kupang NTT (85111)  
T. 0380 - 828 813  
F. 0380 - 831 718  
E-mail : nttppapindo@yahoo.co.id

## **Kalimantan Barat**

Ketua : Maman Surachman  
PT. Erna Djulianti  
Jl. Adi Sucipto Km. 5 Pontianak  
Kalimantan Barat (78124)  
T. 0561-739 777 (Atika)  
F. 0561-739 828  
E-mail : irm@timber.lyman.co.id

## **Kalimantan Tengah**

Ketua : Hernica Rasan  
Gedung Batang Garing L3 Kav. 307  
Jl. DI Panjaitan No. 1 Palangkaraya (73112)  
T. 0536-324 2218  
F. 0536-324 2217  
E-mail : apindo\_kalteng@yahoo.com

## **Kalimantan Timur**

Ketua : M. Slamet Brotosiswojo  
Ruko Puri Blok B No. 10 Kompleks Balikpapan Baru  
Balikpapan (76114)  
T. 0542-7212466  
F. 0542-7212488  
E-mail : apindokaltim@yahoo.com

## **Kalimantan Selatan**

Ketua : Supriadi DR, Spd, MM  
Komplek Ruko 53 Kav. 6,  
Jl. Lingkar Dalam Banjarmasin  
T. 0511-4315592  
F. 0511-4315592  
E-mail : ymsri@dayasakti.co.id  
kalsel@apindo.or.id  
apindo.kalsel@yahoo.com

## **Sulawesi Utara**

Ketua : Andre Angoy  
Jl. Sarapung No. 3 - 5 Manado (95111)  
T. 0431-846457, 0431-51560  
F. 0431-866889  
E-mail : petertappy@yahoo.co.id

# DAFTAR ALAMAT DEWAN PIMPINAN PROVINSI APINDO

## **Gorontalo**

Ketua : H. Suharto Puluhulawa  
Jl. Kenangan No. 156 Dulalowo  
Kec. Kota Tengah, Gorontalo (96115)  
T. 0435-824431/826859  
F. 0435-826859  
E-mail : harto\_06@yahoo.co.id

## **Sulawesi Barat**

Ketua : Dirga Adhiputra Singkaru  
Jl. Ahmad Kirang No.6  
Mamuju, Sulawesi Barat  
T. 081219997923  
F. -  
E-mail : ifz1988@yahoo.com

## **Sulawesi Tengah**

Ketua : Arthur Pangemanan  
Jl. Sapta Marga II/2 Palu  
T. 0451-487 301  
F. 0451-456 556  
E-mail : moniqueikha@gmail.com  
pantau\_lwk@yahoo.com

## **Sulawesi Selatan**

Ketua : Drs. La Tunreng  
Jl. Jend. A. Yani No. 23 Makassar  
T. 0411-324 944 / 437 059  
F. 0411-324 944 / 466 3606  
E-mail : baktipersada\_latu@yahoo.com

## **Sulawesi Tenggara**

Ketua : Gunawan Yiedri, SE. MM  
Jl. Malik Raya No. 33 A Kendari,  
Sulawesi Tenggara (93111)  
T. 0401 - 3125178,  
F. 0401 - 3125697  
E-mail : apindodppsultra@yahoo.com

## **Maluku Utara**

Ketua : Christopher Herliem, SH  
Jl. Dr. Chasan Boesoerie No. 40 Ternate  
Maluku Utara (97721)  
T. 0921-326 231  
F. 0921-326 231  
E-mail : Apindomu@gmail.com;  
chrisherliem@yahoo.com;  
c.herliem56@gmail.com

## **Maluku**

Ketua : Hellen Sarita de Lima  
Hellen S. Koesnadi, SH & Part  
Jl. Cendrawasih Gg. Vina SK 3/2 No. 7  
Ambon (97123)  
T. 0911-341 257  
F. 0911-354 952  
E-mail : hellen\_ambon@yahoo.com

## **Papua**

Ketua : Drs. Simon P. Morin  
Jl. Raya Abepantai No. 30 Kel. Awiyo, Abepura,  
Jayapura (99351)  
T. 0967-582 459  
F. 0967-582 459  
E-mail : apindopapua@yahoo.com  
papua@apindo.or.id

## **Papua Barat**

Ketua : James Taroreh  
Jl. Brawijaya No. 4 Manokwari  
Papua Barat (98311)  
T. (0986) 211723  
F. (0986) 215281  
E-mail : papuabaratar@apindo.or.id;  
jamestaroreh@yahoo.com

5.000+

ATLET BULUTANGKIS TELAH  
DIBINA SEJAK TAHUN 1969.



9 ATLET  
PB DJARUM  
MEMPERSEMBAHKAN  
MEDALI OLIMPIADE  
UNTUK INDONESIA.



BANYAK MENJARAI OLIMPIADE, BWF WORLD  
CHAMPIONSHIPS, ALL ENGLAND, THOMAS  
DAN VEER CUP, SUDIRMAN CUP.

**DJARUM  
BEASISWA  
BULUTANGKIS**



17.000+  
ORANG

MENDAPATKAN BANTUAN AIR  
BERSIH DARI SUMUR RESAPAN  
DAN PENAMPINGAN AIR HUJAN.

**DJARUM  
SUMBANGSIH  
SOSIAL**



1.482

ORANG  
TELAH MENDAPATKAN  
OPERASI KATARAK GRATIS  
SEJAK 2012.



**DJARUM  
FOUNDATION**  
"MARI WUJUDKAN  
INDONESIA DIGDAYA!"

**DJARUM  
TREES FOR LIFE**

1.350 KM

JALUR PANTURA JAWA  
DARI MERAK-BANMUWANGI  
DITANAMI POHON TREMBESI  
YANG MAMPU MENERAP

1.000.000  
TON CO<sub>2</sub>  
SETIAP TAHUNNYA.

**DJARUM  
APRESIASI  
BUDAYA**

MENDUKUNG  
1.500+

KEGIATAN BUDAYA MELALUI  
PROGRAM DJARUM APRESIASI  
BUDAYA SEJAK TAHUN 1992.



GALERI INDONESIA KAYA  
DIDIRIKAN PADA TAHUN 2013  
SEBAGAI RUANG EDUTAINMENT  
BUDAYA BERBASIS MULTIMEDIA  
PERTAMA DI INDONESIA YANG  
GRATIS UNTUK UMUM.



8.808

MAHASISWA TELAH  
MENERIMA BEASISWA  
PRESTASI DAN  
PELATIHAN  
KEPEMIMPINAN



DI 110

PERGURUAN TINGGI  
UNGGULAN DI INDONESIA.

16

SEKOLAH MENENGAH KEURIAN  
(SMK) DI KABUPATEN KUDUS, JAWA  
TENGAH TELAH DIKEMBANGKAN  
MELALUI PROGRAM KEURIAN UNGGULAN.

[www.djarumfoundation.org](http://www.djarumfoundation.org)

**DJARUM foundation**

Bakti Pada Negeri

Sosial • Olahraga • Lingkungan • Pendidikan • Budaya



# Laporan Tahunan 2014

APINDO - Asosiasi Pengusaha Indonesia



**Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN APINDO)**

Gedung Permata Kuningan Lt. 10

Jl. Kuningan Mulia Kav. 9 C Guntur, Setiabudi, Jakarta 12980 - Indonesia

Telp : (62-21) 83780824 (hunting) - Fax : (62-21) 83780823, 83780746

Email : sekretariat@apindo.or.id - Website : www.apindo.or.id